

**NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG,
KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



ADIBAH BINTI YUSOF@ ABDULLAH SAARI

10921008912

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut hukum Islam.**

Diirungi Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada umatnya dari lembah kegelapan menuju bukit yang penuh dengan cahaya kebenaran.

Sebuah penulisan yang kerdil, sebagai hamba yang tak pernah bisa lepas dari keterbatasan, penulis yakin masih banyak keterbatasan dalam skripsi ini. Sehingga penulis selalu mengharapkan curahan partisipasi pembaca baik kritik maupun arahan yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan pihak lain. Baik itu bantuan moril maupun materil.

Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua, khususnya:

1. Kepada Suami tercinta Kepala Sekolah dan anak-anak tersayang, terima kasih karena kalian memahami perjuangan ummi di arena ilmu Allah ini, juga terima kasih yang tidak terhingga dan jemu menolong dalam penulisan penelitian ini. Kepada Arwah Bapak, Ibu, yang telah membantu dan memberikan banyak pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau yang telah menerima penulis sebagai Mahasiswa UIN dalam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
3. Yth. Bapak Dr. H. Akbarizan, M,A, M,Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Ketua Jurusan AHA dan Sekteritaris baik yang lama Dra. Ibu Yusliati mahupun yang baru Drs.Zainal Arifin.
5. Yth. Bapak Yusran Sabili Yashouk, M.Ag, selaku pembimbing yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan memberikan petunjuk serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Yth. Bapak dan ibu pembantu Dekan baik yang lama ataupun yang baru, terkhusus kepada Bapak Drs.Hajar M,NH,Bapak Drs.M.H Yunus,MA dan Ibu Hertina,M.Pd tanpa jemu memberi tunjuk ajar kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
7. Semua Bapak dan ibu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Semua Karyawan dan Pustakawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska.

9. Semua Bapak dan Ibu di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Mas yang banyak membantu untuk mendapatkan bahan penulisan skripsi ini.

10. Semua sahabat dan teman sejawat, yang telah memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas semua jasa mereka, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberi balasan dengan pahala yang berlipat ganda.

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi maupun pembaca lainnya.

Pekan Baru, Riau,

Penulis

Yusran Sabili Yasak, M.Ag
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universiti Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Januari 2012 Dosen
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum
di-
Pekanbaru

Nomor : NOTA DINAS

Lamp : -

Hal. : PENGAJUAN SKRIPSI

Sdri. ADIBAH BINTI YUSOF @ ABDULLAH SAARI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan meneliti, memeriksa dan memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa laporan penelitian skripsi atas nama: Adibah Binti Abdullah dengan judul skripsi:

Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut hukum Islam. Telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian Munaqasah guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Demikianlah kami semoga dapat waktu dekat ini saudara tersebut dapat dipanggil dalam ujian Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

Pembimbing

Yusran Sabili Yasak, M.Ag
NIP:196503131992031003

ABSTRAK

Adibah Bt Yusof @ Abdullah Saari (2012). **NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA: SATU KAJIAN DI RANTAUPANJANG, KELANTAN.** Skripsi. Jurusan Ahwal Syahksiah. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Idealnya sebuah perkawinan hendaknya diawali dengan sesuatu yang Islami, tidak dicampuri oleh apapun yang dapat mengurangi nuansa Islami dalam perkawinan. Istilah 'kawin liar' merujuk kepada pernikahan alternatif yang dijalani oleh pasangan dalam keadaan mereka meliarkan diri dari pada prosedur biasa Mahkamah Syariah. Karena ketentuan perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian, cara pertunangan, pemberianmahar, wali, proses perkawinan, perkawinan yang diharamkan dan lain sebagainya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin liar di Rantau Panjang? 2. Apakah dampak perkawinan liar terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang? dan 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan liar di Rantau Panjang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat dan penelitian terhadap kasus mahkamah sehingga diperoleh data yang jelas.

Teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan realiti yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin liar yang berlaku adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada dalil atau anjuran satupun yang menghalalkan kawin liar dengan kata lain akibat yang timbul atau dampak kawin liar sangat bertentangan dengan perintah dan larangan Allah SWT. Bagaimanapun terdapat juga kalangan ulama yang mengatakan bahwa kawin liar sah disisi Islam. Apa yang menjadi halangan adalah undang-undang civil yang ditentukan oleh kerajaan. Namun begitu hasil dari nikah liar ini bisa mengundang efek yang negative seperti nikah liar ini dapat merusak rumah tangga yang utuh setelah sekian lama ia dibina atas dasar kasih sayang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin disampaikan agar masyarakat jangan menjadikan kawin liar ini sebagai budaya. Dan juga control dari masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan kawin liar ini.

ABSTRACT

Adibah Bt Abdullah (2012). **RUN AWAY MARRIAGE AND ITS IMPACT: CASE STUDIED IN RANTAU PANJANG, KELANTAN.** Thesis. Department of Ahwal syahksiah. Faculty of Syariah and Law knowledge. State Islamic Institute University of Sultan Sharif Kasim Riau, Pekanbaru. Ideally, a marriage should be preceded by something that is Islamic, not interfered with by anything that can reduce the nuances in the Islamic marriage. The term 'illegal marriage' refers to the alternative of marriage by the couple lived in a state they fled rather than the usual procedure Syariah Court. Because the provision of marriage in Islam has been discussed in details starting from the definition, meaning the engagement, giving dowry, guardian, marriage processions, marriage is forbidden and so forth.

The problems examined in this study were: 1. What are the factors that cause the 'illegal marriage' in the Rantau Panjang? 2. What is the impact of illegal marriage for family life and society in the Rantau Panjang? And 3. How to review the Islamic law against still legal marriage practices in the Rantau Panjang? The research method used in this study is a field research and directly faced to the community and a study of court cases in order to obtain accurate data. The data collection techniques that are free guided in interviews, observation, and documentation. Based on the data collected and analysed by using a normative approach, namely the reality that occurs in society, whether public provision is appropriate or not in the view of Islamic law. Based on the analysis of Islamic law on research data, it can be concluded that the prevailing tradition of eloping is not in accordance with the provisions of Islamic law because in the Qur'an and the Hadith there is no proof for suggestion that justifies anyone eloped with another word or impact since due to elope is contrary to the commands and prohibitions of Allah SWT. However there are also among the scholars who do not say that the legitimacy of the elopement of Islam. What is the hitch is a civil law which is determined by the kingdom. Based on the results of research that has been done, then the advice to be conveyed so that people do not make this elopement as a culture. And also the control of society is needed to prevent abuses by certain parties related to this elopement.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

MUKA SURAT

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah Kajian | 1 |
| B. Batasan Masalah | 12 |
| C. Rumusan Masalah..... | 13 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 16 |

BAB II PROFIL LOKASI KAJIAN DAN METODE ANALISIS DATA

| | |
|-----------------------|----|
| A. Profil Lokasi..... | 18 |
| B. Geografi..... | 21 |
| C. Ekonomi..... | 22 |
| D. Penduduk..... | 22 |
| E. Agama..... | 23 |
| F. Pendidikan..... | 23 |
| G. Adat Istiadat..... | 24 |

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

| | |
|--|----|
| A. Pengertian..... | 25 |
| B. Keberadaan Wali dalam Perkawinan..... | 28 |
| C. Kawin Liar Dalam Pandangan Perundangan..... | 41 |

BAB IV NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Nikah liar di Rantau Panjang..... | 52 |
| B. Faktor penyebabnya terjadi Nikah Liar dalam masyarakat..... | 75 |
| Rantau Panjang, Kelantan | |
| C. Dampak Pernikahan Liar Terhadap Keluarga Di Rantau..... | 78 |
| Panjang Kelantan | |
| D. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akibat..... | 84 |
| nikah liar di Thailand | |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 94 |
| B. Saran..... | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----------|---|---|----|
| TABEL 1 | : | Tahap Pendidikan | 23 |
| TABEL 2 | : | Jumlah permohonan ' <i>Ishat Nikah</i> ' di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. | 54 |
| TABEL 3 | : | Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya | 61 |
| TABEL 4 | : | Nikah liar mempunyai sindiket | 62 |
| TABEL 5 | : | Nikah liar menjatuhkan maruah keluarga | 64 |
| TABEL 6 | : | Nikah liar semakin berleluasa | 66 |
| TABEL 7 | : | Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu | 69 |
| TABEL 8 | : | Nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak | 70 |
| TABEL 9 | : | Nikah liar banyak disebabkan oleh poligami | 71 |
| TABEL 10 | : | Nikah liar dibenarkan oleh Mahkamah dengan menggunakan wali hakim | 72 |
| TABEL 11 | : | Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil | 73 |
| TABEL 12 | : | Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali | 74 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----------|---|---|----|
| TABEL 1 | : | Tahap Pendidikan | 23 |
| TABEL 2 | : | Jumlah permohonan ' <i>Ishat Nikah</i> ' di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. | 54 |
| TABEL 3 | : | Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya | 61 |
| TABEL 4 | : | Nikah liar mempunyai sindiket | 62 |
| TABEL 5 | : | Nikah liar menjatuhkan maruah keluarga | 64 |
| TABEL 6 | : | Nikah liar semakin berleluasa | 66 |
| TABEL 7 | : | Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu | 69 |
| TABEL 8 | : | Nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak | 70 |
| TABEL 9 | : | Nikah liar banyak disebabkan oleh poligami | 71 |
| TABEL 10 | : | Nikah liar dibenarkan oleh Mahkamah dengan menggunakan wali hakim | 72 |
| TABEL 11 | : | Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil | 73 |
| TABEL 12 | : | Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah S.W.T dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah S.W.T telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dan manusia tidak boleh berbuat semahunya seperti mana makhluk-makhluk Allah S.W.T yang lain. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah secara jelas telah menggariskan hukum berkaitan dengan perkawinan umpamanya, mengenai peminangan sebagai pendahuluan perkawinan, mahar atau mas kawin, upacara akad nikah, kerukunan dalam berumah tangga, perceraian, rujuk, idah, muta'h dan sebagainya.

Di Malaysia, urusan pernikahan merupakan sebahagian daripada urusan agama yang termasuk di dalam bidang kuasa negeri-negeri.¹ Ia adalah antara perkara-perkara yang diletakkan dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dan Senarai 2 Perlembagaan Negeri² Melalui peruntukan ini, setiap negeri di Malaysia mentadbirkan urusan agama mengikut peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan setiap negeri melaksanakannya berdasarkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan

¹ Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-undang Keluarga dalam Islam*, (Syarikat Dian Sdn.Bhd, Kota Bharu, Kelantan, 1998). h. 40

² Prof. Madya Dr. Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin *Undang-undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Jarak jauh UKM, 2002), h. 237

kedudukan keuangan mereka. Walaupun ada usaha-usaha ke arah penyelarasan dan penyeragaman undang-undang berkaitan agama Islam di Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atas arahan Perdana Menteri, ia masih belum lagi diwartakan dan dilaksanakan sepenuhnya atas alasan-alasan teknikal dan pengubahsuaian draf undang-undang bagi kesesuaian pemakaiannya di negeri-negeri.³

Kesan perundangan ini membolehkan setiap anggota keluarga itu yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak dan kaum kerabat yang terlibat mendapat hak masing-masing daripada pernikahan tersebut. Selain daripada itu, dengan perkawinan yang diiktiraf ini membolehkan semua anggota keluarga mengambil tanggungjawab dalam memastikan kebahagiaan dan keharmonian dalam hidup berumah tangga.

Istilah 'kawin liar' merujuk kepada pernikahan alternatif yang dijalani oleh pasangan dalam keadaan mereka melarikan diri daripada prosedur biasa Mahkamah Syariah.

Biasanya mereka lari ke negara jiran untuk menikah secara mudah. Tindakan mengelak daripada melalui proses biasa, lazimnya kerana mereka mahu berpoligami tetapi tidak dapat melengkapinya syarat-syarat yang dikenakan oleh undang-undang dan (atau) tidak mau perkawinan tersebut diketahui oleh istri pertama. Ada juga yang bertindak untuk kawin liar kerana pilihan mereka tidak direstui oleh orang tua.

Kawin liar sebenarnya suatu kesalahan dan undang-undang memperuntukkan hukuman denda atau penjara terhadap kesalahan ini. Walaupun

³ *Berita Harian*, 15 Januari 2003.

hukuman telah diperuntukkan terhadap kesalahan ini, akan tetapi fenomena ini seakan tidak nampak berkurang. Sekiranya status pernikahan tidak jelas dan tidak didaftarkan tentulah ia memberi implikasi yang sangat tidak baik.

Walaupun dari sudut hukum Islam kemungkinan pernikahan tersebut sah, tetapi dengan tidak adanya dokumen yang diakui oleh undang-undang negara, menjadikannya tidak diiktiraf oleh undang-undang.

Kawin liar juga mempunyai kaitan dengan wali yaitu tanpa keizinan wali maka pasangan yang berkawin mengambil jalan sendiri dengan berkawin di luar dari wilayah tempat tinggalnya.

Teks al-Quran yang menjelaskan tentang kepentingan wali dalam perkawinan sebagaimana yang diperuntukkan dalam al-Quran surah al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمُ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa idah mereka ' maka janganlah kamu (Wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkawin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (laki-laki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua Yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya.⁴

Berdasarkan tafsiran di atas, jelaslah bahwa ayat tersebut difokuskan kepada para wali. Ia dapat difahami apabila terdapat tegahan yang ditujukan

⁴ Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Cetakan Keenam, 1988), h. 90

kepada para wali agar tidak menghalang anaknya yang telah diceraikan untuk kembali semula kepada bekas suaminya.

Keperluan tentang wali juga boleh dilihat berasaskan penjelasan yang dibuat oleh Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadis yang bermaksud:⁵

"غير القديسين. الجامعها هناك المهر إلزامية لأنها كانت معها. لا غيا وغير شرعي ، مقدمي الرعاية الذين ليس لديهم .

“Tidak sah nikah itu melainkan dengan adanya wali. Mana-mana wanita berkawin tanpa keizinan walinya maka nikahnya adalah batal. Apabila ia telah bersetubuh dengan wanita itu, maka yang wajib adalah mahar mitsli disebabkan ia telah mencampuri wanita itu. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (Abu Daud dan al-Thirmidhi).

Mengikut tertib wali, bapa hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya. Dan jika bapa tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu; dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara laki-laki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya.⁶

Anak-anak yang lahir daripada perkawinan yang tidak didaftarkan juga menerima tempias kesan yang tidak baik. Segala perkara rutin yang memerlukan dokumen yang sah tentunya tidak akan dapat dibuat disebabkan ketiadaan dokumen yang diperlukan.

Umpamanya perkara-perkara yang melibatkan kesihatan, persekolahan dan tabungan di bank. Sekiranya fenomena ini menjadi berleluasa, ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat keseluruhannya.

⁵ Abu Daud, *as-Sunan*, Dar al-Hadits, Syria.

⁶ al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 5 vol.

Disebabkan perkawinan ini biasanya akibat daripada keengganan bapa untuk memberi restu kepada pasangan, maka tentulah si bapa enggan untuk menjadi wali kepada pernikahan tersebut. Maka perkawinan tersebut menggunakan wali hakim.

Ada juga keadaan yang ibu bapa tidak tahu-menahu langsung tentang tindakan kawin liar oleh anak-anak mereka. Di sini timbul persoalan sama ada pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim ini, memang disebabkan ketiadaan wali ataupun lari daripada wali.

Mereka yang menikah liar beranggapan walaupun ia merupakan kesalahan, tetapi ia bukan masalah yang berat. Ini kerana perkawinan yang sah tetap boleh didaftarkan melihat kepada tempat pernikahan dijalankan itu berada lebih dua marhalah (lebih kurang 91 kilometer) dari tempat tinggal wali. Akan tetapi sebenarnya, perkara yang lebih penting daripada jarak jauh itu adalah penafian bapa sebagai wali itu.

Wali hakim hanya dapat memainkan peranan dalam keadaan bapa masih ada, sekiranya terdapat sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum Syarak. Sebaliknya, sekiranya keengganan wali itu disebabkan alasan yang munasabah, maka tidak boleh wali hakim untuk mengambil peranan sebagai wali.

Dan yang lebih penting lagi untuk diketahui, keengganan wali atas alasan yang munasabah dapat membatalkan pernikahan tersebut.

Untuk menentukan keengganan bapa itu munasabah atau tidak, antaranya adalah sebagaimana yang diputuskan dalam kes Haji Mohamed lawan Bahrurnasran dan Mazliani Mohamed.⁷

⁷ *Malaysia Law Jurnal*, Jabatan Kehakiman syariah Malaysia. Unit Penerbitan JAKIM . 1999

Dalam kes yang diputuskan pada tahun 1997 ini, bapa selaku wali mujbir membuat permohonan pembatalan pernikahan antara Bahrurnnasran dengan Mazliani, anaknya. Permohonan ini dibuat atas alasan pernikahan tersebut dibuat tanpa pengetahuan dan keizinannya sebagai bapa merangkap wali, pasangan anaknya tidak sekufu karena Bahrurnnasran seorang pesakit HIV dan merupakan penagih dadah.

Pernikahan antara kedua-duanya telah dibuat sebanyak dua kali, dengan yang pertama dilangsungkan di Pasir Puteh, Kelantan yaitu dalam negeri melalui wali hakim, dan yang kedua di Narathiwat, Thailand. Permasalahan dalam pernikahan yang pertama timbul kerana dinikahkan dengan wali hakim sedangkan wali sebenar masih ada.

Permasalahan dalam pernikahan yang kedua timbul bukan disebabkan rukun nikah kerana jarak jauh yang memang melangkaui dua marhalah dari tempat tinggal wali, tetapi disebabkan kedua-duanya dilihat sebagai tidak sekufu dari pihak calon suami yang berpenyakit HIV dan menagih dadah(akibat nakoba).

Dalam kes ini Mahkamah memutuskan bahawa tindakan wali hakim berkenaan bertentangan dengan kehendak hukum syarak kerana telah menyatukan dua pihak yang tidak padan (sekufu) dan perkahwinan yang dijalankan sama ada di Kelantan mahupun di Narathiwat adalah tidak sah menurut hukum Syarak. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar lingkungan dua marhalah belum tentu sah walaupun menggunakan wali hakim, dalam keadaan wali asal masih ada dan wali asal mempunyai alasan yang munasabah untuk menghalang pernikahan daripada berlaku.

Bidang kuasa Peruntukan sudah pun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahwa,⁸

"Sesuatunya perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada - (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syarak; atau (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi".

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.⁹

Dalam keadaan ini, sekiranya perkawinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai syarat rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

Wajar untuk diketahui bahwa, pasangan yang hendak berkawin tetapi kehendak mereka tidak direstui oleh orang tua, dalam keadaan mereka menganggap bahwa perhubungan tersebut tidak ada cacat celanya dari segi Syarak

⁸ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas. KES JENAYAH NO : 11009-143-0035-2003

⁹ Syeikh Ali Hassan Ahmad, *Munakahat Membahas Soal-soal Perkawinan Dan Rumahtangga*, (Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur, 1997), h.95-96

dan adat, undang-undang sebenarnya memberikan ruang yang selesa kepada mereka untuk meneruskan hasrat mulia tersebut.

Walaupun pada dasarnya doa restu orang tua itu sangat penting dan menjadi batu asas sesebuah perkawinan yang hendak didirikan, akan tetapi garis panduan yang telah diberikan agama itu sebenarnya lebih mengatasi pertimbangan dan kata hati seseorang. Melalui pandangan para ulama, soal kufu atau sifat padan pasangan itu sepatutnya menjadi neraca untuk memilih pasangan. Pandangan para ulama bersifat sangat bernas untuk dijadikan sebagai panduan.

Seandainya hubungan tidak direstui disebabkan hal-hal yang remeh-temeh dan ia dibangkitkan oleh ahli keluarga, nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak kerana Mahkamah Syariah bersedia untuk mendengar permohonan bagi kes seumpama ini.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Seksyen 13 sebelum ini, sekiranya wali enggan memberikan persetujuan tanpa alasan yang sempurna, Mahkamah akan membenarkan perkawinan yang diniatkan itu untuk diteruskan dengan menggunakan wali hakim. Inilah jalan penyelesaian yang sebenar, iaitu membawa masalah ke muka pengadilan. Di sini tidak timbul soal menjadi anak derhaka atau membelakangi orang tua karena undang-undang mengatasi semua orang dan setiap orang tertakluk kepada undang-undang. Tanpa mengira siapa pun seseorang itu, ia perlu mematuhi undang-undang dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah.

Menyedari bahwa terdapat sebilangan rakyat negeri ini yang berhasrat untuk menikah di luar negara, suatu peraturan telah diatitkan bagi mereka mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Kelantan 2002. Seseorang

yang ingin menikah di luar negara Malaysia sama ada pernikahan dengan warganegara asing atau tempatan atas alasan masalah keizinan keluarga atau apajua alasan, mereka dimestikan mendapat izin terlebih dahulu daripada pihak berkuasa agama negeri sebagaimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990.¹⁰

Sekiranya permohonan tersebut telah lengkap dengan dokumen yang diperlukan di atas termasuk dokumen tambahan lain yang diperlukan bagi kes-kes tertentu seperti surat keterangan diri calon pasangan bagi kes pasangan warga negara asing, surat *wakiilah* wali bagi kasus wali tidak dapat hadir ke majlis akad nikah di luar negara dan suratakuan memeluk Islam jika pasangan adalah seorang mualaf. Selepas diluluskan oleh Pegawai Tadbir Agama Daerah, surat kelulusan tersebut perlu dirujuk kepada Kadi Besar atau jawatan sekarang dipanggil sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syarak, Jabatan Agama Johor. Selepas Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syarak berpuas hati dengan segala keterangan yang ada, beliau akan mengeluarkan satu surat kebenaran untuk bernikah di luar Negara yang ditujukan kepada pihak berkuasa agama negara yang dipilih oleh pasangan itu.¹¹

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perkawinan merupakan satu tuntutan agama dan merupakan fitrah manusia. Untuk mencapai hasrat berumah tangga, banyak di kalangan umat Islam sanggup mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan hari yang bersejarah ini diadakan dengan gilang-gemilang.

¹⁰ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

¹¹ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur, 2004), h.1-2.

Tradisi pemikahan seperti ini seharusnya dikekalkan bagi menjamin keharmonian dan permuafakatan dalam masyarakat. Ia adalah disebabkan proses pemikahan ini dilakukan mengikut saluran yang benar dan di lakukan secara telus serta dapat diterima oleh semua pihak termasuk kedua pasangan itu sendiri, keluarga masing-masing, masyarakat sekitar, hukum agama dan juga undang-undang di negara ini .

Bagaimanapun terdapat sejumlah pasangan yang melangsungkan akad nikah dengan cara yang dapat disifatkan sebagai 'mistri '. Mistri karena terkadang pernikahan mereka tidak diketahui oleh keluarga terdekat, jiran tetangga dan tidak ada dokumen yang sah yang menunjukkan pernikahan tersebut. Ini mungkin disebabkan pernikahan tersebut dilakukan di luar negara tanpa pengetahuan pihak berkuasa agama atau dinikahkan secara sindiket (calo) atau pernikahan yang sengaja disembunyikan karena tujuan dan kepentingan tertentu mereka.

Nikah di luar negara dibolehkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 tetapi dengan syarat mesti mendapat kebenaran pihak berkuasa agama terlebih dahulu. Sekiranya dilakukan tanpa kebenaran ia dapat dituduh telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 39 enakmen di atas dan bisa dihukum dengan denda tidak melebihi RM 1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bahkan jika melibatkan poligami, pasangan tersebut boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 122 enakmen yang sama.¹²

¹² Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 1990.

Isu pernikahan di luar negara semakin hangat pada awal tahun 2003 ketika Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan akan memudahkan laki-laki berpoligami termasuk melonggarkan syarat seperti tidak memerlukan kebenaran istri pertama bagi menyekat laki-laki di negara ini pergi ke Thailand untuk menikah. Gambaran yang diberikan dari laporan akhbar seolah-olah setiap pasangan yang menikah di luar Negara (khususnya Thailand) adalah pernikahan poligami atau nikah liar, sedangkan kemungkinan banyak lagi sebab-sebab lain yang mendorong pasangan tersebut menikah di luar negara.¹³

Contoh kasus, Kasus Mal bil: 0 1 003-0 1 0-387/03 di antara pemohon pertama Suhaimi bin Md. Said dan pasangannya pemohon kedua iaitu Sharifah Ainon bt Syed Abbas. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkla, Thailand pada 4/10/2002 dengan menggunakan wali hakim . Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan pasangan menikah di Wilayah Songkla, Thailand ialah karena kedua orang tua pihak perempuan tidak setuju dengan pilihan anaknya yang bukan dari keturunan ' Syed ' seperti mereka dan seterusnya wali beliau enggan mewalikan. Pasangan juga menyatakan bahwa mereka pernah membuat permohonan menikah di Pejabat Agama Pasir Mas namun permohonan mereka tidak di layan.¹⁴

Jika diamati sekarang ini, banyak rakyat Malaysia tanpa mengira nama, pangkat, darjat dan status, menikah di Selatan Thailand sama ada di wilayah Songkhla, Narathiwat atau Pattani. Ada informasi dari seorang rakan ketika saya

¹³ *Berita Harian*, 15 Januari 2003.

¹⁴ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas, NO : 11009-143-0036- 2003.

berkunjung ke Thailand baru-baru ini bahwa di Majlis Agama Islam Narathiwat saja lebih 10 pasangan dinikahkan sehari.¹⁵

Kalau betul angka itu, bermakna isu ini amat serius dan ia amat membimbangkan. Persoalannya, apakah sebab atau faktor menyebabkan individu tertentu ini mengambil 'jalan singkat' tanpa mengira kesannya dari sudut perundangan serta hukum syarak.

Pernikahan di luar negara tanpa kebenaran adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta/Enakmen Keluarga Islam apatah lagi bagi individu yang sudah mempunyai istri. Wujud pelbagai faktor menyebabkan mereka ini menikah di luar negara. Antaranya, alasan masalah keluarga.

Oleh karena tidak terdapat satu undang-undang yang sama dalam urusan nikah liar ini antara negeri dan menjadi polemik yang hebat dari segi hukum syara', maka penelitian ini adalah untuk menyelidik dengan lebih terperinci tentang nikah liar dan dampaknya terhadap masyarakat. Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi : **NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA: SATU KAJIAN DI RANTAU PANJANG, KELANTAN.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada faktor nikah liar dan dampaknya terhadap masyarakat terutamanya penduduk Rantau Panjang.

¹⁵ Muhammad Al Tarmiziy Bashar (Pegawai Agama Majlis Agama Islam Kota Bharu) Wawancara Kota Bharu, 9 Oktober 2011.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksana Nikah Liar dalam masyarakat Rantau Panjang?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah liar di Rantau Panjang?
3. Apakah dampak perkawinan liar terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan liar di Rantau Panjang?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah liar dalam masyarakat Rantau Panjang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah liar dalam masyarakat Rantau Panjang.
3. Untuk mengetahui dampak nikah liar terhadap masyarakat setempat, khususnya terhadap anak dan keluarga.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum syara' mengenai kawin liar di Rantau Panjang.

b) Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menambahkan pengetahuan penulis tentang masalah dan yang terkait dengan nikah liar.
 2. Untuk lebih bersikap terbuka dan hati-hati terhadap nikah liar
 3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana muda di UIN Riau.
- Ada beberapa manfaat dari penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berlokasi di Rantau Panjang, Kelantan.¹⁶

2. Subyek dan Obyek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sebagai:

Pasangan-pasangan suami istri yang melaksanakan nikah liar di Rantau Panjang, pemuka masyarakat (ulama atau imam) dan masyarakat sekitar yang mengetahui tentang nikah liar di Rantau Panjang.

Obyek penelitian ini adalah tentang nikah liar dan dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan.

3. Sumber Data

a) Primer

Yaitu yang diambil dari sampel penelitian

b) Sekunder

Yaitu diambil dari buku-buku, majalah yang terkait dengan masalah nikah liar.

¹⁶ Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Avyrouz, Yogyakarta, 2000), h. 79.

4) Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap data-data tahun 2010 di mana kasus yang terjadi sebanyak 25 kes. Penulis mengambil hanya 50% daripada kes tersebut untuk dijadikan sampel. Sampel tersebut penulis ambil menggunakan random sampling.

5) Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan data mengenai realiti nikah liar.

b. Angket

Angket dijadikan sebagai satu sumber kajian dan didistribusi untuk mendapatkan maklumat serta maklumbalas daripada responden.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah populasi di Rantau Panjang dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis¹⁸ (berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990, h. 174.

¹⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 135

6. Metode analisa data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode:

a. Deskriptif

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan.¹⁹

b. Induktif

Proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan bersifat khusus kemudian dibahas dengan pola berfikir yang bersifat umum.

c. Deduktif

Proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan bersifat umum kemudian dibahas dengan pola berfikir yang bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Lokasi penelitian di Rantau Panjang, Kelantan. Ruang lingkupnya adalah:

a. Penduduk

¹⁹ Winarno Surakhmad, *op.cit.*, h. 139

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 280.

- b. Agama
- c. Pendidikan
- d. Adat dan budaya

Bab III: Masalah perkawinan dalam Islam:

- a. Pengertian dan dasar hukum perkawinan
- b. Syarat-syarat dan rukun perkawinan
- c. Perkawinan yang dilarang
- d. Hikmah perkawinan

Bab IV: Bab ini menguraikan:

- a. Faktor penyebabnya terjadi perkawinan liar di Rantau Panjang, Kelantan
- b. Dampak perkawinan liar terhadap keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang, Kelantan
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan Liar di Rantau Panjang, Kelantan

Bab V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini pada masa yang akan datang.

BAB II

PROFIL LOKASI KAJIAN DAN METODE ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi

1. Sejarah Berdiri

Rantau Panjang merupakan sebuah wilayah perbatasan antara Malaysia dan Thailand yang terletak di utara negeri Kelantan dalam kawasan barat jajahan Pasir Mas. Ia berada 39 kilometer di barat daya bandar Kota Bharu dan terletak berdekatan dengan Sungai Golok, Thailand.¹ Ia terkenal dengan pelbagai barangan jualan dan cenderahati. Pemeriksaan Unit Pencegah Penyeludupan, Jabatan Kastam dan Ekais Diraja, Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia menguatkuasakan sekatan di sekitar Rantau Panjang untuk menghindarik penyeludupan dadah, beras, gula, manusia dan sebagainya. Rantau Panjang dikenali ramai sebagai kawasan zon bebas cukai. Terdapat banyak pangkalan haram berada di sini untuk melakukan kegiatan haram dari sempadan.²

Rantau Panjang merupakan sebuah pekan yang bersempadan antara Malaysia dan Thailand yang terletak di utara negeri Kelantan. Ia berada 39 kilometer di barat daya bandar Kota Bharu dan terletak berhampiran dengan Sungai Golok, Thailand.

¹ Alias Muhammad, *Kelantan potitik dan dilemma pembangunan*, (Penerbitan Utusan Malayu (M) Bhd., Kuala Lumpur, 1975), h. 1.

² *Sejarah Ringkas: Kerajaan Jembal Kelantan, terbitan Pertubuhan Kerabat Raja Jembal Kelantan*, (Kota Bharu, Urusetia Jabatan Penerangan Kelantan). h.33

Rantau Panjang merupakan pekan kecil di tepi sempadan Malaysia dan Thailand. Sempadan antara kedua-dua negara hanyalah sebatang sungai, Sungai Golok.

Terletak kira-kira 45 km dari Kota Bharu, Rantau Panjang merupakan sebuah tempat yang terkenal dan sentiasa menjadi tumpuan ramai. Ia terkenal dengan pelbagai barangan jualan dan cenderahati.³

Rantau Panjang juga merupakan salah satu pintu masuk ke Malaysia dari negara Thai. Perkampungan ini dinamakan sempena susun atur perumahan panjang yang dibina semasa pembinaan landasan keretapi di selatan. Rantau Panjang membawa maksud '*perjalanan pencapaian yang panjang/lama*'.

Pelbagai tarikan terdapat di Rantau Panjang. Merupakan kawasan membeli-belah yang terkenal di Kelantan. Pengisytiharan sebagai Zon Bebas Cukai pada 2002, Telah menjadikannya sebagai pusat membeli-belah yang paling kerap dikunjungi pelancong setiap tahun di Kelantan terutama pelancong tempatan. Pelbagai barangan seperti peralatan elektronik, pakaian dan peralatan dapur boleh dibeli dengan harga yang murah dan berpatutan. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan membeli belah seperti *money changer*, mesin ATM dan sebagainya. Di samping menjadi tumpuan membeli-belah, Rantau Panjang juga merupakan pintu keluar masuk ke Thailand yang menghubungkannya dengan pekan Golok.

³ Rahmat bin Sharipan. *Pengembang Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1979).h.67

Sungai Golok yang menjadi sempadan Malaysia-Thailand adalah sempadan antarabangsa yang memisahkan Malaysia dan Thailand yang merentasi Kuala Perlis, Perlis di barat ke muara Sungai Golok⁴ di Pengkalan Kubur, Kelantan di timur. Sempadan ini wujud semenjak tahun 1909, berikutan Perjanjian Inggeris-Siam 1909. Di sempadan, terdapat barriers yang dibina oleh Malaysia dalam 1970-an, untuk mencegah penyeludupan.

Semasa Darurat Malaya dan perang dengan Komunis sehingga 1970-an, pemberontak komunis biasanya menyeberang masuk ke Thailand, balik semula ke Malaya (dan akhirnya Malaysia) untuk mengelakkan penangkapan oleh Malaya dan tentera the Komenwel.

Terdapat empat negeri yang bersempadan dengan Thailand. Daripada barat ke timur, mereka adalah Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Di sebelah Thailand pula terdapat empat wilayah iaitu daripada barat ke timur, mereka adalah Satun, Songkhla, Yala dan Narathiwat⁵.

Bandar Rantau Panjang adalah terletak bersempadan dengan Sungai Golok, Thailand merupakan pintu keluar – masuk dan pusat membeli belah yang utama di Jajahan Pasir Mas khususnya dan Negeri Kelantan amnya. Ianya boleh

⁴ Ibrahim Syukri. *History of the Malay Kingdom of Patani*. Center for International Studies, (Ohio University, Athens, Ohio, 1985). h. 66

⁵ Sa'ad Shukri bin Haji Muda, Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh & Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi. *Detik2 Sejarah Kelantan*. (Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, 1971).h. 43

dihubungi melalui laluan keretapi dan Jalan Pasir Mas – Rantau Panjang sejauh 25 km dan 40 km dari Kota Bharu.⁶

B. Geografi

Secara keseluruhannya mukabumi Rantau Panjang adalah mendatar dengan paras ketinggian antara 5 m – 10 m dari aras laut. Mukabumi seumpama ini sesuai untuk menampung sebarang pembinaan dengan kos pembangunan tanah yang minima. Tetapi dari sudut lain, ianya sering ditenggelami banjir akibat limpahan daripada air Sungai Golok. Akibat pembangunan tanah berlaku penambakan (filling) bagi meninggikan tapak untuk mengelak daripada ditenggelami air.

Pecahan guna tanah adalah sebagaimana berikut:-

| Kawasan | Km2 |
|----------------|----------------|
| Bandar | 37.6 |
| Pertanian | 1,426.5 |
| Paya | 527.1 |
| Terbiar | 304.8 |
| Rezab | 95.6 |
| Jumlah | 2,391.6 |

(Sumber : Jabatan Perangkaan Negeri *Kelantan*)

⁶ *Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995).h. 77

C. Ekonomi

Dalam aspek perkembangan ekonomi,⁷ wujudnya pertalian yang kukuh antara Rantau Panjang dengan bandar-bandar di Selatan Thailand terutama dalam sektor perniagaan dan perkhidmatan dimana Rantau Panjang dapat meraih faedah langsung daripada aktiviti tersebut. Kedudukan dan peranannya sebagai ‘transit point’ ke negara jiran menyemarakkan lagi sektor pelancongan untuk berkembang pesat.⁸ Penubuhan Majlis Tempatan Rantau Panjang merancakkan lagi pembangunan ekonomi. Majlis Tempatan Rantau Panjang telah ditubuhkan pada pertengahan tahun 1970an yang meliputi kawasan pekan Rantau Panjang dan sekitarnya dengan lingkungan 37.6 km persegi. Pada 1 hb. Januari 1979 berikutan penyusunan semula Penguasa Tempatan, pentadbiran Majlis Tempatan Rantau Panjang disatukan dibawah Majlis Daerah Pasir Mas. Kawasan majlis tempatan ini dikenali sebagai kawasan Majlis Daerah Pasir Mas Cawangan Rantau Panjang.

D. Penduduk

Mengikut bancian tahun 1991, penduduk Rantau Panjang adalah seramai 8,436 orang yang mana hampir 94% adalah Melayu. Kadar pertumbuhan tahunan adalah 2.6 % dan dijangkakan pada tahun 2010 akan meningkat kepada 13,752 orang. Pola penduduk adalah bertumpu di kawasan bandar dan sekitarnya.⁹

⁷ Abdul Halim Nasir, *Panduan ke tempat-tempat bersejarah Kelantan*, (Jabatan Muzium Negara, Kuala Lumpur, 1979), h. 15-32

⁸ *Ibid*, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu

⁹ Jabatan Perangkaan Negeri Kelantan, *Pecahan Kawasan Tanah di Kelantan*, (Kota Bharu, Dian Darulnaim, 2000), h. 39

E. Agama

Komposisi penduduk Rantau Panjang di Kelantan menempatkan seramai 90.1% penduduk Islam, Cina 2.2%, India 0.3% dan lain-lain (Siam) 8.2%. Ia sebuah kawasan mutlak bermajoriti Melayu sebagaimana semua kawasan lain di Kelantan.¹⁰

F. Pendidikan

Dari segi tahap pendidikan dapat dilihat dalam table dibawah:

Tabel 1
Tahap Pendidikan

| Tahap Pendidikan | Bilangan | % |
|---------------------|----------|-----|
| Ijazah Lanjutan | 6 | 24 |
| Ijazah Sarjana Muda | 10 | 40 |
| Diploma | 3 | 12 |
| Sekolah Menengah | 4 | 16 |
| Lain-Lain | 2 | 8 |
| Jumlah | 25 | 100 |

Dari table diatas menunjukkan tahap pendidikan responden, Paling ramai ialah kelulusan ijazah sarjana muda yaitu sebanyak 10(40%) diikuti dengan ijazah

¹⁰ *Ibid*

sarjana sebanyak 6(24%), sekolah menengah 4 (16%), diploma 3(12%) dan lain-lain sebanyak 2(8%)

G. Adat Istiadat

Kebanyakan adat istiadat di kawasan rantau panjang adalah mengikut tradisi Melayu dan bercampur dengan tradisi kesultan Pattani.¹¹

¹¹ Nik Muhammad b.Nik Mohd Salleh, *Jurnal sejarah Kelantan*, (Kota Bharu, Kelantan, 1975), h. 1-30.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.² Hal ini sejalan dengan firman Allah:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ()

¹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, 1, 1995, h. 56.

³ Q.S. Ar-Rum: 21, Departemen Agama R.I

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).⁴

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan)

⁴ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998*, hlm. 74.

Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.⁵ Allah SWT berfirman:

بِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ()

Artinya: “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat:49)⁶

Allah SWT juga berfirman:

يَحْنُ الَّذِي خَلَقَ الْآزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ()

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaa Sin: 36)⁷

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Ayat di atas, merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah,⁹ demikian juga al-qur'an Surah al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

⁵ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 270.

⁶ Q.S. Ad Dzariyat:49, Departemen Agama R.I

⁷ Q.S. Yasin:39, Departemen Agama R.I

⁸ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, h. 75.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diklat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002, h. 2.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ()

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman ...” (QS. Al-Baqarah: 221)¹⁰

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna (hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.

B. Keberadaan Wali dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.¹¹

¹⁰ Q.S. Al Baqarah: 221, Departemen Agama R.I

¹¹ Zuhaili, Wahbah. *Usul al Fqh al Islami*, jil. I, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat al-quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-baqarah ayat 221 .

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ()

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa idah mereka maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkawin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya. (al Baqarah:232)¹²

¹² Q.S. Al Baqarah: 232, Departemen Agama R.I

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut diatas kepada paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4 kemungkinan perempuan tersebut diatas.¹³

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja. Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul, Keempat Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadist Nabi SAW. Yang artinya :

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ (غير صالح)

Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal (tidak sah)”

Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir atau penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada Wali dari keluarganya (Ayah atau keluarga lainnya),

¹³ Prof. Dr. Air Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 1998), h. 90-91

karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu.¹⁴

Si bapa dan datuk diberi hak mengawinkan anaknya yang bikir/perawan dengan tidak izin si anak lebih dahulu, dengan orang yang dipandang baik. Terkecuali anak yang saib (bukan perawan lagi) tidak dikawinkan melainkan dengan. izinnya lebih (dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak mengawinkan mempelainya melainkan sesudah mendapat izin dari mempelai itu-sendiri

Sabda Rasulullah Saw:

" يحق للمرأة أن أرملته "

Maksudnya:Telah berkata Rasulullah Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya". (Riwayat Daruquthni).

Sabda Rasulullah Saw:

منها ، انه . معها 6 الحديث 9 . "

Maksudnya:Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. telah nikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun". Sepakat ahli hadis.

¹⁴ Prof. Abdul rahman I. DOI, ph.D, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (1998) h. 42-

Sabda Rasulullah s.a.w. yang maksudnya:

يشكو أنه كان متزوجا للسيدة العذراء قبل والدها انها لا . . .

Maksudnya: Dari Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa ia telah dikawinkan oleh bapanya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi s.a.w. memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni.

Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali yaitu :¹⁵

1. Wali mujbir
2. Wali Nasab
3. Wali hakim

1. Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)

Wali nikah yang mempunyai hak anak gadisnya menikah dengan laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kebolehan wali mijbir ini dengan syarat sebagai berikut :

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al- Jaziry, *al-Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, (t.t). h. 206-217).

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.
3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.¹⁶

2. Wali Nasab

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempuan. Wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunan garis laki-laki.

3. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri) wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi.¹⁷

Adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.

¹⁶ Drs. Sudarsono, SH, *Bineka Cipta, Jakarta*, h. 202

¹⁷ *Ibid*, h. 204

2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam.
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
8. Wali aqrab ada tapi menolak untuk mengawinkannya (*adlal*).
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya atau ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.¹⁸

Akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi'i hakim tidak berhal mengawinkan anak gadis yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi aqad tersebut tidak mengikat, dan sudah si anak sudah baligh dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi'i dan Imamiyah sebab dalam keadaan seperti itu sang hakim telah melakukan *aqad fudhuli* (tanpa izin).

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang *sekufu* serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.

¹⁸ Drs. Ahmad Rofiq, MA, PT. (*Radja Grafindo Persada*, Jakarta, 1997) h. 88-89

Seluruh Mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah : baligh, Islam dan laki-laki. Adapun '*adalah*' adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hambali mensyaratkan '*adalah*' bagi setiap wali baik wali hakim maupun wali dekat.¹⁹

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak *ijbar*.²⁰

Imam Abu Hanifah membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.

¹⁹ M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit : PT. Lentera Basritama, t.t). 349

²⁰ Imam Suyuthi, *Nuzhatul Muta`ammil wa Mursyidul Muta`ahhil fi al- Khathib wa al-Mutazawwij*, (Beirut : Dar Amwaj, 1989), h. 17

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah diantaranya *Al-Baqarah: 230,232,240*. serta mengartikan “*al-aima*” adalah “wanita yang tidak mempunyai suami” baik gadis maupun janda. Ditambah dengan hadits tentang kasus al-khansa’a yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui oleh Nabi.

Menurut Abu Hanifah persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam Syafi’i adalah *Al-Baqarah:232, An-Nisa: 25,34*. serta beberapa hadits nabi.²¹

Menurut Syafi’i bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan “janda lebih berhak kepada dirinya”. Sehingga menurut Syafi’i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun

²¹ Asy-Syafi’i, Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah* (ed. Ahmad Syakir) Kairo:Mathba’ah al-Halabi, t.t.

perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kasus al-khansa'a.

Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus.²²

Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.²³

Dari kajian para fuqaha, dapat disimpulkan bahwa hanya Hanafiyah yang membolehkan wanita dewasa menikahkan diri sendiri, sedangkan tiga madzhab besar lainnya yakni Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarangnya. Dan hanya Hanafiyah yang mengharuskan adanya persetujuan mempelai secara mutlak, sedangkan lainnya mengakui adanya hak ijbar wali dengan variasi pandangan masing-masing.

²² Ibn-Qudamah, Abu-Muhammad Abd- Allah. *Al-mughni*. Vol. 1. (Beirut: *Dar al-kitab al-arabi*. 1983), h.70.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), h. 103

Jika kita cermati, penetapan hak ijbar didasarkan pada nash implicit (mafhum Mukhalafah) dari hadits “janda lebih berhak pada dirinya daripada wali”, sehingga paham kebalikannya adalah terhadap gadis maka wali yang lebih berhak. Padahal ada teks yang menunjukkan secara tegas tentang perlunya persetujuan dari mempelai, yakni pada kelanjutan hadits tersebut, “al-bikru yusta’dzanu”.

Dalam buku *Hukum perkawinan 1*, karya Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Disebutkan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik. Sehingga wali yang mempunyai pengalaman di butuhkan untuk memberikan saran-saran dan pemikiran berdasarkan pengalamannya, sementara wanita yang akan menjalani kehidupan rumah tangga diberikan kebebasan berdasarkan pada saran-saran dan pertimbangan wali.²⁴

Alangkah lebih baik dalam pembahasan tentang wali ini jika diulas hikmah-hikmah yang dikandung serta akibat - akibat yang terjadi jika wali memiliki hak ijbar atas mempelai dan jika gadis dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali. Serta membenturkannya dengan kondisi daerah yang bersangkutan saat ini.

Seandainya gadis dewasa diberikan hak secara mutlak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali, bisa dimungkinkan terjadinya perkawinan yang hanya sebagai permainan belaka. Atau jika

²⁴ Khoiruddin Nasution, , *Hukum Perkawinan Islam*, CV Gutama Jaya, Jakarta, 2002), h. 65

wali diberikan hak *ijbar*, maka bisa jadi ia menggunakan anaknya untuk mendapatkan kekayaan dengan menikahkannya dengan orang yang kaya.

Para Ahli Fiqih telah menetapkan beberapa *syarat menjadi wali nikah untuk perempuan*. ada beberapa syarat yang telah disepakati oleh Fuqoha' dan sebagian masih diperselisihkan. Adapun 4 syarat yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki

Maka tidaklah sah jika perempuan menikahkan perempuan yang lain karena Rasulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- bersabda :

لا تزوج المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأةُ نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya : "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan tidaklah perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majjah dan Ad-Daruquthni)²⁵

Ibnu Qudamah mengatakan dalam al-Mughni : (jenis kelamin) laki-laki adalah syarat menjadi wali berdasarkan kesepakatan semua ulama.²⁶

²⁵ Al-Darqutniy, Abu'l-Hasan `Ali ibn `Umar al-Baghdadiy (died in AH 385). *Sunan al-Darqutniy*. 4 volumes. Revised by Sayyid `Abdullah Hashim al-Yamaniy al-Madaniy. Beirut: Dar al-Ma`rifah, AH 1386.

²⁶ Ibn Qudamah al-Hanbaliy, Abu-Muhammad `Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah (died in AH 620). *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybaniy*. 10 volumes. Beirut: Dar al-Fikr Publishers, 1st Edition, AH 1405.

2. Islam

Syarat ini harus ada dalam diri seorang yang menjadi wali perempuan untuk menikahkannya. karena orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi muslim, walaupun itu ayah kandungnya. Allah berfirman :²⁷

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman." (QS An-Nisa : 141)

Ibnu Al-Mundzir berkata dalam al-Ijma' : Ulama sepakat bahwa seorang kafir tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya yang muslimah.

3. Baligh

Tidaklah sah akad nikah yang mana anak kecil (belum baligh) yang menjadi wali karena ketidak mampuannya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya adalah Ats-Tsaury, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, Abu Tsaur, dan salah satu riwayat dari Ahmad. dan dalam riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa jika anak telah berumur 10 tahun maka dia bisa menikahkan, menikah dan mentalak. dan perkataan yang pertama (tidak sah anak kecil menjadi wali) adalah perkataan yang lebih kuat dan digunakan dalam fatwa-fatwa di madzhab hambali. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni : Anak kecil membutuhkan seorang wali (dalam berbagai hal) karena dia

²⁷ Q.S. An-Nisa : 141, Departemen Agama R.I

belum mumpuni. maka tidaklah bisa dia menjadi wali bagi orang lain.

4. Akal

Tidaklah sah akad nikah yang dilakukan oleh orang gila, yang hilang akalunya, dan orang yang mabuk. karena orang yang hilang akalunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia dapat memberikan manfaat bagi orang lain?! dan termasuk dalam orang yang hilang akalunya adalah, akan kecil yang belum *mumayyiz* dan orang tua yang telah lemah akal/ingatannya (pikun).

C. Kawin Liar Dalam Pandangan Perundangan

1. Dari segi perundangan

Dari segi perundangan pula, Akta Undang-Undang Keluarga²⁸ Islam Wilayah Persekutuan 1984 perlu dirujuk. Seksyen 23(1) telah memperuntukkan bahawa seorang laki-laki yang mahu berpoligami perlu memohon keizinan daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika dia berkahwin sebelum atau setelah gagal mendapatkan kebenaran tersebut maka tindakannya adalah salah di sisi undang-undang. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 123. Jika disabit kesalahan, beliau

²⁸ Siti Zubaidah Ismail. *Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di Malaysia: satu analisis*. Jurnal Syariah. Jil. 16 (Keluaran Khas), (Universitas Malaya, 2008), h. 86

boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali.

Salah-satu efek perkawinan yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah adalah perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Tujuan pendaftaran ini bukan hanya satu formaliti bagi mendapatkan sijil nikah. Ia merupakan satu rekod yang mensahihkan bahawa perkawinan tersebut bukan sahaja menurut undang-undang negeri tetapi juga telah menepati hukum syarak.²⁹

Perkawinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Ia bermaksud bahwa puan tidak akan mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah kelak. Puan tidak akan dibenarkan menuntut hak ke atas nafkah, hak penjagaan atau nafkah anak, dan lain-lain tuntutan sehingga perkawinan didaftarkan. Proses pendaftaran bukanlah satu perkara yang mudah terutama sekali sekiranya ia dilakukan di luar negeri, tanpa saksi yang dikenali atau suami enggan bekerjasama.

Sekiranya saudari mempunyai anak kelak tanpa sijil nikah yang sah ia mungkin akan menyukarkan proses pendaftaran kelahiran dan lain-lain proses yang memerlukan kesahihan bahawa suami adalah bapa.

Perkawinan poligami di luar negara atau negeri bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap ringan. Saudari tentu telah mendengar mengenai perkawinan sindiket yang dijalankan oleh kadi yang tidak bertauliah dan

²⁹ Zulkifli Hasan, *Undang-undang jenayah syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya*. (Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum USIM, 2007), h.37

menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah. Perkara ini bukan sahaja kerana pasangan tidak berhati-hati tetapi juga kerana berlaku satu penipuan. Perkawinan adalah satu tanggungjawab dan ia haruslah dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pasangan. Apalagi di dalam perkawinan poligami kerana ada istri dan keluarga lain yang akan turut terlibat.

Lazimnya masalah berlaku apabila sesuatu perkawinan yang berlangsung tidak menepati apa yang digariskan oleh syariat yang akhirnya membawa kepada perceraian.

Dalam keadaan tertentu dapat didakwa di Mahkamah Syariah kerana menikah dengan tidak mengikut saluran undang-undang. Tanpa kita sedari atau tidak, wujud kesalahan berkaitan perkawinan yang sengaja dilakukan oleh masyarakat masa kini sehingga ada perkawinan yang dijalankan memberi kesan kepada kesahan sesuatu perkawinan sekiranya pernikahan itu tidak memenuhi rukun serta syarat digariskan hukum syarak.

Sebagai contoh seseorang yang berkawin lagi satu tanpa mendapat kebenaran mahkamah serta seseorang yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan bahawa syarat rukun pernikahan sudah dipenuhi sedangkan wujud undang-undang yang mengatur peraturan tertentu yang mereka pandang remeh.³⁰

³⁰ *Ibid.* Zulkifli Hasan, h.43

Hakikatnya di dalam akta maupun Enakmen Undang-Undang Keluarga setiap negeri, ada memperuntukkan kesalahan mengenai perkawinan serta menetapkan hukuman tertentu bagi kesalahan tertentu.

Sekiranya kita merujuk kepada peruntukan undang-undang sebagai misalnya, Seksyen 40 (1) (a) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan sekiranya seseorang itu mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkawinan tanpa ada kebenaran berkawin.

Keadaan ini berlaku terhadap seseorang itu sama ada imam jurunikah tanpa mengira imam itu mempunyai tauliah atau tidak atau bapa dari wanita yang hendak dikawinkan atau sesiapa saja yang menjalankan sesuatu pernikahan atau menjalankan upacara perkawinan. Perbuatan itu adalah tanpa kebenaran undang-undang dan menjadi kesalahan yang perlu dihukum denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.³¹

Nikah liar dan prosedur nikah di luar negara harus mengambil kira keperluan untuk mendaftarkan perkawinan itu bila kembali ke Malaysia selepas *nikah di Thailand*.

³¹ Abdul Halim El-Muhammady, *Undang-undang jenayah dalam Islam dan enakmen negeri-negeri*. (Selangor : Wadah Niaga Sdn.Bhd. 1998), h. 53

Oleh itu, nikah Siam bukan hanya akad nikah di Thailand dan pengeluaran sijil, tetapi juga melibatkan pengesahan sijil oleh Majlis Agama Islam di Wilayah berkenaan, dan seterusnya mendapat surat pengesahan dari Konsulat Malaysia bagi Selatan Thai. Surat pengesahan perkawinan dari Konsulat di Selatan Thai ini diperlukan untuk pendaftaran perkawinan nanti.

Nikah liar, satu istilah yang biasa digunakan masyarakat Islam merujuk kepada pasangan yang bernikah secara senyap di sempadan negara atau melalui sindiket di dalam negara sendiri. Dewasa ini, fenomena itu nampaknya semakin menjadi-jadi.

Istilah ‘nikah liar’ bukannya bermaksud menikah sambil berlari tetapi ia merujuk kepada pernikahan yang dijalani oleh pasangan dalam keadaan mereka melarikan diri daripada prosedur biasa Mahkamah Syariah. Biasanya mereka lari ke negara jiran untuk bernikah secara mudah.

Perbuatan nikah liar³² dikira sebagai kesalahan di dalam dua keadaan. Keadaan pertama adalah sekiranya akad nikah itu dijalankan di hadapan imam jurunikah terbabit tanpa kehadiran dua saksi yang boleh dipercayai dan dua saksi itu hendaklah tidak termasuk orang yang mengakadnikah itu.

Ini bermakna sesuatu perkawinan itu mesti dihadiri dua saksi yang boleh dipercayai dan sesuatu pernikahan itu tidak boleh dijalankan tanpa

³² *Ibid*

kehadiran dua saksi kerana dua saksi adalah rukun kepada perkawinan selain daripada suami istri, wali serta ijab kabul.

Keadaan kedua pula adalah apabila akad nikah itu dijalankan tanpa kebenaran jika perkawinan itu membabitkan seorang perempuan yang bermastautin di luar Negeri Kelantan. Persoalannya apakah yang dimasukkan dengan tanpa kebenaran itu?

Dimaksudkan dengan tanpa kebenaran itu adalah apabila sesuatu perkawinan dijalankan tanpa mendapat kebenaran Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (Pendaftar).³³ Dimaksudkan dengan kebenaran adalah di dalam keadaan pendaftar berpuas hati bahawa sahnya perkawinan yang dicadangkan itu dari segi rukunnya serta di dalam keadaan seseorang laki-laki itu sudah berkawin bahawa suatu kebenaran mahkamah untuk laki-laki itu berpoligami, diberikan.

Sesuatu akad nikah dikira sebagai tidak mendapat kebenaran pendaftar sekiranya sesuatu kebenaran tidak diberikan jika pendaftar tidak berpuas hati dengan keadaan di atas. Selain itu juga suatu perkawinan tidak dikira sebagai mendapat kebenaran di dalam keadaan antaranya jika suatu perkawinan yang dicadangkan itu membabitkan pasangan bawah umur minimum untuk perkawinan.

Di bawah umur minimum ini bagi laki-laki adalah kurang daripada 18 tahun dan bagi perempuan kurang 16 tahun. Di dalam keadaan ini kebenaran

³³ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 76

hakim syarie diperlukan dan tanpa kebenaran hakim syarie ini, tiada kebenaran untuk berkawin boleh diberikan. Rujukan kepada dan tindakan oleh hakim syarie ini juga diperlukan di dalam keadaan jika pihak perempuan tidak mempunyai wali daripada nasab mengikut hukum syarak.

Setiap perkawinan ditetapkan syarat dan undang-undang³⁴ yang perlu dipatuhi agar perkawinan itu sah dari sudut hukum syarak dan undang-undang. Oleh yang demikian, sesuatu perkawinan tidak boleh berlawanan dengan Bahagian II ini yang menggariskan panduan bagi tujuan perkawinan iaitu orang yang boleh mengakadnikahkan perkawinan, umur minimum untuk perkawinan, pertalian yang melarang perkawinan, orang dari agama lain, perkawinan tak sah, perkawinan seseorang perempuan dan lain-lain lagi.

Kini ramai pasangan mengambil jalan mudah dengan tidak ambil peduli akan kesan melakukan kesalahan berkaitan perkawinan ini. Kita bukan saja menginginkan perkawinan yang bertepatan pada hukum syarak semata-mata tetapi juga perkawinan mengikut undang-undang negara ini agar segala urusan akan dipermudahkan. Undang-undang perlu bagi mengatur hidup manusia agar kita tidak membuat suatu perkara yang boleh memberi kesan buruk kepada orang lain.

Sekiranya pengantin perempuan tidak mendapat persetujuan ayahnya untuk menikah, seharusnya dia tidak melanggar kehendak ayahnya. Hal ini berikutan daripada status seorang ayah yang merupakan seorang wali mujbir

³⁴ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 79

yang berkuasa untuk mengahwinkan anak perempuannya (jika anak dara) ataupun melarangnya berkawin dengan mana-mana laki-laki yang difikirkannya tidak bersesuaian. Jika anak tersebut bertegas untuk menikah, maka pernikahannya adalah tidak sah (kerana tidak mendapat keizinan walinya).

Walaupun bagaimanapun, anak perempuan tersebut boleh membuat aduan kepada Mahkamah Syariah yang berdekatan mengenai masalah tersebut. Pihak mahkamah akan membuat keputusan mengenai permohonan anak perempuan tersebut selepas dilakukan siasatan ke atas ayahnya kenapa dan mengapa beliau tidak mengizinkan anaknya berkawin dengan laki-laki tersebut dan membuat pertimbangan mengenainya.

Bidang kuasa Peruntukan sudah pun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam³⁵ yang memperuntukkan bahwa, “Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada – (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syarak; atau (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali Raja mengikut

³⁵ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 84

Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi”.

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.

Dalam keadaan ini, sekiranya perkahwinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

Wajar untuk diketahui bahwa, pasangan yang hendak berkawin tetapi kehendak mereka tidak direstui oleh orang tua, dalam keadaan mereka menganggap bahwa perhubungan tersebut tidak ada cacat celanya dari segi Syarak dan adat, undang-undang sebenarnya memberikan ruang yang selesa kepada mereka untuk meneruskan hasrat mulia tersebut.³⁶

Walaupun pada dasarnya doa restu orang tua itu sangat penting dan menjadi batu asas sesebuah perkawinan yang hendak didirikan, akan tetapi

³⁶ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 79

garis panduan yang telah diberikan agama itu sebenarnya lebih mengatasi pertimbangan dan kata hati sesiapa. Melalui pandangan para ulama, soal kufu atau sifat padan pasangan itu sepatutnya menjadi neraca untuk memilih pasangan. Pandangan para ulama bersifat sangat bernas untuk dijadikan sebagai panduan.

Seandainya hubungan tidak direstui disebabkan hal-hal yang remeh-temeh dan ia dibangkitkan oleh ahli keluarga, kawin lari bukanlah penyelesaian yang bijak kerana Mahkamah Syariah bersedia untuk mendengar permohonan bagi kes seumpama ini.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Seksyen 13(b) sebelum ini, sekiranya wali enggan memberikan persetujuan tanpa alasan yang sempurna, Mahkamah akan membenarkan perkawinan yang diniatkan itu untuk diteruskan dengan menggunakan wali hakim. Inilah jalan penyelesaian yang sebenar, iaitu membawa masalah ke muka pengadilan. Di sini tidak timbul soal menjadi anak derhaka atau membelakangi orang tua kerana undang-undang mengatasi semua orang dan setiap orang tertakluk kepada undang-undang. Tanpa mengira siapa pun seseorang itu, ia perlu mematuhi undang-undang dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah.³⁷

Penyelesaian perlu dibuat bagi mengatasi masalah yang tidak kunjung surut ini dan salah satu jalan penyelesaiannya ini adalah dengan menjalankan

³⁷ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 80

kajian imperikal mengenai hukum 'kawin lari'.³⁸ Kajian ini kemudian seharusnya dipanjangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dengan melihat semula hukum yang telah dikeluarkan pada Fatwa Kebangsaan Malaysia Kali ke-52, iaitu pada tahun 2002 yang lalu.

³⁸ _____ (2004). *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia: Sebelum Dan Menjelang Merdeka (The Administration Of Islamic Law In Malaysia: Before And The Coming Of Independence)*. Kuala Lumpur: Utusan Publications And Distributors.

BAB IV

NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Nikah liar di Rantau Panjang

Isu pernikahan di luar negara semakin hangat pada awal tahun 2003 ketika Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan akan memudahkan laki-laki berpoligami termasuk melonggarkan syarat seperti tidak memerlukan izin istri pertama bagi menyekat laki-laki di negara ini pergi ke Thailand untuk bernikah.¹ Gambaran yang diberikan dari laporan akhbar seolah-olah setiap pasangan yang bernikah di luar Negara (khususnya Thailand) adalah pernikahan poligami atau nikah liar, sedangkan kemungkinan banyak lagi sebab-sebab lain yang mendorong pasangan tersebut bernikah di luar negara.

Sejumlah pasangan yang melangsungkan akad nikah di Rantau Panjang, melakukan perkawinan dengan cara yang boleh disifatkan sebagai 'mistri'. Mistri karena terkadang pernikahan mereka tidak diketahui oleh keluarga terdekat, jiran tetangga dan tidak ada dokumen yang sah yang menunjukkan pernikahan tersebut. Ini mungkin disebabkan pernikahan tersebut dilakukan di luar negara tanpa pengetahuan pihak berkuasa agama atau dinikahkan secara sindiket atau

¹*Berita Harian*, 7 Januari 2003.

pernikahan yang sengaja disembunyikan bagi satu tujuan dan kepentingan mereka.

Nikah di luar negara dibenarkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 tetapi dimestikan mendapat izin pihak berkuasa agama terlebih dahulu. Sekiranya dilakukan tanpa izin ia boleh dituduh telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 39 enakmen di atas dan dapat dihukum dengan denda tidak melebihi RM 1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.²

Bahkan jika melibatkan poligami, pasangan tersebut boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 122 enakmen yang sama.

Nikah liar dalam kenyataannya banyak terjadi di Thailand yang dilakukan oleh pelbagai masyarakat terutama dari Malaysia khususnya Kelantan kerana daerahnya bersempadan (perbatasan) dengan Thailand. Dalam tiga tahun terakhir data menunjukkan bahwa nikah liar di Thailand yang dilakukan oleh masyarakat Kelantan semakin banyak. Hal ini dapat dibuktikan dari data isbat nikah yang ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Pasir Mas. Sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

²Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin, *Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM, 2002), h. 237

Tabel 2

Jumlah permohonan '*Ishat Nikah*' di Mahkamah Syariah Pasir Mas,
Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

| Bil | Bulan | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 1 | Januari | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Mac | 1 | 1 | 5 |
| 4 | April | 1 | 10 | 4 |
| 5 | Mei | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Jun | 3 | 9 | 7 |
| 7 | Julai | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Ogos | 3 | 5 | 5 |
| 9 | September | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Oktober | 1 | 0 | 7 |
| 11 | November | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Disember | 0 | 8 | 5 |
| | Jumlah | 16 | 39 | 54 |

Sumber : Data di Mahkamah Syariah Pasir Mas 2010

Tabel 2 di atas menunjukkan jumlah permohonan mendaftar semula pernikahan di Mahkamah Syariah Pasir Mas setelah pasangan yang bernikah di Thailand nikah liar atau tanpa kebenaran. Jumlah nikah liar sentiasa meningkat bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Beberapa faktor yang mendorong pasangan menikah tanpa kebenaran di luar negara.

Kebanyakan kasus pernikahan yang menyalahi aturan di luar negara dikaitkan dengan alasan masalah keluarga. Ini merangkumi masalah ketidakizinan keluarga sendiri seperti wali tidak bersetuju dengan calon suami, wali sengaja enggan menikahkan dengan pelbagai alasan sendiri, orang tua atau ahli keluarga tidak merestui pernikahan tersebut disebabkan masih dalam masa pendidikan, tidak sedarjat atau pihak keluarga telah menentukan calon yang lain sebagai pasangannya. Kesan ketidakizinan keluarga ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna atau mengikut proses yang biasa dilakukan. Akibatnya, pasangan tersebut mengambil jalan lain iaitu menikah di luar negara untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Terdapat banyak kasus yang terjadi di Thailand yang melakukan nikah liar, dan mereka telah mendaftarkan di Mahkamah Syariah Pasir Mas untuk mengisbatkan nikahnya diantaranya adalah:

Kasus pertama, Kasus bil : *J/MRIR/ 109/02* di antara pemohon pertama Fared bin Maslan dan pemohon kedua Norazian binti Sapaah. Pemohon-pemohon telah menikah di Wilayah Yala, Thailand pada 17 Juli 2008 dengan menggunakan wali hakim. Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan yang mendorong pasangan menikah di Wilayah Yala Thailand ialah keluarga perempuan telah memutuskan pertunangan setelah mengetahui bahwa pihak laki-laki adalah seorang penagih dadah (terlibat narkoba).³ Memandangkan pihak perempuan telah tinggal serumah dengan pihak laki-laki maka perkara ini mendorong pasangan bertekad untuk menikah di luar negara tanpa pengetahuan

³Data Mahkamah Syariah Pasir Mas, Unit Penerbitan, (Pasir Mas, 2010) *J/MRIR/ 109/02*

ahli keluarga masing-masing. Setelah menikah barulah mereka mendaftarkan (mengisbatkan) nikahnya di Mahkamah Syariah Pasir Mas.

Kasus kedua, Kasus Mal bil: 01 003-010-387/03 di antara pemohon pertama Suhaimi bin Md. Said dan pasangannya pemohon kedua iaitu Sharifah Ainon bt Syed Abbas. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkla, Thailand pada 4/10/2009 dengan menggunakan wali hakim. Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan pasangan menikah di Wilayah Songkla, Thailand ialah karena kedua ibu bapa pihak perempuan tidak setuju dengan pilihan anaknya yang bukan dari keturunan ' Syed ' seperti mereka dan seterusnya wali beliau enggan mewalikan. Pasangan juga menyatakan bahwa mereka pernah membuat permohonan menikah di Pejabat Agama Temerloh Pahang namun permohonan mereka tidak di layan.⁴

Sejumlah pasangan yang menikah di luar negara adalah disebabkan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami baik pihak perempuan dalam pernikahan itu menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Oleh karena permohonan poligami di Malaysia pada umumnya dimestikan mendapat izin Mahkamah Syariah, terdapat pasangan yang mengambil jalan mudah dengan melakukan pernikahan mereka di luar negeri, alasan yang diberikan termasuklah mendapat tentangan istri yang telah ada, tidak mahu istri pertama mengetahui atau mengelak dari diketahui pihak-pihak tertentu seperti majikan, kaum keluarga atau pihak berkuasa agama tempatan.

⁴Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01 003-010-387/03

Di antara kasus nikah liar yang disebabkan oleh poligami seperti contoh kasus dibawah ini :

Contoh pertama, Kasus Mal bil: 01003-010-390103/05 di antara pemohon pertama Mohd Shah bin Md Akib dan pemohon kedua seorang warganegara Indonesia selaku pasangannya iaitu Maikalsum bt. Abdul Latif. Ini adalah pernikahan ketiga bagi Mohd Shah bin Md Akib yang telah mempunyai dua orang istri sedia ada yang kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah bernikah di Wilayah Narathiwat, Thailand dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki yang mendorong beliau bertekad untuk bernikah di Wilayah Narathiwat, Thailand ialah karena terlalu banyak syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk menikah di Malaysia dengan warganegara asing ditambah lagi dengan prosedur Mahkamah yang perlu dipatuhi karena beliau berpoligami, Beliau juga menyatakan bahwa beliau sukar mendapatkan izin dari pejabat tempat beliau bertugas.⁵

Contoh kedua, Kasus Mal bil: 01003-010-274/03 di antara pemohon pertama Musannif bin Abdullah dengan pasangannya selaku pemohon kedua Nor Hayati binti Othman. Kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah di Patani, Thailand pada 28 Juni 2008 dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pasangan menikah di Wilayah Patani, Thailand ialah prosedur

⁵Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2010 bil: 01003-010-390103/05

permohonan poligami di negeri Kelantan ini adalah sukar. Beliau juga menyatakan bahwa hubungan istri pertama dengan istri kedua ini adalah baik.⁶

Contoh ketiga ialah Kes Mal bil: 01003-010-333/03 di antara pemohon pertama Syed Othman bin Syed Abdullah dengan pasangannya selaku pemohon kedua ialah Ema Malisa binti Bogi. Kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkhla, Thailand pada 3 Januari 2008 dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki ialah karena istri pertamanya tidak setuju dan prosedur permohonan poligami adalah sukar sedangkan beliau amat memerlukan zuriat karena sehingga kini beliau belum dikurniakan zuriat.⁷

Peraturan Pernikahan di negeri Kelantan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 yang antara lain bertujuan menyusun atur dan mengawal isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. Bagaimanapun, terdapat segelintir rakyat negeri Johor yang beranggapan peruntukkan undang-undang yang telah ditetapkan adalah sangat menyusahkan dan membebankan. Umpamanya peraturan yang mensyaratkan setiap pasangan yang hendak bernikah membeli borang, mengisi dan melengkapkannya, menghadiri kursus pra perkawinan, mendapatkan surat akuan bujang, surat akuan mastautin, surat pengesahan HIV, surat pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara bagi pemegang Penduduk Tetap, menghadiri temu bual dan sebagainya yang memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan wang.

⁶Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-274/03

⁷Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-333/03

Malah bagi kasus-kasus tertentu ia akan dirujuk ke Mahkamah Syariah dan kelulusan seperti kes wali enggan, permohonan poligami dan kasus yang bersangkutan dengan perceraian. Bagi sesetengah pasangan, peraturan-peraturan ini sangat membebankan dan menjadi penghalang utama hasrat mereka untuk menjadi pasangan suami istri. Sebagai langkah alternatif, mereka keluar Malaysia dan menikah di sana dengan anggapan proses pernikahan di sesetengah negara luar itu lebih mudah untuk dilakukan berbanding di dalam negara sendiri.

Contoh kasus pula ialah Kasus Mal bil : 01003-0 10-330/03 di antara pemohon pertama Daud bin Omar dan pemohon kedua selaku pasangannya Fatimah binti Ismail. Kedua-duanya adalah warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah pada 26 Januari 2010 di Wilayah Narathiwat, Thailand dengan menggunakan wali abang kandung. Alasan suami menikah di Wilayah Narathiwat, Thailand karena beliau menghadapi masalah tiada surat pengesahan cerai dengan istri pertamanya kerana beliau tidak pernah ke Pejabat Agama Daerah untuk mendaftarkan perceraian beliau. Oleh itu untuk mengelakkan proses Mahkamah yang perlu beliau lalui untuk mendapatkan sijil cerai beliau mengambil jalan mudah dengan menikah di Thailand.⁸

Menurut seorang Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, khidmat nikah, kawin, poligami, wali hakim dalam masa 1 jam sahaja yang dibuat di Pejabat Majlis Agama Wilayah Narathiwat. Kawasan ini aman dan tenteram tanpa sebarang perintah darurat. Tiada ancaman banjir seperti di wilayah- wilayah lain.

⁸Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

Penduduk di sini juga masih menggunakan bahasa Melayu dan Ringgit Malaysia dalam urusan seharian.⁹

Wilayah Narathiwat mempunyai Pejabat Agama yang terletak hanya 1 jam sahaja perjalanan dari Kompleks Imigresen Malaysia. Jangan percaya dengan kenyataan dari pihak tidak bertanggungjawab (sendiket ambil upah mahal hingga ke RM3,000) kerana semua nikah yang dibuat dalam Pejabat Agama Narathiwat adalah sah dan diiktiraf. Perkara ini telah disahkan oleh Pejabat Agama di Malaysia dan di Thailand.

Masyarakat hendaklah menghindari menikah di tempat yang tidak rasmi seperti rumah kadi, masjid dan kedai makan kerana pasangan berisiko ditipu oleh Sindiket Nikah (calo nikah) yang tidak diiktiraf. Contohnya Majlis Agama Narathiwat telah mengeluarkan pekeliling menyatakan nikah di wilayah tersebut hanya boleh dibuat dalam Pejabat Agama, tidak boleh ditempat lain kerana terlalu banyak penipuan. Tidak sah nikah jika akad dibuat di Malaysia oleh kadi dari Thailand.

Menurut Sulaiman Yahasok¹⁰ beliau telah membawa lebih dari 100 pasangan tanpa sebarang masalah untuk mendaftarkan pernikahan di Malaysia dengan kadar upah yang lebih rendah yaitu (RM 1500- RM 2000). Kadi Wilayah Narathiwat terdiri daripada tokoh terkenal seperti Doktor, Pengetua Sekolah, Tuan Guru, Dato, Senator dan Pegawai Majlis Agama akan menjadi saksi nikah. Sijil Nikah akan terus diserahkan selepas akad.

⁸Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

¹⁰ Sulaiman Yahasok (Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 28 Oktober 2011

Kendaraan disediakan dari Rantau Panjang ke Narathiwat, beliau sendiri menguruskan segala urusan hingga selesai, bukannya melalui pihak ketiga atau agen.

Menurutnya lagi adalah menjadi satu kebiasaan di Rantau Panjang menjadi tempat pasangan yang mau nikah liar karena pernikahan mengikut jalan biasa mempunyai berbagai masalah, lalu pasangan yang ingin bernikah menggunakan Rantau Panjang dengan mencari agen sebegitu sebagai tempat nikah liar.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah liar yang sudah banyak terjadi di dalam masyarakat khususnya di negeri sempadan, dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3

Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 11 | 55 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 9 | 45 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 3 menunjukkan responden mengatakan tidaksetuju sebanyak 11(55%) dan setuju 9(45%). Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju bahwa nikah liar adalah bukan satu trend.Nikah liar sememangnya banyak yang didaftarkan di pejabat qadhi daerah Pasir Mas apabila selesai urusan pernikahan di Thailand karena pasangan yang bernikah akan mencari orang atau pihak tertentu untuk menyelesaikan urusan daftar nikahnya di Malaysia.¹¹

Nikah Liar yang dilakukan di pejabat agama setempat dan ada pula yang tidak dilakukan di Pejabat agama yang lebih terkenal dengan istilah lain yaitu Nikah Sendiket. Apakah masyarakat menyetujui bentuk pernikahan tersebut :

Tabel 4

Bagaimana pandangan bapa/ibu tentang adanya nikah liar yang mempunyai sindiket (calo)

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 16 | 80 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 4 | 20 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹¹ Supian Sori (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dari tabel 4 di atas didapati 16(80%) tidak setuju dan 4(20%) setuju. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden tidak bersetuju tentang nikah liar yang mempunyai sendiket tertentu. Artinya nikah yang dilakukan secara sirry, yang sesuai dengan hokum fikah tetapi tidak sesuai dengan hokum Negara dan tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang rasmi.

Memang nikah liar ini tidak dapat lari dari sendiket tertentu yang memang mengatur urusan pernikahan supaya mudah dan lancar dari permulaan urusan hingga selesai urusan nikahnya, yaitu dari urusan imigresen hinggalah urusan akad nikah di Thailand dan urusan pendaftaran semula pernikahan di Malaysia.¹²

Dapat dilihat berlakunya nikah liar ini telah menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat, namun telah menimbulkan satu perkara yang boleh menjatuhkan maruah keluarga. Oleh karena banyak kasus kawin liar yang dikendalikan oleh pelbagai sendiket melalui Rantau Panjang justru itu table 3 dibawah ini dapat memperlihatkan bagaimana jawaban daripada masyarakat mengeni isu kawin liar ini yang dianggap menjatuhkan maruah keluarga.

¹²Muhammad Noor Saman (Pegawai Pencegah Penyeludupan, Rantau Panjang, Kelantan)
Wawancara, 29 Oktober 2011

Tabel 5

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nikah liar akan menjatuhkan maruah keluarga.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 10 | 50 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 10 | 50 |
| | JUMLAH | 28 | 100 |

Dari tabel 5 di atas didapati 10(50%) setuju dan 10(50%) sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden memberi pendapat bahwa nikah liar menjatuhkan maruah keluarga.

Selalu berlaku maruah keluarga tercalar karena pernikahann tanpa izin wali bapa ini. Seterusnya banyak kedengaran di mahkamah berlakunya tuntutan seperti fasakh dari pihak keluarga perempuan akibat nikah liar ini.¹³

¹³ Ismail Hasim Mehat (Pegawai Pendaftar Mahkamah Syariah Pasir Mas, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Kasus Mal bil: 01003-010-333/08 Maria dan Hafiz merupakan teman sepejabat. Mereka bercadang untuk bernikah karena sudah lama mengenali antara satu sama lain. Ibubapa Maria tidak bersetuju karena mereka tidak menyukai perangai Hafiz yang tidak baik dalam beragama karena ditakuti ia tidak dapat memimpin anak mereka ke jalan yang soleh. Maria dan Hafiz pula tidak mempunyai latarbelakang pendidikan agama. Tidak seperti Maria, Hafiz tidak pernah mengikuti kelas agama yang dianjurkan oleh jabatan mereka setiap bulan. Bagi Hafiz, seseorang itu tidak dilihat baik daripada zahirnya, tetapi apa yang ada di hati itulah yang utama. Namun, karena terlalu cintakan kekasihnya, Maria setuju bernikah lari di Rantau Panjang yang menyediakan sendiket nikah liar tanpa memeriksa tentang kredibiliti serta kompetensi pihak yang mengakadnikahkan mereka. Hanya dengan RM 1,500, mereka “sah” menjadi suami istri dengan diberikan “sijil nikah” yang meragukan. Setelah beberapa tahun, mereka dikurniakan seorang anak yang kini berumur 3 tahun. Maria berhenti kerja atas alasan ingin memberi tumpuan kepada anak dan keluarga. Namun, Hafiz mula menjalin hubungan intim dengan rakan sepejabatnya yang juga rakan sekerja Maria sebelum ini. Ketika mengetahui perkara tersebut. Maria memarahi Hafiz sehinggakan Hafiz menceraikannya dengan talak tiga sekaligus. Kini Maria bingung karena tiada tempat hendak mengadu lantaran ibu bapa serta saudara maranya telah memulaukannya. Beliau tidak mempunyai wang untuk kehidupan seterusnya. Hafiz pula telah mengahwini teman wanitanya dan kini tinggal jauh daripada rumah Maria. Maria menangis mengenangkan nasibnya yang malang itu. Akhirnya Maria kembali semula kepada orang tuanya.

Kemudian keluarganya mencari Hafiz untuk melunaskan masalah yaitu mereka telah memukul hafiz karena mengabaikan istri serta tidak menepati janji yang dilakukan sebelum kawin untuk menjaga Maria. Hafiz telah cedera teruk dan keluarga hafiz telah membawa kasus ke mahkamah karena kecederaan yang telah dialami oleh Hafiz. Natijahnya dapat dilihat bahwa akibat nikah liar yang dilakukan dan membawa kepada kehancuran rumahtangga yang akhirnya membawa kepada komplik keluarga kedua pihak.

Melihat perkembangan nikah liar yang semakin hari semakin meningkat khususnya, dilihat pada dari tanggapan responden tentang masalah ini, sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 6

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nikah liar yang semakin leluasa di Rantau Panjang.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 12 | 60 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 8 | 40 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 6 menunjukkan 12(60%) tidak setuju dan 8(40%) setuju. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya nikah liar semakin berleluasa walaupun ada juga responden yang memberi respon sebaliknya. Artinya kasus – kasus nikah liar tersebut sekalipun banyak terjadi tetapi tidaklah merajalela dan membahayakan terhadap keamanan dan ketertiban.

Kejadian ini semakin hari bertambah¹⁴ bilangannya akibat peraturan yang ada tidak dikuatkuasa sepenuhnya yaitu menghalang sendiket menguruskan dengan mengenakan syarat yang lebih ketat lagi untuk nikah liar di Thailand oleh pihak berkuasa.¹⁵

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa nikah liar adalah ikutan pernikahan yang melanggar hukum atau undang-undang sivil ,tapi apakah nikah liar tidak sesuai dengan hukum syarak, ini dapat dilihat pada tabel 7:

¹⁴ Abdul Fatah shafie (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

¹⁵ Zulkifli Mahusain (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Apakah masyarakat menyetujui perbuatan ini hanya terdorong melakukannya untuk kepentingan sendiri ini dapat dilihat dari tabel 8 di bawah ini :

Tabel 7

Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 11 | 55 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 9 | 45 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 7 mencatatkan 11(55%) setuju dan 9(45%) sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa responden bersetuju bahwa nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu.

Sememangnya banyak pasangan yang nikah liar ini terdorong mengikut hawa nafsu sehingga membelakangkan orang tua mereka dalam urusan pernikahan ini yang dapat menjatuhkan maruah keluarga bagi pasangan yang menikah liar tersebut.¹⁶

¹⁶ Muji Abbas (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Tindakan pasangan yang melakukan nikah liar ini merupakan bukan satu langkah yang bijak, mereka yang melakukannya adalah orang yang terdesak dan pendek akalnya yang hanya berpandangan pada waktu yang singkat bukan kepada waktu yang panjang. Dari table di bawah ini dapat kita lihat, apakah masyarakat menyetujui tentang nikah liar merupakan bukan jalan bijak.

Tabel 8

Bagaimana pendapat responden tentang nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 8 | 40 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 12 | 60 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Dalam tabel 8 sebanyak 8(40%) setuju dan 12(60%) sangat setuju bahwa isu nikah liar adalah suatu jalan yang tidak begitu bagus dalam masyarakat.

Nikah liar didapati tidak berapa sesuai dalam konteks masyarakat yang berhemah dan ingin menjaga keharmonian masyarakat supaya dipandang tinggi karena peradaban dan tingkahlaku masyarakatnya.¹⁷

Ada golongan yang menyembunyikan pernikahannya yang kali kedua dari pengetahuan istri yang pertama ,ada juga yang bekerja kerajaan yang tidak boleh berpoligami telah mengambil langkah nikah liar ini. Namun adakah masyarakat yang menyetujui nikah liar yang disebabkan poligami ini, sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9

Bagaiman pendapat bapak/ibu tentang nikah liar banyak disebabkan oleh poligami.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 5 | 25 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 11 | 55 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 4 | 20 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁷ Aziz Deraman (Pegawai Kaunseling, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Tabel 9 menunjukan (25%) tidak setuju, 11(55%) setuju dan 4(20%) sangat setuju yaitu kebanyakan nikah liar banyak terjadi disebabkan faktor poligami.

Keadaan kasus yang banyak berlaku adalah disebabkan adanya pasangan yang berpoligami dan berkemampuan pendapatan laki-laki yang mau nikah liar bersama pasangannya.¹⁸

Keengganan wali memberi keizinan untuk bernikah menyebabkan anak si bawah jagaan mereka telah melakukan nikah liar ini, ini dapat dilihat did alam table di bawah ini sejauh manakah masyarakat bersetuju dengan menggunakan wali hakim ini.

Tabel 10

Nikah liar dibenarkan oleh mahkamah dengan menggunakan wali hakim

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | 8 | 40 |
| 4 | SETUJU | 9 | 45 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 3 | 15 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁸ Uwais al Qarni Ahmadullah (Pegawai Renjer, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dalam tabel 10 terdapat 8(40%) tidak pasti, 9(45%) setuju dan 3(15%) sangat setuju terhadap peranan wali hakim yang diguna sebagai nikah liar melalui mahkamah.

Kebanyakan pasangan tidak mengetahui tentang peranan wali selain ibu bapa atau keluarga karena menyerahkan perkara wali kepada sendiket yang mengatur pernikahan tersebut.¹⁹

Nikah liar itu ada yang dilakukan di Thailand sebenar salah dari sisi undang-undang sivil, tetapi hal masih dilakukan karena yang sah di sisi syara'. Apakah masyarakat menyetujui mengenai nikah liar ini salah di sisi undang-undang sivil ini dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 11

Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | - | - |
| 5 | SANGAT SETUJU | 20 | 100 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁹ Mokhtar Ali (Pegawai Pelancongan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dalam tabel 11 terdapat 20(100%) responden yang semuanya bersetuju bahwa nikah liar adalah salah dari segi undang-undang sivil.

Kebanyakan pasangan yang nikah liar bersetuju bahwa nikah liar akan didenda oleh Mahkamah Syariah tetapi tidak menjadi persoalan pokok karena denda mampu dibayar dan matlamat untuk nikah liar tercapai.²⁰

Tabel 12

Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 6 | 30 |
| 3 | TIDAK PASTI | 4 | 20 |
| 4 | SETUJU | 10 | 50 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Dalam tabel 12 terdapat 6(30%) tidak setuju, 4(20%) tidak pasti dan 10(50%) setuju yaitu faktor nikah liar juga disebabkan para wali yang tidak mahu memberi keizinan sebagai wali untuk nikah.

²⁰ Yusof Ahmad (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

B. Faktor penyebabnya terjadi Nikah Liar dalam masyarakat Rantau Panjang, Kelantan

Daripada angket yang dijawab oleh responden dapat dilihat faktor yang menyebabkan berlakunya nikah liar di kalangan masyarakat. Antaranya ialah seperti dorongan hawa nafsu, disebabkan oleh poligami dan faktor bapa yang tidak mahu menjadi wali kepada pernikahan.

Secara umumnya, masyarakat memandang serong (tabu) terhadap pasangan yang nikah liar. Memang benar, banyak yang negatif tentang perbuatan ini. Tapi, ada kalanya, ia dapat menyelesaikan masalah, terutamanya dalam kes wali enggan(adhol).

Apabila ayah enggan mengizinkan anaknya nikah dengan laki-laki pilihannya, anaknya berhak membawa perkara tersebut ke mahkamah. Tetapi, apabila anak membawa perkara seperti ini ke mahkamah, maka hubungan ayah dan anak akan menjadi buruk, membawa kasus begini ke mahkamah bukan penyelesaian yang baik.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa nikah di Siam (Thailand), dalam kasus wali enggan, tidak adil karena menghapuskan hak wali.²¹ Orang yang memberikan pendapat begini tidak pulak memikirkan perasaan dan keinginan anak yang terhalang. Kalau ini yang terjadi anak yang akan menanggung, bukan ayah. Namum begitu, diakui bahwa ada kalanya larangan ayah memang berdasar. Sekalipun tidak sentiasa begitu.

²¹ Ahmad Jailani(Naib Qadhi, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Menurut Pendaftar Nikah Luar Negara Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat, Thailand, Ishak Mohd,²² banyak sebab mengapa ramai pasangan Malaysia bernikah di Narathiwat. Antaranya:

1. Ingin berpoligami. Tidak dinafikan, banyak laki-laki yang ingin berpoligami memilih bernikah di Narathiwat kerana mereka tidak perlu menyertakan keizinan daripada istri pertama.
2. Tentangan keluarga. Ramai juga daripada kalangan pasangan yang bernikah di Narathiwat kerana mendapat halangan daripada keluarga masing-masing. Ada disebabkan kedudukan, fahaman politik kedua-dua keluarga ataupun kerana perbezaan umur.
3. Kelulusan lambat dan kos guaman tinggi. Jika pasangan ingin berkawin di Malaysia (terutama yang ingin berpoligami), mereka terpaksa menunggu agak lama sehingga kelulusan diberikan pejabat agama. Antara kelulusan yang diperlukan supaya pernikahan dapat disegerakan termasuklah keizinan daripada istri tua. Pasangan terpaksa melalui proses perbicaraan guaman yang remeh dan kos guaman yang tinggi. Rata-rata ada antara pasangan yang terpaksa menunggu lebih setahun untuk mendapatkan kelulusan Mahkamah Rendah Syariah. Sekiranya istri tua membuat rayuan, kasus tersebut akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah yg mungkin mengambil masa lebih 2 tahun. Mereka juga terpaksa membelanjakan kos

²²Ishak Mohd , (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 10 September 2011.

guaman yang tinggi, sekurang-kurangnya RM5500 sehingga RM10,000 untuk setiap kasus.

4. Bernikah dengan wanita tempatan. Ramai juga laki-laki Malaysia bernikah dengan wanita tempatan (warga Thailand).
5. Terlanjur dan hamil. Bagi mengelakkan keluarga mendapat tahu si wanita sudah hamil disebabkan terlanjur dengan teman laki-laki, mereka mengambil keputusan berkawin di Narathiwat. Jika si wanita bersalin dalam tempoh 4 bulan usia pernikahan, barulah anak itu dianggap anak luar nikah.
6. Belanja kawin mahal. Tidak dinafikan, belanja perkawinan yang semakin meningkat menyebabkan pasangan memilih untuk bernikah di sempadan. Kata Ishak, mereka tidak menetapkan kadar bayaran mas kawin, terpulang kepada kemampuan si laki-laki. Yang wajib hanya RM300 sebagai yuran proses pernikahan.
7. Sembunyi demi kerjaya. Dikhabarkan juga, ada berkawin di Narathiwat karena si laki-laki anggota polis atau tentera. Mengikut peraturan, anggota polis atau tentera, tidak dibenarkan berpoligami.

Secara umumnya, masyarakat memandang serong(tabu) terhadap pasangan yang nikah lari. Memang benar, banyak yang negatif tentang perbuatan ini. Tapi, ada kalanya dapat menyelesaikan masalah, terutamanya dalam kes wali enggan. Apabila berlaku keadaan terdesak seperti ingin mengelakkan maksiat daripada berlaku berterusan maka diharuskan akad

nikah dilakukan oleh pasangan berkenaan dengan memenuhi syarat seperti wali, saksi dan sebagainya.

C. Dampak Pernikahan Liar Terhadap Keluarga Di Rantau Panjang Kelantan

Kebanyakan pasangan mengambil jalan singkat memilih nikah liar dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, sekiranya mereka sedang mencipta masalah baru yang lebih besar terutama golongan wanita atau si istri sendiri. Beberapa keburukan jelas daripada nikah liar di Rantau Panjang dapat disimpulkan seperti di bawah.²³

a. Merusakkan sistem kekeluargaan yang utuh.

Islam sangat menggalakkan umatnya supaya melakukan proses perkawinan secara teratur dan beradab. Tidak pernah sekali pun kita membaca sirah Rasulullah SAW membenarkan para sahabatnya nikah liar bagi sebarang masalah dihadapi sekalipun, sebaliknya Baginda sendiri yang akan mewakili sahabatnya bagi upacara peminangan dan selanjutnya.

Dalam kasus Marlia Bte Muhammad terhadap suaminya Abdullah Bin Che Ya Kes Mal bil:01003-010-339/03 mengenai ketidakadilan suami terhadapnya dari segi uang nafkah, tuntutan zahir dan kebuntuhan masa bersama sudah mulai beransur dikit. Hubungan mesra antara keduanya mulai renggang ketika si suami mula berpoligami. Manakala hubungan antara bapa dan anak-anak mula renggang

²³ News/BH/Thursday/Agama/201001

kerena perasaan anak sudah terguris ketika mereka sudah ketahuan bahwa bapa mereka sudah punyai istri yang lain selain daipada ibunya. Dalam kasus ini pihak mahkamah telah memutuskan pembahagian waktu antara istri dan hubungan anak-anak kepada bapa mereka seperti dahulu. Akibat dari perkawinan bapa mereka dengan perempuan lain menyebabkan nanak-anak mengalami tekanan perasaan .Lantaran menimbulkan susanana yang tidak aman pada anak-anak untuk meneruskan persekolahan kerana kasus ini menjadi bahan sindiran pada mereka di sekolah.

b. Menghilangkan hak wali.

Wali adalah rukun nikah menurut kebanyakan ulama. Dalam masyarakat . Hak wali dalam menjaga amanahnya amat penting demi menjaga kerukunan institusi rumahtangga, kasih sayang wali terhadap anak dalam memelihara keturunan yang baik di mana hak anaknya dijagai dan terpelihara nasabnya. Tidak semudah itu pihak lelaki ingin melakukan nikah liar terhadap anaknya tanpa jaminan terhadap status perkawinan tersebut. Pihak wali berhak memohon kepada Mahkamah Syariah untuk perintah mufarakah terhadap perkawinan yang dilakukan.

Dalam kasus Azizah bte Mat lawan Mat bin Salleh (1976, Jld. II, I JH)²⁴ mengenai wali enggan di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Yang Arif Kadhi

²⁴ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-339/03

Mahmood bin Lebai Man (pada masa itu) memutuskan, perempuan itu berhak mendapat wali Raja atau hakim untuk berkawin dengan Mansor bin Isa dengan mas kawin dan belanja yang tidak ditetapkan.

Fakta kasus itu adalah seperti berikut: Seorang perempuan telah menuntut di Mahkamah Kadhi supaya ia dikawinkan dengan Mansor bin Isa secara wali hakim karena bapanya enggan mewalikannya dalam perkawinan itu dengan mas kawin sebanyak RM80.00 dan hantaran RM202.00 tunai.

Pihak bakal suami telah mencuba beberapa kali untuk meminang perempuan tetapi dihalang oleh bapa dengan alasan "Tunggulah dulu sehingga anak perempuannya mendapat pekerjaan". Bakal suami itu bekerja sebagai Pembantu Audit. Dengan keputusan bersama maka mereka berkawin di Rantau Panjang melalui sendiket yang sememangnya mengaturkan perkawinan bagi pasangan yang menghadapi masalah.

c. Mengeruhkan hubungan kekeluargaan.

Antara hikmah digalakkan perkawinan dalam Islam adalah bagi mengembangkan silaturrahim antara sesama Muslim. Semakin jauh kaitan kekeluargaan, semakin baik bagi tujuan itu.²⁵

Namun, nikah terjadi sebaliknya. Bukannya mengembang silaturrahim malah bertambah menguncup. Anak perempuan dan bapa akan bermusuhan

²⁵ Ismail Marzad, (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 11 September 2011.

apatah lagi menantu. Keluarga kedua-dua pihak akan menyalahkan antara satu sama lain dan lebih parah lagi akan berlaku pergaduhan.

Dalam kasus ini dapat dijelaskan apa yang terjadi apabila anaknya telah dipoligamikan oleh menantu. Hubungan kekeluargaan yang terjadi kepada rakan saya iaitu Nadhiah Bt Karim, di mana suaminya telah menikah di Selatan Thailand dengan isteri yang lain, ketika rahsia pernikahan suaminya telah pecah menimbulkan satu suasana yang tegang dan dingin diantara mertua dan ipar duai. Ketika pernikahan mereka sudah diketahui maka orang tua Nadhiah telah menghalau menantunya dari rumah kerana menantunya telah melakukan nikah liar ini. Seluruh ahli keluarga telah meminggir suami Nadhiah.

d. Pernikahan diragui kerana kurangnya syarat atau rukun.

Sudah banyak terjadi sindiket pernikahan (nikah tidak rasmi) di merata negeri Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kedah, Kelantan dan lain-lain. Mereka tidak menghitungkan hukum halal haram yang penting bayaran diterima bagi pasangan yang terdesak. Kadang-kadang juga sindiket (calo) yang menguruskan nikah liar secara sah di negara jiran.

Walau apapun cara dan mekanisme yang pasangan gunakan semasa nikah lari, satu hakikat yang terpaksa mereka terima iaitu keperluan kepada sijil nikah. Untuk mendapatkan sijil nikah, perkawinan tersebut hendaklah didaftarkan terlebih dahulu di Pejabat Pendaftar Perkahwinan Perceraian &

Rujuk (PPR) di Jabatan Agama²⁶ di mana pasangan tersebut bermastautin. Akhirnya, tidak ada jalan lain melainkan pasangan terbabit terpaksa mengalah.

Mahu tidak mahu, mereka kena juga berhadapan dengan proses perundangan untuk memperolehi sijil nikah. Antara proses yang terlibat ialah mengesahkan kesahihan perkawinan pasangan samada di peringkat Pendaftar PPR atau di Mahkamah Syariah. Jika perkawinan yang dijalankan itu sah tetapi bertentangan dengan Undang-Undang keluarga Islam di negeri-negeri berkaitan, pasangan tersebut terpaksa berhadapan pula dengan tindakan undang-undang iaitu nikah tanpa kebenaran. Selepas proses undang-undang dilaksanakan, baharulah suatu perkawinan itu dapat didaftarkan di Jabatan Agama.

Apa yang lebih merumitkan ialah, ada ketikanya pernikahan pasangan itu tidak menepati kehendak hukum syarak. Syarat rukun pernikahan yang tidak dipenuhi adakalanya berlaku menyebabkan pernikahan tersebut diputuskan tidak sah dan seterusnya difaragkan atau dibubarkan. Hal ini sudah tentu mendatangkan kesulitan kepada pasangan itu.

²⁶ Zainuri Abdullah, (Pegawai Agama Rantau Panjang) *Wawancara* di Rantau Panjang, 10 September 2011.

Pendek kata mereka tidak boleh lari dari mendaftarkan perkawinan mereka untuk mendapatkan sijil nikah. Sijil nikah amat penting untuk tujuan-tujuan lain. Untuk mendaftarkan anak ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) juga perlukan sijil nikah. Cuba bayangkan apabila si anak tidak dapat dibuktikan dengan dokumen siapa bapa kandungnya, kepada siapa nanti ia dibin atau dibintikan? Apakah pasangan itu rela apabila JPN meletakkan status anak itu tanpa bapa?²⁷

Begitu juga halnya apabila mula menghantar anak ke sekolah dalam peringkat Pra-Sekolah atau Tahun 1. Untuk mendaftarkan anak tersebut, pihak sekolah memerlukan pula data dan dokumen berkaitan mengenai anak dan ibubapa. Salah satu dokumen asas yang diperlukan ialah sijil nikah ibubapa. Dalam hal ini, ketiadaan sijil nikah ibubapa anak tersebut memberi kesulitan dalam proses pendaftaran persekolahan anak.

Rupa-rupanya, banyak juga implikasi atau kesan negatif yang sukar diterima sekiranya suatu perkawinan itu tidak didaftarkan. Sebab itulah, masyarakat kita perlu diingatkan bahwa walau besar manapun cabaran pasangan yang hendak bernikah itu, janganlah pula sampai mengabaikan undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Andai keizinan wali sukar diperolehi, ambillah jalan untuk memohon kebenaran menggunakan wali hakim di Mahkamah Syariah. Hindarilah mengambil tindakan nikah liar yang akhirnya menyusahkan diri sendiri di kemudian hari.

²⁷ Jurnal Hukum Jld XII, Bhg. 1, Jun 2010M

D. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akibat nikah liar di Thailand

Perkawinan liar yang dilakukan di Thailand sering menimbulkan masalah, ada kalanya perkawinan pasangan itu tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Apabila rukun pernikahan yang tidak dipenuhi, adakalanya menyebabkan perkawinan tersebut diputuskan tidak sah dan seterusnya dibatalkan (difaraq) atau dibubarkan. Hal ini sudah tentu mendatangkan kesulitan kepada pasangan itu.

Akan tetapi apabila perkawinan itu telah memenuhi ketentuan hukum syara' (melengkapi syarat an rukun nikah) maka perkawinan tersebut ada yang sah menurut agama sekalipun tiak memenuhi ketentuan undang-undang Negara.

Terhaap perkawinan liar yang dilakukan diluar Negara seperti yang terjadi di Thailand, apabila perkawinan itu dilakukan di kantor pejabat agama yang rasmi di Thailand, maka perkawinan tersebut dapat dibenarkan di wilayah Kelantan, dengan cara mengisbatkan nikah I mahkamah Syariah Rendah di seluruh wilayah negeri Kelantan berdasarkan enakmen Unang-Unang Keluarga 2002. Akan tetapi apabila nikah liar tersebut dilakukan diluar kantor pejabat agama rasmi di Thailand, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan (diisbatkan) di Mahkamah Syariah Rendah tersebut.

Kemungkinan melakukan nikah liar di Thailand adalah kerana peraturan perkawinan di Thailand untuk umat Islam tidak mensyaratkan beberapa syarat yang di tempat lain menjadi syarat.

Oleh sebab itu, kemungkinan menikah tanpa wali nasab mudah dilakukan, demikian juga perkawinan poligami tanpa istri sangat mungkin terjadi. Untuk itu beberapa hal yang patut dianalisa dalam perkawinan tersebut .

Bernikah di luar negara tanpa wali adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i? Memang ada mazhab yang membenarkan seperti Hanafi yang tidak mensyaratkan perlu adanya wali dalam majlis akad.²⁸

Namun yang demikian, walaupun sah dari segi hukum, namun dari segi undang-undang, anda masih bersalah kerana bernikah di luar negara (juga termasuk di mana-mana) sekiranya tanpa kebenaran daripada Pejabat Agama dan badan yang berautoriti.

Denda akan dikenakan sekiranya perkawinan di luar negara tidak didaftarkan dalam tempoh 6 bulan selepas perkawinan. Bahkan untuk mendaftar selepas itu, bukanlah sesuatu yang mudah. Nak kena berurusan dengan 'kounsel' dulu dan macam-macam lagi.

Seterusnya..undang-undang yang ada bukanlah untuk menganiaya, tetapi menjaga. Terutamanya kaum wanita/gadis/perempuan.

Pensyaratan adanya wali nikah bagi pengantin wanita adalah madzhab mayoritas ulama. Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menganggap tidak sah pernikahan tanpa persetujuan wali dari pihak wanita.

²⁸Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982), h. 77

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita dewasa yang merdeka dan berakal sempurna berhak menikahkan dirinya sendiri dan hanya dianjurkan untuk minta persetujuan wali bila calon suaminya dianggap se-kufu` (sepadan). Dalam hal ini sama saja apakah wanita itu masih gadis atau sudah janda.

Ada lagi madzhab Daud Azh-Zhahiri yang memandang bahwa wali disyaratkan hanya untuk gadis, sedangkan janda tidak diwajibkan memakai wali.

Bila ditinjau dari segi dalil dan berbagai sisi syariat, pendapat mayoritas ulamalah yang lebih kuat. Banyak hadits yang mencantumkan wali sebagai syarat pernikahan dan sebuah akad nikah tidak sah bila tidak disetujui oleh wali sang pengantin wanita. Berikut di antaranya:²⁹

" : "

Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda:³⁰

| | | | | | |
|-------|----|-------|--------|-------------------|-------------------|
| "من | هم | الذين | تزوجوا | من | |
| (لها) |) | المهر | (| (وفيما يتعلق | معها، بحيث لا يحق |
| (| / | | | الأعضاء التناسلية | يختلفون |
| لديهم | ". | | | (هو) | منأولئك الذين ليس |
| | | | | وابن ماجه) | |

²⁹ At-Tirmidzi, *as-Sunan*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1398 H.

³⁰ *Ibid*,

Maksudnya: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari kahalalan kemaluannya. Andai mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah)

(حسين ، " (شاهدين)).

Maksudnya: Dari Imran bin Hushain, Rasulullah saw bersabda, "Tidak (sah) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi." (HR. Ahmad)

Hadits-hadits di atas kualitasnya shahih dan tidak terbantahkan dari segi sanad, selain banyak *mutabi'* (penguat dengan jalur yang sama) juga banyak *syahid* (penguat dengan sanad berbeda). Pembahasan tentang ke-shahihan hadits-hadits di atas dapat dilihat dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil*, no. 1840, 1858, 1865.

Mengingat kuatnya dalil-dalil para jumhur maka kami berkesimpulan bahwa tidak sah seorang wanita menikah tanpa persetujuan walinya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau melalui wali lain bila wali terdekat masih ada, terutama ayah. Dikecualikan dari hal ini adalah ketika terjadi kasus *wali 'adhil*.

Kata 'Adhil () (dengan memakai huruf dhad) artinya mempersulit atau menekan atau menahan. Dalam fikih pernikahan ada istilah '*adhil al-wali* artinya wali si wanita mempersulit atau tidak mau menikahkan wanita

dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang menjadi pilihan si wanita itu dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat.

Seorang wali dilarang melakukan ‘adhl (penyulitan), dan larangan ini langsung diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur`an:³¹

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."(Qs. Al-Baqarah : 232).

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma'qil bin Yasar, dia berkata, "Aku pernah menikahkan salah seorang adikku dengan seorang pria. Lalu dia menceraikan adikku itu, sampai ketika selesai masa iddahnya dia datang kembali melamar adikku tadi. Lalu aku katakan padanya, "Aku sudah menikahkanmu dengannya, dan aku buat engkau mulia dengan itu tapi kau malah menceraikannya. Tidak! Kau tak kan mendapatkannya lagi selamanya!!" Dia sendiri seorang pria yang baik tak bermasalah, dan adikku pun masih menginginkannya kembali, sehingga turunlah ayat (surah Al-Baqarah : 232). Aku pun mengatakan, "Sekarang lakukanlah wahai Rasulullah." Akhirnya Ma'qilpun menikahkan pria tadi kembali dengan adiknya." (HR. Al-Bukhari dalam shahihnya, no. 2087)

Dengan demikian, seorang wali termasuk ayah dilarang mempersulit anaknya bila ingin menikah dengan pria yang sudah dicintai dan memang tidak ada masalah dari sisi akhlak dan agama.

³¹ Abdullah Basmeikh, op.cit h. 90

Rasulullah SAW bersabda:³²

" ، والدين (الحياة) هل أنت (القديسين) التشهير ، إن لم يكن (عليها ثميتزوج) ."

Maksudnya: "Jika datang melamar kepada kalian (para wali) seorang lak-lakii yang kalian ridhai (kehidupan) agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (terima lamarannya), kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan melebar di muka bumi." (HR. At-Tirmidzi, no. 1084, Ibnu Majah, no. 1967. Teks di atas dalam riwayat At-Tirmidzi. Al-Albani menganggapnya *hasan* sebagaimana dalam *Irwa' Al-Ghalil*, no. 1868).

Bila seorang wali mempersulit dengan tidak mau menikahkan anaknya dengan pria idamannya dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, maka si anak hendaknya mengajukan masalah ini kepada hakim. Lalu, hakim yang akan menikahkan anak tersebut dengan pria itu.

Dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu undang-undang perkawinan di Indonesia pasal 23 ayat 2 disebutkan: "Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Jadi, bila ada pasangan yang mendapat halangan dari wali hendaknya mengajukan masalah ini ke pengadilan agama baik sendiri maupun didampingi pegacara. Itulah cara yang syar'i dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan kawin lari.

Dalam masalah pernikahan, orang tua yang baik tentu tidak akan rela putra dan putrinya mendapatkan pasangan yang akan menyengsarakan kehidupan sang

³² *Ibid*, At-Tirmidzi, as-Sunan

anak. Semua orang tua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang membahagiakan dan menyejahterakan.

Hanya saja, terkadang cara pandang mereka dalam menentukan kebahagiaan itu yang berbeda dengan si anak. Di sinilah terkadang terjadi gesekan kepentingan, sehingga tak jarang berujung kepada masalah perkawinan.

Meski demikian seorang anak hendaklah senantiasa menempatkan keridhaan orang tua sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mengingat Rasulullah SAW sudah berpesan:³³

" (هو في ، والمسنين ، "

Maksudnya: "Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua." (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam kitab *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 2501).

Bahkan perintah orang tua juga wajib ditaati dalam masalah pemilihan dan pemutusan jodoh selama alasannya dibenarkan oleh syariat. Pernah suatu ketika Umar bin Al-Khathab memerintahkan puteranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Abdullah tidak bersedia karena dia masih mencintai istrinya itu, lalu kasus mereka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau berkata kepada Abdullah, "Ceraikan dia!" (HR. Abu Daud dalam sunannya, no. 5138, At-Tirmidzi, no. 1189, Ibnu Majah, no. 2088, dishahihkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil* juz 7 hal. 136-137).³⁴

³³ *Ibid*, At-Tirmidzi, as-Sunan

³⁴ *Ibid*

Artinya, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk patuh kepada ayahnya. Ini semua lantaran sebab yang dipastikan dapat dibenarkan agama, sehingga Umar tidak menyukai menantunya itu.

Kasus serupa pernah terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal, di mana ada seorang pria mendatangi beliau mengadukan bahwa ayahnya menyuruhnya menceraikan istrinya, tapi ia masih mencintai istrinya itu. Imam Ahmad mengatakan, "Kalau begitu jangan ceraikan istrimu." Pria tadi mengatakan, "Bukankah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya karena diminta ayahnya, Umar?" Imam Ahmad menjawab, "Apakah ayahmu sama dengan Umar?!"³⁵

Syekh Al-'Utsaimin (salah seorang ulama besar dari Arab Saudi, al-marhum) memberi alasan dalam kasus ini, "Umar kita pahami dengan yakin bahwa ia tidak akan menyuruh Abdullah menceraikan istrinya tanpa alasan syar'i, yang bisa jadi tidak diketahui Abdullah. Karena, mustahil rasanya Umar meminta anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab yang syar'i, itu sangat jauh kemungkinannya."³⁶

Dengan kata lain, kalau tingkat ketakwaan ayah orang tadi sudah sama dengan Umar (dan itu tidak mungkin) atau paling tidak terkenal dengan kesalehannya barulah si anak wajib mentaatinya dalam nikah atau cerai.

³⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1987) hal 108.

³⁶ Al-Hilali, Salim bin 'Id, Syaikh, *Riyadhus-Shalihin*, (Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi & Maktabah al-Ghazali, Beirut, tanpa tahun), h.216

Kasus di atas adalah untuk anak laki-laki yang tidak terikat dengan keputusan orang tua dalam hal menentukan jodoh. Apalagi untuk anak perempuan yang wajib mendapat restu walinya untuk menikah.

Maka, jika orang tua tidak setuju dengan calon menantu³⁷ prianya dengan alasan yang bisa dibenarkan dalam agama ataupun logika, hendaknya si gadis menurut. Insya Allah itu akan lebih selamat dunia dan akhirat. Namun bila alasannya tidak dapat diterima secara agama maupun logika, maka hendaknya minta bantuan penasehat untuk memberi penyadaran kepada si orangtua. Dalam keadaan *dead lock* atau orang tua melakukan '*adhl*' (penahanan nikah tanpa alasan kuat) maka si anak punya hak untuk mengajukan masalah ini ke pengadilan agama.

Perkawinan menjadi sah sekiranya menepati rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dari segi hukum syarak.³⁸

Dari segi undang-undang, perkawinan perlu didaftarkan di Mahkamah Syariah dan pasangan akan didenda karena berkawin tidak mengikut prosedur.

Mereka yang berkawin lari beranggapan walaupun ia merupakan kesalahan, tetapi ia bukan masalah yang berat. Ini karena perkawinan yang sah tetap boleh didaftarkan melihat kepada tempat pernikahan dijalankan itu berada lebih dua marhalah (lebih kurang 91 kilometer) dari tempat tinggal wali. Akan tetapi sebenarnya, perkara yang lebih penting daripada jarak jauh itu adalah penafian bapa sebagai wali itu sama ada munasabah atau tidak.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1992), h. 59.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), h. 78

Wali hakim hanya boleh memainkan peranan dalam keadaan bapa masih wujud, sekiranya terdapat sebab-sebab yang dibenarkan, iaitu dalam keadaan yang memenuhi hukum syarak. Sebaliknya, sekiranya keengganan wali itu disebabkan alasan yang munasabah, maka tidak wujud ruang bagi mana-mana wali hakim untuk mengambil peranan. Dan yang lebih penting lagi untuk diketahui, keengganan wali atas alasan yang munasabah boleh membatalkan pernikahan tersebut.³⁹

Bidang kuasa Peruntukan sudahpun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahwa, “Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:

- (a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut hukum syarak; atau
- (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali raja mengikut hukum syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi”.

³⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2008), h. 65

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.

Dalam keadaan ini, sekiranya perkawinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran-penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya nikah liar pada masyarakat adalah:
 - a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena pelbagai faktor seperti poligami. Pernikahan ini terjadi kerana berlakunya pernikahan kali kedua(poligami) yang disembunyikan taraf perkawinan mereka kerana dibimbangi dapat diketahui oleh istri yang pertama. Ini dapat dilihat pada kes yang melakukan poligami, alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki ialah kerana istri pertamanya tidak setuju dan prosedur untuk poligami adalah sukar sedangkan pihak laki-laki amat memerlukan zuriat kerana sehingga kini beliau belum dikurniakan anak.
 - b. Nikah liar terjadi kerana pasangan terlalu mengikut hawa nafsu semata-mata, perkawinan ini terjadi kerana berlakunya hamil diluar nikah di mana keadaan si perempuan telah hamil untuk mendapatkan status mereka harus melakukan nikah liar ini demi menyelamatkan anak yang dikandung. Kasus ini banyak terjadi

demikian menyelamatkan maruah dan status anak yang dikandung maka kebanyakan anak gadis yang hamil di luar nikah telah mengambil tindakan segera melakukan nikah liar kerana bimbang diketahui oleh pihak keluarga atau pun masyarakat sekeliling.

- c. Laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan tersebut tidak berkelakuan baik. Kebanyakan laki-laki yang melakukan nikah liar ini mempunyai sikap lepas tangan terhadap tanggungannya. Si istri takut untuk mendapat hak yang sebenar kerana bimbingan rahsia nikah liar mereka akan pecah pada pengetahuan umum. Lelaki yang banyak melakukan kasus ini biasanya laki-laki yang mempunyai rekod seperti penagih dadah. Sebelum nikah pelbagai janji manis yang diberikan kepada anak gadis tetapi selepas nikah yang berlaku adalah sebaliknya.
2. Dampak pernikahan liar masyarakat Rantau Panjang menimbulkan rasa tersinggung dengan kelakuan pasangan yang berkawin sama ada oleh keluarga laki-laki maupun perempuan. Dampak ini bisa terjadi seperti akan merusakkan sistem kekeluargaan yang utuh, perkawinan yang dibina akan hancur setelah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dalam melakukan nikah liar dengan istri baru, perbuatan nikah liar ini mampu menghilangkan hak wali pasangan yang melakukan nikah liar ini telah lari dari prosedur biasa dengan mengambil wali hakim sedangkan dalam rukun nikah perlu kepada wali nasab dan pernikahan ini mampu mengeruhkan suasana hubungan

kekeluaragaan ekoran dari perkawinan ini hubungan mertua mulai renggang begitu juga dengan ipar duai.

3. Nikah liar yang mengikuti aturan Fiqh dan dianggap sah oleh syarak dan salah di sisi undang-undang sivil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

Bagi memudah dan memantapkan lagi urusan berkaitan dengan munakahat orang Islam di Malaysia, maka berikut adalah beberapa cadangan yang perlu dilakukan sama ada oleh kerajaan atau agensi-agensi yang terlibat dengan urusan tersebut:

- (1) Penerangan secara berterusan kepada masyarakat berkaitan dengan konsep kawin liar yaitu lebih banyak buruk dampaknya daripada kesan baik.
- (2) Perlu mewujudkan satu Akta khusus orang Islam secara khusus, kemas dan seragam bagi memudahkan sebarang rujukan dibuat apabila timbul persoalan tentang kawin liar.
- (3) Perlu ada keseragaman dan undang-undang yang sama adil antara kedua Negara yang terlibat dalam bab kawin liar supaya undang-undang nikah liar yang sedia ada tidak di pandang remeh dan dipersendakan. Rata-rata masyarakat mengikuti aturan hokum dan undang-undang yang berlaku.
- (4) Kepada masyarakat diluar sana harusnya hati-hati dalam melaksanakan satu-satu perkawinan, ini kerana perkawinan itu adalah bersifat luhur bagi

pasangan yang melakukan nikah liar mempunyai dampak yang buruk pada masa akan datang di mana pengurusan pendaftaran pada anak atau penceraian amat sukar dilakukan anadai pernikahan ini tidak didaftarkan kembali di negaranya.

(5) Perlu penegasan kepada pernikahan poligami, pasangan ini jelas menyembunyikan status pernikahan mereka daripada pengetahuan istri pertama, keluarga dan masyarakat umumnya tetapi hasil perbuatan mereka akan menimbulkan fitnah yang besar kepada istri kedua, ketiga ataupun keempat. Kebanyakan kes poligami banyak terjadi suami akan tidak berlaku adil kepada istri-istri barunya terutama dari segi bermalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, Cetakan Keenam, 1988.
Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
- Abdul Halim Nasir, *Panduan ke tempat-tempat bersejarah Kelantan*, (Jabatan Muzium Negara, Kuala Lumpur, 1979)
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diktat Kuliah, (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002),
- Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, juzu' 4, terjemahan Bahasa Melayu oleh Syarif Zaini Daud, Cetakan Rawa Pulau Pinang, t.t)
- Al-Amidy, Ali Bin Abi Ali. 1967. *Al-Ahkam Fi Usul al-Ahkam*. Al-Qahirah: Muassasah al-Halabi. 1967)
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Beirut: Darul Fikr, t.t.),
- Al-Hilali, Salim bin 'Id, Syaikh, *Riyadhus-Shalihin*, (Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi & Maktabah al-Ghazali, Beirut, tanpa tahun),
- Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin (2002), *Undang-undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Iarak Iauh UKM
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995
- Abdul rahman I. DOI, ph.D, *Perkawinan dalam syari'at Islam*, (1998), Abu Daud, *as-Sunan*, Dar al-Hadits, Syria.
- Amir Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 1998)
- Alias Muhammad, *Kelantan politik dan dilemma pembangunan*, (Penerbitan Utusan Malayu (M) Bhd., Kuala Lumpur, 1975)
- Al-Imam al-Alamah Taqhiyudin Abi Bakar bin Mohammad al-Husaini al-Husna al-Damasykhi al-Shafie *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ihtisar*, al-Maktabah al-Taufiqih, Mesir
- Al-Syeikh Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 & jilid 3.
- Amir Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Penerbit Kencana, Jakarta
- At-Tirmidzi, *as-Sunan*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1398 H.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984)

Data Mahkamah Syariah Pasir Mas, Unit Penerbitan, (Pasir Mas, 2010) *J/MRIR/109/02*

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 1990

Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Avyrouz, Yogyakarta, 2000)

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, (Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995)

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas. Kasus Jenayah No : 11009-143-0035-2003

Berita Harian, 15 Januari 2003.

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas, No : 11009-143-0036- 2003

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01 003-010-387/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2010 bil: 01003-010-390103/05

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-274/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-333/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-339/03

Ibrahim Syukri. *History of the Malay Kingdom of Patani*. Center for International Studies, (Ohio University, Athens, Ohio, 1985)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982),

M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit : PT. Lentera Basritama.

Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum*

Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, t.th.)

Jabatan Perangkaan Negeri *Kelantan, Pecahan Kawasan Tanah di Kelantan*, (Kota Bharu, Dian Darulnaim, 2000)

Jurnal Hukum Jld XII, (Bhg Penerbitan Universitas Malaya, Kuala Lumpur. 1, Jun 2010)

Malaysia Law Jurnal, Jabatan Kehakiman syariah Malaysia. (Unit Penerbitan JAKIM . 1999)

Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX* 1998)

Nik Muhammad b.Nik Mohd Salleh, *Jorrtal sejarah Kelantan*, Kota Bharu, Kelantan, 1975

Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-undang Keluarga dalam Islam*, Syarikat Dian Sdn.Bhd, Kota Bharu, Kelantan.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2008),

News/BH/Thursday/Agama/201001

Rahmat bin Sharipan. *Pengembang Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1979)

Sa'ad Shukri bin Haji Muda, Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh & Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi. *Detik2 Sejarah Kelantan*. (Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, 1971)

Sejarah Ringkas: Kerajaan Jembal Kelantan, terbitan Pertubuhan Kerabat Raja Jembal Kelantan,(Kota Bharu, Urusetia Jabatan Penerangan Kelantan)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Syeikh Ali Hassan Ahmad, *Munakahat Membahas Soal-soal Perkawinan Dan Rumahtangga*, (Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur, 1997)

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990)
Wahbah Zuhaili, *Usul al Fqh al-Islami*, jil. I, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004)

Wahbah al-Zuhaili, *Nazaariyat al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a Qanun al-Wadi'e*. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1982)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. (Tarsito, Bandung, 1990)

Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur, 2004)

_____. (2004). *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia: Sebelum Dan Menjelang Merdeka (The Administration Of Islamic Law In Malaysia: Before And The Coming Of Independence)*. Kuala Lumpur: Utusan Publications And Distributors.

Wawancara

Abdul Fatah shafie (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Ahmad Jailani (Naib Qadhi, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Aziz Deraman (Pegawai Kaunseling, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Ishak Mohd , (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 10 September 2011.

Ismail Hasim Mehat (Pegawai Pendaftar Mahkamah Syariah Pasir Mas, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Ismail Marzad, (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 11 September 2011.

Marzuki Zakaria (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Muhammad Al Tarmiziy Bashar (Pegawai Agama Majlis Agama Islam Kota Bharu) *Wawancara* Kota Bharu, 9 Oktober 2011.

Muhammad Noor Saman (Pegawai Pencegah Penyeludupan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Muji Abbas (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Mokhtar Ali (Pegawai Pelancongan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Norhidayah Abdullah (Ketua Unit Bagian Kuatkuasaan Kastam, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Sarpan Aliman (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Subari Deraman (Naib Qadhi Daerah Yala, Thailand, Thailand,) *Wawancara*, 30 Oktober 2011

Sulaiman Yahasok (Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 28 Oktober 2011

Supian Sori (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Uwais al Qarni Ahmadullah (Pegawai Renjer, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Yusof Ahmad (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Zainuri Abdullah, (Pegawai Agama Rantau Panjang) *Wawancara* di Rantau Panjang, 10 September 2011.

Zulkifli Mahusain (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

**NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG,
KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



ADIBAH BINTI YUSOF@ ABDULLAH SAARI

10921008912

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut hukum Islam.**

Diirungi Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada umatnya dari lembah kegelapan menuju bukit yang penuh dengan cahaya kebenaran.

Sebuah penulisan yang kerdil, sebagai hamba yang tak pernah bisa lepas dari keterbatasan, penulis yakin masih banyak keterbatasan dalam skripsi ini. Sehingga penulis selalu mengharapkan curahan partisipasi pembaca baik kritik maupun arahan yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan pihak lain. Baik itu bantuan moril maupun materil.

Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua, khususnya:

1. Kepada Suami tercinta Kepala Sekolah dan anak-anak tersayang, terima kasih karena kalian memahami perjuangan ummi di arena ilmu Allah ini, juga terima kasih yang tidak terhingga dan jemu menolong dalam penulisan penelitian ini. Kepada Arwah Bapak, Ibu, yang telah membantu dan memberikan banyak pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau yang telah menerima penulis sebagai Mahasiswa UIN dalam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
3. Yth. Bapak Dr. H. Akbarizan, M,A, M,Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Ketua Jurusan AHA dan Sekteritaris baik yang lama Dra. Ibu Yusliati mahupun yang baru Drs.Zainal Arifin.
5. Yth. Bapak Yusran Sabili Yashouk, M.Ag, selaku pembimbing yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan memberikan petunjuk serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Yth. Bapak dan ibu pembantu Dekan baik yang lama ataupun yang baru, terkhusus kepada Bapak Drs.Hajar M,NH,Bapak Drs.M.H Yunus,MA dan Ibu Hertina,M.Pd tanpa jemu memberi tunjuk ajar kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
7. Semua Bapak dan ibu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Semua Karyawan dan Pustakawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska.

9. Semua Bapak dan Ibu di Mahkamah Rendah Syariah Pasir Mas yang banyak membantu untuk mendapatkan bahan penulisan skripsi ini.

10. Semua sahabat dan teman sejawat, yang telah memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas semua jasa mereka, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberi balasan dengan pahala yang berlipat ganda.

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi maupun pembaca lainnya.

Pekan Baru, Riau,

Penulis

Yusran Sabili Yasak, M.Ag
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universiti Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Januari 2012 Dosen
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum
di-
Pekanbaru

Nomor : NOTA DINAS

Lamp : -

Hal. : PENGAJUAN SKRIPSI

Sdri. ADIBAH BINTI YUSOF @ ABDULLAH SAARI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan meneliti, memeriksa dan memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa laporan penelitian skripsi atas nama: Adibah Binti Abdullah dengan judul skripsi:

Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut hukum Islam. Telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian Munaqasah guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Demikianlah kami semoga dapat waktu dekat ini saudara tersebut dapat dipanggil dalam ujian Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

Pembimbing

Yusran Sabili Yasak, M.Ag
NIP:196503131992031003

ABSTRAK

AdibahBtYusof@AbdullahSaari(2012). **NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA: SATU KAJIAN DI**

RANTAUPANJANG,KELANTAN.Skripsi.JurusanAhwalSyahksiah.

FakultasSyari'ahdanilmuHukum.UniversitasIslam Negeri Sultan SyarifKasim, Riau,PekanBaru.Idealnyasebuahperkawinanhendaknyadiawalidengansesuatu yang Islami,tidakdicampuriolehapapun yang dapatmenguranguansaIslamdalamperkawinan.Istilah 'kawin liar' merujukkepadapernikahanalternatif yang dijalaniolehpasangandalamkeadaanmerekameliarkandiridaripadaprocedurbiasaMa hkamahSyariah.Karenaketentuanperkawinandalam Islam telahdibahassecararincimulaidaripengertian, carapertunangan, pemberianmahar, wali, prosesperkawinan,perkawinan yang diharamkandan lain sebagainya.Permasalahan yang dikajidalampenelitianiniadalah: 1.Apakah faktor-faktor yang menyebabkanterjadinyakawin liar di RantauPanjang? 2. Apakahdampakperkawinan liar terhadapkehidupankeluargadanmasyarakat di RantauPanjang? dan 3. Bagaimanatinjauan hukum Islam terhadappraktikperkawinan liar di RantauPanjang?

Metodepenelitian yang digunakanalampenelitianiniadalahpenelitianlapangandenganterjunlangsungkema syarakatdanpenelitianterhadapkasusmahkamahsehinggadiperoleh data yang jelas.

Teknikpengumpulan data yang bersifatwawancarabebasterpimpin, observasi, dandokumentasi.Berdasarkan data yang terkumpulkemudiandianalisisdenganmenggunakanpendekatannormatif, yaknidenganrealiti yang terjadidalam masyarakat, apakahketentuanmasyarakattersebutsesuaiatautidakdalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkanhasilanalisis hukum Islam terhadap data hasilpenelitian, makadapatdisimpulkanbahwatradisikawinliar yang berlakuadalahtidaksesuaidenganketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur'an danHadis tidakadadalilataujanjuransatupun yang menghalalkankawinliardengan kata lain akibat yang timbulataudampakkawinliarsangatbertentangandenganperintahdanlarangan Allah SWT.Bagaimanapunterdapatjugakalanganulama yang mengatakanbahwakawinliarsahdisisi Islam.Apa yang menjadihalanganadalahundang-undang civil yang ditentukanoleh kerajaan.Namumbegituhasil darinikah liar inibisamengundangefek yang negatifsepertinikah liar inidapatmerusakrumahtangga yang utuhsetelah sekian lama iadibinaataddasarkasihsayang.

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan, maka saran yang ingin disampaikan agar masyarakatjanganmenjadikankawinliarinisebagaibudaya.Dan juga control darimasyarakat sangatdiperlukan agar tidakterjadi penyelewenganoleh pihak-pihaktertentuterkait dengankawinliarini.

ABSTRACT

Adibah Bt Abdullah (2012). **RUN AWAY MARRIAGE AND ITS IMPACT: CASE STUDIED IN RANTAU PANJANG, KELANTAN.**

Thesis. Department of Ahwalsyahksiah. Faculty of Syariah and Law knowledge. State Islamic Institute University of Sultan Sharif Kasim Riau,

Pekanbaru. Ideally, a marriage should be preceded by something that is Islamic, not interfered with by anything that can reduce the nuances in the Islamic marriage. The term 'illegal marriage' refers to the alternative of marriage by the couple lived in a state they fled rather than the usual procedure Syariah Court. Because the provision of marriage in Islam has been discussed in detail starting from the definition, means the engagement, giving dowry, guardian, marriage processions, marriage is forbidden and so forth.

The problem examined in this study were: 1. What is the factor that causes the 'illegal marriage' in the Rantau Panjang? 2. Is the impact of illegal marriage for family life and society in the Rantau Panjang? and 3. How to review the Islamic law against illegal marriage practices in the Rantau Panjang? The research method used in this study is a field research and directly faced to the community and a study of court cases in order to obtain accurate data. The data collection techniques that are free guided interviews, observation, and documentation. Based on the data collected and analyzed by using a normative approach, namely the reality that occurs in society, whether public provision is appropriate or not in the view of Islamic law. Based on the analysis of Islamic law on research data, it can be concluded that the prevailing tradition of eloping is not in accordance with the provisions of Islamic law because in the Qur'an and the Hadith there is no proof or suggestion that justifies any eloped with another word or impacts arising due to elope is contrary to the commands and prohibitions of Allah SWT. However there are also among the scholars who do not say that the legitimate side of the elopement of Islam. What is the hitch is a civil law which is determined by the kingdom. Based on the results of research that has been done, then the advice to be conveyed so that

people do not make this elopement as a culture. And also the control of society is needed to prevent abuses by certain parties related to this elopement.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

MUKA SURAT

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah Kajian | 1 |
| B. Batasan Masalah | 12 |
| C. Rumusan Masalah..... | 13 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 16 |

BAB II PROFIL LOKASI KAJIAN DAN METODE ANALISIS DATA

| | |
|-----------------------|----|
| A. Profil Lokasi..... | 18 |
| B. Geografi..... | 21 |
| C. Ekonomi..... | 22 |
| D. Penduduk..... | 22 |
| E. Agama..... | 23 |
| F. Pendidikan..... | 23 |
| G. Adat Istiadat..... | 24 |

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

| | |
|--|----|
| A. Pengertian..... | 25 |
| B. Keberadaan Wali dalam Perkawinan..... | 28 |
| C. Kawin Liar Dalam Pandangan Perundangan..... | 41 |

BAB IV NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Nikah liar di Rantau Panjang..... | 52 |
| B. Faktor penyebabnya terjadi Nikah Liar dalam masyarakat..... | 75 |
| Rantau Panjang, Kelantan | |
| C. Dampak Pernikahan Liar Terhadap Keluarga Di Rantau..... | 78 |
| Panjang Kelantan | |
| D. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akibat..... | 84 |
| nikah liar di Thailand | |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 94 |
| B. Saran..... | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----------|---|---|----|
| TABEL 1 | : | Tahap Pendidikan | 23 |
| TABEL 2 | : | Jumlah permohonan ' <i>Ishat Nikah</i> ' di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. | 54 |
| TABEL 3 | : | Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya | 61 |
| TABEL 4 | : | Nikah liar mempunyai sindiket | 62 |
| TABEL 5 | : | Nikah liar menjatuhkan maruah keluarga | 64 |
| TABEL 6 | : | Nikah liar semakin berleluasa | 66 |
| TABEL 7 | : | Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu | 69 |
| TABEL 8 | : | Nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak | 70 |
| TABEL 9 | : | Nikah liar banyak disebabkan oleh poligami | 71 |
| TABEL 10 | : | Nikah liar dibenarkan oleh Mahkamah dengan menggunakan wali hakim | 72 |
| TABEL 11 | : | Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil | 73 |
| TABEL 12 | : | Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali | 74 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|----------|---|---|----|
| TABEL 1 | : | Tahap Pendidikan | 23 |
| TABEL 2 | : | Jumlah permohonan ' <i>Ishat Nikah</i> ' di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010. | 54 |
| TABEL 3 | : | Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya | 61 |
| TABEL 4 | : | Nikah liar mempunyai sindiket | 62 |
| TABEL 5 | : | Nikah liar menjatuhkan maruah keluarga | 64 |
| TABEL 6 | : | Nikah liar semakin berleluasa | 66 |
| TABEL 7 | : | Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu | 69 |
| TABEL 8 | : | Nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak | 70 |
| TABEL 9 | : | Nikah liar banyak disebabkan oleh poligami | 71 |
| TABEL 10 | : | Nikah liar dibenarkan oleh Mahkamah dengan menggunakan wali hakim | 72 |
| TABEL 11 | : | Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil | 73 |
| TABEL 12 | : | Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah S.W.T dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah S.W.T telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dan manusia tidak boleh berbuat semahunya seperti mana makhluk-makhluk Allah S.W.T yang lain. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah secara jelas telah menggariskan hukum berkaitan dengan perkawinan umpamanya, mengenai peminangan sebagai pendahuluan perkawinan, mahar atau mas kawin, upacara akad nikah, kerukunan dalam berumah tangga, perceraian, rujuk, idah, muta'h dan sebagainya.

Di Malaysia, urusan pernikahan merupakan sebahagian daripada urusan agama yang termasuk di dalam bidang kuasa negeri-negeri.¹ Ia adalah antara perkara-perkara yang diletakkan dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dan Senarai 2 Perlembagaan Negeri² Melalui peruntukan ini, setiap negeri di Malaysia mentadbirkan urusan agama mengikut peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan setiap negeri melaksanakannya berdasarkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan

¹ Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-undang Keluarga dalam Islam*, (Syarikat Dian Sdn.Bhd, Kota Bharu, Kelantan, 1998). h. 40

² Prof. Madya Dr. Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin *Undang-undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Jarak jauh UKM, 2002), h. 237

kedudukan keuangan mereka. Walaupun ada usaha-usaha ke arah penyelarasan dan penyeragaman undang-undang berkaitan agama Islam di Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atas arahan Perdana Menteri, ia masih belum lagi diwartakan dan dilaksanakan sepenuhnya atas alasan-alasan teknikal dan pengubahsuaian draf undang-undang bagi kesesuaian pemakaiannya di negeri-negeri.³

Kesan perundangan ini membolehkan setiap anggota keluarga itu yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak dan kaum kerabat yang terlibat mendapat hak masing-masing daripada pernikahan tersebut. Selain daripada itu, dengan perkawinan yang diiktiraf ini membolehkan semua anggota keluarga mengambil tanggungjawab dalam memastikan kebahagiaan dan keharmonian dalam hidup berumah tangga.

Istilah 'kawin liar' merujuk kepada pernikahan alternatif yang dijalani oleh pasangan dalam keadaan mereka melarikan diri daripada prosedur biasa Mahkamah Syariah.

Biasanya mereka lari ke negara jiran untuk menikah secara mudah. Tindakan mengelak daripada melalui proses biasa, lazimnya kerana mereka mahu berpoligami tetapi tidak dapat melengkapinya syarat-syarat yang dikenakan oleh undang-undang dan (atau) tidak mau perkawinan tersebut diketahui oleh istri pertama. Ada juga yang bertindak untuk kawin liar kerana pilihan mereka tidak direstui oleh orang tua.

Kawin liar sebenarnya suatu kesalahan dan undang-undang memperuntukkan hukuman denda atau penjara terhadap kesalahan ini. Walaupun

³ *Berita Harian*, 15 Januari 2003.

hukuman telah diperuntukkan terhadap kesalahan ini, akan tetapi fenomena ini seakan tidak nampak berkurang. Sekiranya status pernikahan tidak jelas dan tidak didaftarkan tentulah ia memberi implikasi yang sangat tidak baik.

Walaupun dari sudut hukum Islam kemungkinan pernikahan tersebut sah, tetapi dengan tidak adanya dokumen yang diakui oleh undang-undang negara, menjadikannya tidak diiktiraf oleh undang-undang.

Kawin liar juga mempunyai kaitan dengan wali yaitu tanpa keizinan wali maka pasangan yang berkawin mengambil jalan sendiri dengan berkawin di luar dari wilayah tempat tinggalnya.

Teks al-Quran yang menjelaskan tentang kepentingan wali dalam perkawinan sebagaimana yang diperuntukkan dalam al-Quran surah al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa idah mereka ' maka janganlah kamu (Wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkawin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (laki-laki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua Yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya.⁴

Berdasarkan tafsiran di atas, jelaslah bahwa ayat tersebut difokuskan kepada para wali. Ia dapat difahami apabila terdapat tegahan yang ditujukan

⁴ Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Cetakan Keenam, 1988), h. 90

kepada para wali agar tidak menghalang anaknya yang telah diceraikan untuk kembali semula kepada bekas suaminya.

Keperluan tentang wali juga boleh dilihat berasaskan penjelasan yang dibuat oleh Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadis yang bermaksud:⁵

"غير القديسين. الجامعها هناك المهر إلزامية لأنها كانت لا غيا وغير شرعي ، مقدمي الرعاية الذين ليس لديهم . يعد معها ."

“Tidak sah nikah itu melainkan dengan adanya wali. Mana-mana wanita berkawin tanpa keizinan walinya maka nikahnya adalah batal. Apabila ia telah bersetubuh dengan wanita itu, maka yang wajib adalah mahar mitsli disebabkan ia telah mencampuri wanita itu. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (Abu Daud dan al-Thirmidhi).

Mengikut tertib wali, bapa hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya. Dan jika bapa tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu; dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara laki-laki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya.⁶

Anak-anak yang lahir daripada perkawinan yang tidak didaftarkan juga menerima tempias kesan yang tidak baik. Segala perkara rutin yang memerlukan dokumen yang sah tentunya tidak akan dapat dibuat disebabkan ketiadaan dokumen yang diperlukan.

Umpamanya perkara-perkara yang melibatkan kesihatan, persekolahan dan tabungan di bank. Sekiranya fenomena ini menjadi berleluasa, ia akan memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat keseluruhannya.

⁵ Abu Daud, *as-Sunan*, Dar al-Hadits, Syria.

⁶ al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 5 vol.

Disebabkan perkawinan ini biasanya akibat daripada keengganan bapa untuk memberi restu kepada pasangan, maka tentulah si bapa enggan untuk menjadi wali kepada pernikahan tersebut. Maka perkawinan tersebut menggunakan wali hakim.

Ada juga keadaan yang ibu bapa tidak tahu-menahu langsung tentang tindakan kawin liar oleh anak-anak mereka. Di sini timbul persoalan sama ada pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim ini, memang disebabkan ketiadaan wali ataupun lari daripada wali.

Mereka yang menikah liar beranggapan walaupun ia merupakan kesalahan, tetapi ia bukan masalah yang berat. Ini kerana perkawinan yang sah tetap boleh didaftarkan melihat kepada tempat pernikahan dijalankan itu berada lebih dua marhalah (lebih kurang 91 kilometer) dari tempat tinggal wali. Akan tetapi sebenarnya, perkara yang lebih penting daripada jarak jauh itu adalah penafian bapa sebagai wali itu.

Wali hakim hanya dapat memainkan peranan dalam keadaan bapa masih ada, sekiranya terdapat sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum Syarak. Sebaliknya, sekiranya keengganan wali itu disebabkan alasan yang munasabah, maka tidak boleh wali hakim untuk mengambil peranan sebagai wali.

Dan yang lebih penting lagi untuk diketahui, keengganan wali atas alasan yang munasabah dapat membatalkan pernikahan tersebut.

Untuk menentukan keengganan bapa itu munasabah atau tidak, antaranya adalah sebagaimana yang diputuskan dalam kes Haji Mohamed lawan Bahrurnasran dan Mazliani Mohamed.⁷

⁷ *Malaysia Law Jurnal*, Jabatan Kehakiman syariah Malaysia. Unit Penerbitan JAKIM . 1999

Dalam kes yang diputuskan pada tahun 1997 ini, bapa selaku wali mujbir membuat permohonan pembatalan pernikahan antara Bahrurnnasran dengan Mazliani, anaknya. Permohonan ini dibuat atas alasan pernikahan tersebut dibuat tanpa pengetahuan dan keizinannya sebagai bapa merangkap wali, pasangan anaknya tidak sekufu karena Bahrurnnasran seorang pesakit HIV dan merupakan penagih dadah.

Pernikahan antara kedua-duanya telah dibuat sebanyak dua kali, dengan yang pertama dilangsungkan di Pasir Puteh, Kelantan yaitu dalam negeri melalui wali hakim, dan yang kedua di Narathiwat, Thailand. Permasalahan dalam pernikahan yang pertama timbul kerana dinikahkan dengan wali hakim sedangkan wali sebenar masih ada.

Permasalahan dalam pernikahan yang kedua timbul bukan disebabkan rukun nikah kerana jarak jauh yang memang melangkaui dua marhalah dari tempat tinggal wali, tetapi disebabkan kedua-duanya dilihat sebagai tidak sekufu dari pihak calon suami yang berpenyakit HIV dan menagih dadah(akibat nakoba).

Dalam kes ini Mahkamah memutuskan bahawa tindakan wali hakim berkenaan bertentangan dengan kehendak hukum syarak kerana telah menyatukan dua pihak yang tidak padan (sekufu) dan perkahwinan yang dijalankan sama ada di Kelantan mahupun di Narathiwat adalah tidak sah menurut hukum Syarak. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar lingkungan dua marhalah belum tentu sah walaupun menggunakan wali hakim, dalam keadaan wali asal masih ada dan wali asal mempunyai alasan yang munasabah untuk menghalang pernikahan daripada berlaku.

Bidang kuasa Peruntukan sudah pun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahwa,⁸

"Sesuatunya perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada - (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syarak; atau (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi".

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.⁹

Dalam keadaan ini, sekiranya perkawinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai syarat rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

Wajar untuk diketahui bahwa, pasangan yang hendak berkawin tetapi kehendak mereka tidak direstui oleh orang tua, dalam keadaan mereka menganggap bahwa perhubungan tersebut tidak ada cacat celanya dari segi Syarak

⁸ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas. KES JENAYAH NO : 11009-143-0035-2003

⁹ Syeikh Ali Hassan Ahmad, *Munakahat Membahas Soal-soal Perkawinan Dan Rumahtangga*, (Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur, 1997), h.95-96

dan adat, undang-undang sebenarnya memberikan ruang yang selesa kepada mereka untuk meneruskan hasrat mulia tersebut.

Walaupun pada dasarnya doa restu orang tua itu sangat penting dan menjadi batu asas sesebuah perkawinan yang hendak didirikan, akan tetapi garis panduan yang telah diberikan agama itu sebenarnya lebih mengatasi pertimbangan dan kata hati seseorang. Melalui pandangan para ulama, soal kufu atau sifat padan pasangan itu sepatutnya menjadi neraca untuk memilih pasangan. Pandangan para ulama bersifat sangat bernas untuk dijadikan sebagai panduan.

Seandainya hubungan tidak direstui disebabkan hal-hal yang remeh-temeh dan ia dibangkitkan oleh ahli keluarga, nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak kerana Mahkamah Syariah bersedia untuk mendengar permohonan bagi kes seumpama ini.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Seksyen 13 sebelum ini, sekiranya wali enggan memberikan persetujuan tanpa alasan yang sempurna, Mahkamah akan membenarkan perkawinan yang diniatkan itu untuk diteruskan dengan menggunakan wali hakim. Inilah jalan penyelesaian yang sebenar, iaitu membawa masalah ke muka pengadilan. Di sini tidak timbul soal menjadi anak derhaka atau membelakangi orang tua karena undang-undang mengatasi semua orang dan setiap orang tertakluk kepada undang-undang. Tanpa mengira siapa pun seseorang itu, ia perlu mematuhi undang-undang dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah.

Menyedari bahwa terdapat sebilangan rakyat negeri ini yang berhasrat untuk menikah di luar negara, suatu peraturan telah diatitkan bagi mereka mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Kelantan 2002. Seseorang

yang ingin menikah di luar negara Malaysia sama ada pernikahan dengan warganegara asing atau tempatan atas alasan masalah keizinan keluarga atau apajua alasan, mereka dimestikan mendapat izin terlebih dahulu daripada pihak berkuasa agama negeri sebagaimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990.¹⁰

Sekiranya permohonan tersebut telah lengkap dengan dokumen yang diperlukan di atas termasuk dokumen tambahan lain yang diperlukan bagi kes-kes tertentu seperti surat keterangan diri calon pasangan bagi kes pasangan warga negara asing, surat *wakiilah* wali bagi kasus wali tidak dapat hadir ke majlis akad nikah di luar negara dan surat akuan memeluk Islam jika pasangan adalah seorang mualaf. Selepas diluluskan oleh Pegawai Tadbir Agama Daerah, surat kelulusan tersebut perlu dirujuk kepada Kadi Besar atau jawatan sekarang dipanggil sebagai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syarak, Jabatan Agama Johor. Selepas Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syarak berpuas hati dengan segala keterangan yang ada, beliau akan mengeluarkan satu surat kebenaran untuk bernikah di luar Negara yang ditujukan kepada pihak berkuasa agama negara yang dipilih oleh pasangan itu.¹¹

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perkawinan merupakan satu tuntutan agama dan merupakan fitrah manusia. Untuk mencapai hasrat berumah tangga, banyak di kalangan umat Islam sanggup mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan hari yang bersejarah ini diadakan dengan gilang-gemilang.

¹⁰ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

¹¹ Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur, 2004), h.1-2.

Tradisi pemikahan seperti ini seharusnya dikekalkan bagi menjamin keharmonian dan permuafakatan dalam masyarakat. Ia adalah disebabkan proses pemikahan ini dilakukan mengikut saluran yang benar dan di lakukan secara telus serta dapat diterima oleh semua pihak termasuk kedua pasangan itu sendiri, keluarga masing-masing, masyarakat sekitar, hukum agama dan juga undang-undang di negara ini .

Bagaimanapun terdapat sejumlah pasangan yang melangsungkan akad nikah dengan cara yang dapat disifatkan sebagai 'mistri '. Mistri karena terkadang pernikahan mereka tidak diketahui oleh keluarga terdekat, jiran tetangga dan tidak ada dokumen yang sah yang menunjukkan pernikahan tersebut. Ini mungkin disebabkan pernikahan tersebut dilakukan di luar negara tanpa pengetahuan pihak berkuasa agama atau dinikahkan secara sindiket (calo) atau pernikahan yang sengaja disembunyikan karena tujuan dan kepentingan tertentu mereka.

Nikah di luar negara dibolehkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 tetapi dengan syarat mesti mendapat kebenaran pihak berkuasa agama terlebih dahulu. Sekiranya dilakukan tanpa kebenaran ia dapat dituduh telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 39 enakmen di atas dan bisa dihukum dengan denda tidak melebihi RM 1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bahkan jika melibatkan poligami, pasangan tersebut boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 122 enakmen yang sama.¹²

¹² Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 1990.

Isu pernikahan di luar negara semakin hangat pada awal tahun 2003 ketika Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan akan memudahkan laki-laki berpoligami termasuk melonggarkan syarat seperti tidak memerlukan kebenaran istri pertama bagi menyekat laki-laki di negara ini pergi ke Thailand untuk menikah. Gambaran yang diberikan dari laporan akhbar seolah-olah setiap pasangan yang menikah di luar Negara (khususnya Thailand) adalah pernikahan poligami atau nikah liar, sedangkan kemungkinan banyak lagi sebab-sebab lain yang mendorong pasangan tersebut menikah di luar negara.¹³

Contoh kasus, Kasus Mal bil: 0 1 003-0 1 0-387/03 di antara pemohon pertama Suhaimi bin Md. Said dan pasangannya pemohon kedua iaitu Sharifah Ainon bt Syed Abbas. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkla, Thailand pada 4/10/2002 dengan menggunakan wali hakim . Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan pasangan menikah di Wilayah Songkla, Thailand ialah karena kedua orang tua pihak perempuan tidak setuju dengan pilihan anaknya yang bukan dari keturunan ' Syed ' seperti mereka dan seterusnya wali beliau enggan mewalikan. Pasangan juga menyatakan bahwa mereka pernah membuat permohonan menikah di Pejabat Agama Pasir Mas namun permohonan mereka tidak di layan.¹⁴

Jika diamati sekarang ini, banyak rakyat Malaysia tanpa mengira nama, pangkat, darjat dan status, menikah di Selatan Thailand sama ada di wilayah Songkhla, Narathiwat atau Pattani. Ada informasi dari seorang rakan ketika saya

¹³ *Berita Harian*, 15 Januari 2003.

¹⁴ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas, NO : 11009-143-0036- 2003.

berkunjung ke Thailand baru-baru ini bahwa di Majlis Agama Islam Narathiwat saja lebih 10 pasangan dinikahkan sehari.¹⁵

Kalau betul angka itu, bermakna isu ini amat serius dan ia amat membimbangkan. Persoalannya, apakah sebab atau faktor menyebabkan individu tertentu ini mengambil 'jalan singkat' tanpa mengira kesannya dari sudut perundangan serta hukum syarak.

Pernikahan di luar negara tanpa kebenaran adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta/Enakmen Keluarga Islam apatah lagi bagi individu yang sudah mempunyai istri. Wujud pelbagai faktor menyebabkan mereka ini menikah di luar negara. Antaranya, alasan masalah keluarga.

Oleh karena tidak terdapat satu undang-undang yang sama dalam urusan nikah liar ini antara negeri dan menjadi polemik yang hebat dari segi hukum syara', maka penelitian ini adalah untuk menyelidik dengan lebih terperinci tentang nikah liar dan dampaknya terhadap masyarakat. Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi : **NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA: SATU KAJIAN DI RANTAU PANJANG, KELANTAN.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada faktor nikah liar dan dampaknya terhadap masyarakat terutamanya penduduk Rantau Panjang.

¹⁵ Muhammad Al Tarmiziy Bashar (Pegawai Agama Majlis Agama Islam Kota Bharu) Wawancara Kota Bharu, 9 Oktober 2011.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksana Nikah Liar dalam masyarakat Rantau Panjang?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah liar di Rantau Panjang?
3. Apakah dampak perkawinan liar terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan liar di Rantau Panjang?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah liar dalam masyarakat Rantau Panjang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah liar dalam masyarakat Rantau Panjang.
3. Untuk mengetahui dampak nikah liar terhadap masyarakat setempat, khususnya terhadap anak dan keluarga.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum syara' mengenai kawin liar di Rantau Panjang.

b) Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menambahkan pengetahuan penulis tentang masalah dan yang terkait dengan nikah liar.
 2. Untuk lebih bersikap terbuka dan hati-hati terhadap nikah liar
 3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana muda di UIN Riau.
- Ada beberapa manfaat dari penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berlokasi di Rantau Panjang, Kelantan.¹⁶

2. Subyek dan Obyek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sebagai:

Pasangan-pasangan suami istri yang melaksanakan nikah liar di Rantau Panjang, pemuka masyarakat (ulama atau imam) dan masyarakat sekitar yang mengetahui tentang nikah liar di Rantau Panjang.

Obyek penelitian ini adalah tentang nikah liar dan dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan.

3. Sumber Data

a) Primer

Yaitu yang diambil dari sampel penelitian

b) Sekunder

Yaitu diambil dari buku-buku, majalah yang terkait dengan masalah nikah liar.

¹⁶ Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Avyrouz, Yogyakarta, 2000), h. 79.

4) Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap data-data tahun 2010 di mana kasus yang terjadi sebanyak 25 kes. Penulis mengambil hanya 50% daripada kes tersebut untuk dijadikan sampel. Sampel tersebut penulis ambil menggunakan random sampling.

5) Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan data mengenai realiti nikah liar.

b. Angket

Angket dijadikan sebagai satu sumber kajian dan didistribusi untuk mendapatkan maklumat serta maklumbalas daripada responden.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah populasi di Rantau Panjang dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis¹⁸ (berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990, h. 174.

¹⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 135

6. Metode analisa data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode:

a. Deskriptif

Penyelidikan yang menuturkan, menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan.¹⁹

b. Induktif

Proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan bersifat khusus kemudian dibahas dengan pola berfikir yang bersifat umum.

c. Deduktif

Proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan bersifat umum kemudian dibahas dengan pola berfikir yang bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Lokasi penelitian di Rantau Panjang, Kelantan. Ruang lingkupnya adalah:

a. Penduduk

¹⁹ Winarno Surakhmad, *op.cit.*, h. 139

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 280.

- b. Agama
- c. Pendidikan
- d. Adat dan budaya

Bab III: Masalah perkawinan dalam Islam:

- a. Pengertian dan dasar hukum perkawinan
- b. Syarat-syarat dan rukun perkawinan
- c. Perkawinan yang dilarang
- d. Hikmah perkawinan

Bab IV: Bab ini menguraikan:

- a. Faktor penyebabnya terjadi perkawinan liar di Rantau Panjang, Kelantan
- b. Dampak perkawinan liar terhadap keluarga dan masyarakat di Rantau Panjang, Kelantan
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan Liar di Rantau Panjang, Kelantan

Bab V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini pada masa yang akan datang.

BAB II

PROFIL LOKASI KAJIAN DAN METODE ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi

1. Sejarah Berdiri

Rantau Panjang merupakan sebuah wilayah perbatasan antara Malaysia dan Thailand yang terletak di utara negeri Kelantan dalam kawasan barat jajahan Pasir Mas. Ia berada 39 kilometer di barat daya bandar Kota Bharu dan terletak berdekatan dengan Sungai Golok, Thailand.¹ Ia terkenal dengan pelbagai barangan jualan dan cenderahati. Pemeriksaan Unit Pencegah Penyeludupan, Jabatan Kastam dan Ekais Diraja, Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia menguatkuasakan sekatan di sekitar Rantau Panjang untuk menghindarik penyeludupan dadah, beras, gula, manusia dan sebagainya. Rantau Panjang dikenali ramai sebagai kawasan zon bebas cukai. Terdapat banyak pangkalan haram berada di sini untuk melakukan kegiatan haram dari sempadan.²

Rantau Panjang merupakan sebuah pekan yang bersempadan antara Malaysia dan Thailand yang terletak di utara negeri Kelantan. Ia berada 39 kilometer di barat daya bandar Kota Bharu dan terletak berhampiran dengan Sungai Golok, Thailand.

¹ Alias Muhammad, *Kelantan potitik dan dilemma pembangunan*, (Penerbitan Utusan Malayu (M) Bhd., Kuala Lumpur, 1975), h. 1.

² *Sejarah Ringkas: Kerajaan Jembal Kelantan, terbitan Pertubuhan Kerabat Raja Jembal Kelantan*, (Kota Bharu, Urusetia Jabatan Penerangan Kelantan). h.33

Rantau Panjang merupakan pekan kecil di tepi sempadan Malaysia dan Thailand. Sempadan antara kedua-dua negara hanyalah sebatang sungai, Sungai Golok.

Terletak kira-kira 45 km dari Kota Bharu, Rantau Panjang merupakan sebuah tempat yang terkenal dan sentiasa menjadi tumpuan ramai. Ia terkenal dengan pelbagai barangan jualan dan cenderahati.³

Rantau Panjang juga merupakan salah satu pintu masuk ke Malaysia dari negara Thai. Perkampungan ini dinamakan sempena susun atur perumahan panjang yang dibina semasa pembinaan landasan keretapi di selatan. Rantau Panjang membawa maksud '*perjalanan pencapaian yang panjang/lama*'.

Pelbagai tarikan terdapat di Rantau Panjang. Merupakan kawasan membeli-belah yang terkenal di Kelantan. Pengisytiharan sebagai Zon Bebas Cukai pada 2002, Telah menjadikannya sebagai pusat membeli-belah yang paling kerap dikunjungi pelancong setiap tahun di Kelantan terutama pelancong tempatan. Pelbagai barangan seperti peralatan elektronik, pakaian dan peralatan dapur boleh dibeli dengan harga yang murah dan berpatutan. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan membeli belah seperti *money changer*, mesin ATM dan sebagainya. Di samping menjadi tumpuan membeli-belah, Rantau Panjang juga merupakan pintu keluar masuk ke Thailand yang menghubungkannya dengan pekan Golok.

³ Rahmat bin Sharipan. *Pengembang Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1979).h.67

Sungai Golok yang menjadi sempadan Malaysia-Thailand adalah sempadan antarabangsa yang memisahkan Malaysia dan Thailand yang merentasi Kuala Perlis, Perlis di barat ke muara Sungai Golok⁴ di Pengkalan Kubur, Kelantan di timur. Sempadan ini wujud semenjak tahun 1909, berikutan Perjanjian Inggeris-Siam 1909. Di sempadan, terdapat barriers yang dibina oleh Malaysia dalam 1970-an, untuk mencegah penyeludupan.

Semasa Darurat Malaya dan perang dengan Komunis sehingga 1970-an, pemberontak komunis biasanya menyeberang masuk ke Thailand, balik semula ke Malaya (dan akhirnya Malaysia) untuk mengelakkan penangkapan oleh Malaya dan tentera the Komenwel.

Terdapat empat negeri yang bersempadan dengan Thailand. Daripada barat ke timur, mereka adalah Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Di sebelah Thailand pula terdapat empat wilayah iaitu daripada barat ke timur, mereka adalah Satun, Songkhla, Yala dan Narathiwat⁵.

Bandar Rantau Panjang adalah terletak bersempadan dengan Sungai Golok, Thailand merupakan pintu keluar – masuk dan pusat membeli belah yang utama di Jajahan Pasir Mas khususnya dan Negeri Kelantan amnya. Ianya boleh

⁴ Ibrahim Syukri. *History of the Malay Kingdom of Patani*. Center for International Studies, (Ohio University, Athens, Ohio, 1985). h. 66

⁵ Sa'ad Shukri bin Haji Muda, Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh & Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi. *Detik2 Sejarah Kelantan*. (Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, 1971).h. 43

dihubungi melalui laluan keretapi dan Jalan Pasir Mas – Rantau Panjang sejauh 25 km dan 40 km dari Kota Bharu.⁶

B. Geografi

Secara keseluruhannya mukabumi Rantau Panjang adalah mendatar dengan paras ketinggian antara 5 m – 10 m dari aras laut. Mukabumi seumpama ini sesuai untuk menampung sebarang pembinaan dengan kos pembangunan tanah yang minima. Tetapi dari sudut lain, ianya sering ditenggelami banjir akibat limpahan daripada air Sungai Golok. Akibat pembangunan tanah berlaku penambakan (filling) bagi meninggikan tapak untuk mengelak daripada ditenggelami air.

Pecahan guna tanah adalah sebagaimana berikut:-

| Kawasan | Km2 |
|----------------|----------------|
| Bandar | 37.6 |
| Pertanian | 1,426.5 |
| Paya | 527.1 |
| Terbiar | 304.8 |
| Rezab | 95.6 |
| Jumlah | 2,391.6 |

(Sumber : Jabatan Perangkaan Negeri *Kelantan*)

⁶ *Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995).h. 77

C. Ekonomi

Dalam aspek perkembangan ekonomi,⁷ wujudnya pertalian yang kukuh antara Rantau Panjang dengan bandar-bandar di Selatan Thailand terutama dalam sektor perniagaan dan perkhidmatan dimana Rantau Panjang dapat meraih faedah langsung daripada aktiviti tersebut. Kedudukan dan peranannya sebagai ‘transit point’ ke negara jiran menyemarakkan lagi sektor pelancongan untuk berkembang pesat.⁸ Penubuhan Majlis Tempatan Rantau Panjang merancakkan lagi pembangunan ekonomi. Majlis Tempatan Rantau Panjang telah ditubuhkan pada pertengahan tahun 1970an yang meliputi kawasan pekan Rantau Panjang dan sekitarnya dengan lingkungan 37.6 km persegi. Pada 1 hb. Januari 1979 berikutan penyusunan semula Penguasa Tempatan, pentadbiran Majlis Tempatan Rantau Panjang disatukan dibawah Majlis Daerah Pasir Mas. Kawasan majlis tempatan ini dikenali sebagai kawasan Majlis Daerah Pasir Mas Cawangan Rantau Panjang.

D. Penduduk

Mengikut bancian tahun 1991, penduduk Rantau Panjang adalah seramai 8,436 orang yang mana hampir 94% adalah Melayu. Kadar pertumbuhan tahunan adalah 2.6 % dan dijangkakan pada tahun 2010 akan meningkat kepada 13,752 orang. Pola penduduk adalah bertumpu di kawasan bandar dan sekitarnya.⁹

⁷ Abdul Halim Nasir, *Panduan ke tempat-tempat bersejarah Kelantan*, (Jabatan Muzium Negara, Kuala Lumpur, 1979), h. 15-32

⁸ *Ibid*, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu

⁹ Jabatan Perangkaan Negeri Kelantan, *Pecahan Kawasan Tanah di Kelantan*, (Kota Bharu, Dian Darulnaim, 2000), h. 39

E. Agama

Komposisi penduduk Rantau Panjang di Kelantan menempatkan seramai 90.1% penduduk Islam, Cina 2.2%, India 0.3% dan lain-lain (Siam) 8.2%. Ia sebuah kawasan mutlak bermajoriti Melayu sebagaimana semua kawasan lain di Kelantan.¹⁰

F. Pendidikan

Dari segi tahap pendidikan dapat dilihat dalam table dibawah:

Tabel 1
Tahap Pendidikan

| Tahap Pendidikan | Bilangan | % |
|---------------------|----------|-----|
| Ijazah Lanjutan | 6 | 24 |
| Ijazah Sarjana Muda | 10 | 40 |
| Diploma | 3 | 12 |
| Sekolah Menengah | 4 | 16 |
| Lain-Lain | 2 | 8 |
| Jumlah | 25 | 100 |

Dari table diatas menunjukkan tahap pendidikan responden, Paling ramai ialah kelulusan ijazah sarjana muda yaitu sebanyak 10(40%) diikuti dengan ijazah

¹⁰ *Ibid*

sarjana sebanyak 6(24%), sekolah menengah 4 (16%), diploma 3(12%) dan lain-lain sebanyak 2(8%)

G. Adat Istiadat

Kebanyakan adat istiadat di kawasan rantau panjang adalah mengikut tradisi Melayu dan bercampur dengan tradisi kesultan Pattani.¹¹

¹¹ Nik Muhammad b.Nik Mohd Salleh, *Jurnal sejarah Kelantan*, (Kota Bharu, Kelantan, 1975), h. 1-30.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.² Hal ini sejalan dengan firman Allah:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ()

¹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, 1, 1995, h. 56.

³ Q.S. Ar-Rum: 21, Departemen Agama R.I

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).⁴

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan)

⁴ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998*, hlm. 74.

Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.⁵ Allah SWT berfirman:

بِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ()

Artinya: “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat:49)⁶

Allah SWT juga berfirman:

يَحْنُ الَّذِي خَلَقَ الْآزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ()

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaa Sin: 36)⁷

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Ayat di atas, merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah,⁹ demikian juga al-qur'an Surah al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

⁵ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 270.

⁶ Q.S. Ad Dzariyat:49, Departemen Agama R.I

⁷ Q.S. Yasin:39, Departemen Agama R.I

⁸ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, h. 75.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diklat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002, h. 2.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ()

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman ...” (QS. Al-Baqarah: 221)¹⁰

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna (hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.

B. Keberadaan Wali dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.¹¹

¹⁰ Q.S. Al Baqarah: 221, Departemen Agama R.I

¹¹ Zuhaili, Wahbah. *Usul al Fqh al Islami*, jil. I, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat al-quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-baqarah ayat 221 .

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
 اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ()

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu habis masa idah mereka maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkawin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya. (al Baqarah:232)¹²

¹² Q.S. Al Baqarah: 232, Departemen Agama R.I

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut diatas kepada paham ulama dalam menetapkan kemestian adanya wali untuk masing-masing 4 kemungkinan perempuan tersebut diatas.¹³

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja. Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul, Keempat Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadist Nabi SAW. Yang artinya :

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ (غير صالح)

Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal (tidak sah)”

Bila ayah atau keluarga dekatnya tidak ada, maka Raja atau Amir atau penguasa dapat menjadi walinya. Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang lelaki yang bahkan tidak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada Wali dari keluarganya (Ayah atau keluarga lainnya),

¹³ Prof. Dr. Air Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 1998), h. 90-91

karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses “pros dan cons” dari tindakan itu.¹⁴

Si bapa dan datuk diberi hak mengawinkan anaknya yang bikir/perawan dengan tidak izin si anak lebih dahulu, dengan orang yang dipandangnya baik. Terkecuali anak yang saib (bukan perawan lagi) tidak dikawinkan melainkan dengan. izinnya lebih (dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak mengawinkan mempelainya melainkan sesudah mendapat izin dari mempelai itu-sendiri

Sabda Rasulullah Saw:

" يحق للمرأة أن أرملته "

Maksudnya:Telah berkata Rasulullah Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya". (Riwayat Daruquthni).

Sabda Rasulullah Saw:

منها ، انه . معها 6 الحديث 9 . "

Maksudnya:Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Saw. telah nikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun". Sepakat ahli hadis.

¹⁴ Prof. Abdul rahman I. DOI, ph.D, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (1998) h. 42-

Sabda Rasulullah s.a.w. yang maksudnya:

يشكو أنه كان متزوجا للسيدة العذراء قبل والدها انها لا . . .

Maksudnya: Dari Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. bahwa ia telah dikawinkan oleh bapanya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi s.a.w. memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni.

Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali yaitu :¹⁵

1. Wali mujbir
2. Wali Nasab
3. Wali hakim

1. Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)

Wali nikah yang mempunyai hak anak gadisnya menikah dengan laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kebolehan wali mijbir ini dengan syarat sebagai berikut :

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al- Jaziry, *al-Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, (t.t). h. 206-217).

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.
3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.¹⁶

2. Wali Nasab

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempuan.

Wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunan garis laki-laki.

3. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri) wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi.¹⁷

Adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.

¹⁶ Drs. Sudarsono, SH, *Bineka Cipta, Jakarta*, h. 202

¹⁷ *Ibid*, h. 204

2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam.
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
8. Wali aqrab ada tapi menolak untuk mengawinkannya (*adlal*).
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya atau ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.¹⁸

Akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi'i hakim tidak berhal mengawinkan anak gadis yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi aqad tersebut tidak mengikat, dan sudah si anak sudah baligh dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi'i dan Imamiyah sebab dalam keadaan seperti itu sang hakim telah melakukan *aqad fudhuli* (tanpa izin).

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang *sekufu* serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.

¹⁸ Drs. Ahmad Rofiq, MA, PT. (*Radja Grafindo Persada*, Jakarta, 1997) h. 88-89

Seluruh Mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah : baligh, Islam dan laki-laki. Adapun '*adalah*' adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hambali mensyaratkan '*adalah*' bagi setiap wali baik wali hakim maupun wali dekat.¹⁹

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar bapak, ia tidak memiliki hak *ijbar*.²⁰

Imam Abu Hanifah membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.

¹⁹ M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit : PT. Lentera Basritama, t.t). 349

²⁰ Imam Suyuthi, *Nuzhatul Muta`ammil wa Mursyidul Muta`ahhil fi al- Khathib wa al-Mutazawwij*, (Beirut : Dar Amwaj, 1989), h. 17

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah diantaranya *Al-Baqarah: 230,232,240*. serta mengartikan “*al-aima*” adalah “wanita yang tidak mempunyai suami” baik gadis maupun janda. Ditambah dengan hadits tentang kasus al-khansa’a yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui oleh Nabi.

Menurut Abu Hanifah persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Dasar yang digunakan imam Syafi’i adalah *Al-Baqarah:232, An-Nisa: 25,34*. serta beberapa hadits nabi.²¹

Menurut Syafi’i bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan “janda lebih berhak kepada dirinya”. Sehingga menurut Syafi’i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun

²¹ Asy-Syafi’i, Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah* (ed. Ahmad Syakir) Kairo:Mathba’ah al-Halabi, t.t.

perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kasus al-khansa'a.

Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus.²²

Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.²³

Dari kajian para fuqaha, dapat disimpulkan bahwa hanya Hanafiyah yang membolehkan wanita dewasa menikahkan diri sendiri, sedangkan tiga madzhab besar lainnya yakni Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarangnya. Dan hanya Hanafiyah yang mengharuskan adanya persetujuan mempelai secara mutlak, sedangkan lainnya mengakui adanya hak ijbar wali dengan variasi pandangan masing-masing.

²² Ibn-Qudamah, Abu-Muhammad Abd- Allah. *Al-mughni*. Vol. 1. (Beirut: *Dar al-kitab al-arabi*. 1983), h.70.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), h. 103

Jika kita cermati, penetapan hak ijbar didasarkan pada nash implicit (mafhum Mukhalafah) dari hadits “janda lebih berhak pada dirinya daripada wali”, sehingga paham kebalikannya adalah terhadap gadis maka wali yang lebih berhak. Padahal ada teks yang menunjukkan secara tegas tentang perlunya persetujuan dari mempelai, yakni pada kelanjutan hadits tersebut, “al-bikru yusta’dzanu”.

Dalam buku *Hukum perkawinan 1*, karya Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Disebutkan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik. Sehingga wali yang mempunyai pengalaman di butuhkan untuk memberikan saran-saran dan pemikiran berdasarkan pengalamannya, sementara wanita yang akan menjalani kehidupan rumah tangga diberikan kebebasan berdasarkan pada saran-saran dan pertimbangan wali.²⁴

Alangkah lebih baik dalam pembahasan tentang wali ini jika diulas hikmah-hikmah yang dikandung serta akibat - akibat yang terjadi jika wali memiliki hak ijbar atas mempelai dan jika gadis dewasa diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali. Serta membenturkannya dengan kondisi daerah yang bersangkutan saat ini.

Seandainya gadis dewasa diberikan hak secara mutlak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali, bisa dimungkinkan terjadinya perkawinan yang hanya sebagai permainan belaka. Atau jika

²⁴ Khoiruddin Nasution, , *Hukum Perkawinan Islam*, CV Gutama Jaya, Jakarta, 2002), h. 65

wali diberikan hak *ijbar*, maka bisa jadi ia menggunakan anaknya untuk mendapatkan kekayaan dengan menikahkannya dengan orang yang kaya.

Para Ahli Fiqih telah menetapkan beberapa *syarat menjadi wali nikah untuk perempuan*. ada beberapa syarat yang telah disepakati oleh Fuqoha' dan sebagian masih diperselisihkan. Adapun 4 syarat yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki

Maka tidaklah sah jika perempuan menikahkan perempuan yang lain karena Rasulullah -sholallahu 'alaihi wasallam- bersabda :

لا تزوج المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأةُ نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya : "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan tidaklah perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majjah dan Ad-Daruquthni)²⁵

Ibnu Qudamah mengatakan dalam al-Mughni : (jenis kelamin) laki-laki adalah syarat menjadi wali berdasarkan kesepakatan semua ulama.²⁶

²⁵ Al-Darqutniy, Abu'l-Hasan `Ali ibn `Umar al-Baghdadiy (died in AH 385). *Sunan al-Darqutniy*. 4 volumes. Revised by Sayyid `Abdullah Hashim al-Yamaniy al-Madaniy. Beirut: Dar al-Ma`rifah, AH 1386.

²⁶ Ibn Qudamah al-Hanbaliy, Abu-Muhammad `Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah (died in AH 620). *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybaniy*. 10 volumes. Beirut: Dar al-Fikr Publishers, 1st Edition, AH 1405.

2. Islam

Syarat ini harus ada dalam diri seorang yang menjadi wali perempuan untuk menikahkannya. karena orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi muslim, walaupun itu ayah kandungnya. Allah berfirman :²⁷

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman." (QS An-Nisa : 141)

Ibnu Al-Mundzir berkata dalam al-Ijma' : Ulama sepakat bahwa seorang kafir tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya yang muslimah.

3. Baligh

Tidaklah sah akad nikah yang mana anak kecil (belum baligh) yang menjadi wali karena ketidak mampuannya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya adalah Ats-Tsaury, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, Abu Tsaur, dan salah satu riwayat dari Ahmad. dan dalam riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa jika anak telah berumur 10 tahun maka dia bisa menikahkan, menikah dan mentalak. dan perkataan yang pertama (tidak sah anak kecil menjadi wali) adalah perkataan yang lebih kuat dan digunakan dalam fatwa-fatwa di madzhab hambali. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni : Anak kecil membutuhkan seorang wali (dalam berbagai hal) karena dia

²⁷ Q.S. An-Nisa : 141, Departemen Agama R.I

belum mumpuni. maka tidaklah bisa dia menjadi wali bagi orang lain.

4. Akal

Tidaklah sah akad nikah yang dilakukan oleh orang gila, yang hilang akalunya, dan orang yang mabuk. karena orang yang hilang akalunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia dapat memberikan manfaat bagi orang lain?! dan termasuk dalam orang yang hilang akalunya adalah, akan kecil yang belum *mumayyiz* dan orang tua yang telah lemah akal/ingatannya (pikun).

C. Kawin Liar Dalam Pandangan Perundangan

1. Dari segi perundangan

Dari segi perundangan pula, Akta Undang-Undang Keluarga²⁸ Islam Wilayah Persekutuan 1984 perlu dirujuk. Seksyen 23(1) telah memperuntukkan bahawa seorang laki-laki yang mahu berpoligami perlu memohon keizinan daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Jika dia berkahwin sebelum atau setelah gagal mendapatkan kebenaran tersebut maka tindakannya adalah salah di sisi undang-undang. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 123. Jika disabit kesalahan, beliau

²⁸ Siti Zubaidah Ismail. *Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di Malaysia: satu analisis*. Jurnal Syariah. Jil. 16 (Keluaran Khas), (Universitas Malaya, 2008), h. 86

boleh dijatuhi hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM1,000 atau kedua-duanya sekali.

Salah-satu efek perkawinan yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah adalah perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Tujuan pendaftaran ini bukan hanya satu formaliti bagi mendapatkan sijil nikah. Ia merupakan satu rekod yang mensahihkan bahawa perkawinan tersebut bukan sahaja menurut undang-undang negeri tetapi juga telah menepati hukum syarak.²⁹

Perkawinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah dari segi undang-undang. Ia bermaksud bahwa puan tidak akan mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah kelak. Puan tidak akan dibenarkan menuntut hak ke atas nafkah, hak penjagaan atau nafkah anak, dan lain-lain tuntutan sehingga perkawinan didaftarkan. Proses pendaftaran bukanlah satu perkara yang mudah terutama sekali sekiranya ia dilakukan di luar negeri, tanpa saksi yang dikenali atau suami enggan bekerjasama.

Sekiranya saudari mempunyai anak kelak tanpa sijil nikah yang sah ia mungkin akan menyukarkan proses pendaftaran kelahiran dan lain-lain proses yang memerlukan kesahihan bahawa suami adalah bapa.

Perkawinan poligami di luar negara atau negeri bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap ringan. Saudari tentu telah mendengar mengenai perkawinan sindiket yang dijalankan oleh kadi yang tidak bertauliah dan

²⁹ Zulkifli Hasan, *Undang-undang jenayah syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya*. (Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum USIM, 2007), h.37

menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah. Perkara ini bukan sahaja kerana pasangan tidak berhati-hati tetapi juga kerana berlaku satu penipuan. Perkawinan adalah satu tanggungjawab dan ia haruslah dipikul dengan sebaik-baiknya oleh pasangan. Apalagi di dalam perkawinan poligami kerana ada istri dan keluarga lain yang akan turut terlibat.

Lazimnya masalah berlaku apabila sesuatu perkawinan yang berlangsung tidak menepati apa yang digariskan oleh syariat yang akhirnya membawa kepada perceraian.

Dalam keadaan tertentu dapat didakwa di Mahkamah Syariah kerana menikah dengan tidak mengikut saluran undang-undang. Tanpa kita sedari atau tidak, wujud kesalahan berkaitan perkawinan yang sengaja dilakukan oleh masyarakat masa kini sehingga ada perkawinan yang dijalankan memberi kesan kepada kesahan sesuatu perkawinan sekiranya pernikahan itu tidak memenuhi rukun serta syarat digariskan hukum syarak.

Sebagai contoh seseorang yang berkawin lagi satu tanpa mendapat kebenaran mahkamah serta seseorang yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan bahwa syarat rukun pernikahan sudah dipenuhi sedangkan wujud undang-undang yang mengatur peraturan tertentu yang mereka pandang remeh.³⁰

³⁰ *Ibid.* Zulkifli Hasan, h.43

Hakikatnya di dalam akta maupun Enakmen Undang-Undang Keluarga setiap negeri, ada memperuntukkan kesalahan mengenai perkawinan serta menetapkan hukuman tertentu bagi kesalahan tertentu.

Sekiranya kita merujuk kepada peruntukan undang-undang sebagai misalnya, Seksyen 40 (1) (a) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan sekiranya seseorang itu mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkawinan tanpa ada kebenaran berkawin.

Keadaan ini berlaku terhadap seseorang itu sama ada imam jurunikah tanpa mengira imam itu mempunyai tauliah atau tidak atau bapa dari wanita yang hendak dikawinkan atau sesiapa saja yang menjalankan sesuatu pernikahan atau menjalankan upacara perkawinan. Perbuatan itu adalah tanpa kebenaran undang-undang dan menjadi kesalahan yang perlu dihukum denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.³¹

Nikah liar dan prosedur nikah di luar negara harus mengambil kira keperluan untuk mendaftarkan perkawinan itu bila kembali ke Malaysia selepas *nikah di Thailand*.

³¹ Abdul Halim El-Muhammady, *Undang-undang jenayah dalam Islam dan enakmen negeri-negeri*. (Selangor : Wadah Niaga Sdn.Bhd. 1998), h. 53

Oleh itu, nikah Siam bukan hanya akad nikah di Thailand dan pengeluaran sijil, tetapi juga melibatkan pengesahan sijil oleh Majlis Agama Islam di Wilayah berkenaan, dan seterusnya mendapat surat pengesahan dari Konsulat Malaysia bagi Selatan Thai. Surat pengesahan perkawinan dari Konsulat di Selatan Thai ini diperlukan untuk pendaftaran perkawinan nanti.

Nikah liar, satu istilah yang biasa digunakan masyarakat Islam merujuk kepada pasangan yang bernikah secara senyap di sempadan negara atau melalui sindiket di dalam negara sendiri. Dewasa ini, fenomena itu nampaknya semakin menjadi-jadi.

Istilah ‘nikah liar’ bukannya bermaksud menikah sambil berlari tetapi ia merujuk kepada pernikahan yang dijalani oleh pasangan dalam keadaan mereka melarikan diri daripada prosedur biasa Mahkamah Syariah. Biasanya mereka lari ke negara jiran untuk bernikah secara mudah.

Perbuatan nikah liar³² dikira sebagai kesalahan di dalam dua keadaan. Keadaan pertama adalah sekiranya akad nikah itu dijalankan di hadapan imam jurunikah terbabit tanpa kehadiran dua saksi yang boleh dipercayai dan dua saksi itu hendaklah tidak termasuk orang yang mengakadnikah itu.

Ini bermakna sesuatu perkawinan itu mesti dihadiri dua saksi yang boleh dipercayai dan sesuatu pernikahan itu tidak boleh dijalankan tanpa

³² *Ibid*

kehadiran dua saksi kerana dua saksi adalah rukun kepada perkawinan selain daripada suami istri, wali serta ijab kabul.

Keadaan kedua pula adalah apabila akad nikah itu dijalankan tanpa kebenaran jika perkawinan itu membabitkan seorang perempuan yang bermastautin di luar Negeri Kelantan. Persoalannya apakah yang dimasukkan dengan tanpa kebenaran itu?

Dimaksudkan dengan tanpa kebenaran itu adalah apabila sesuatu perkawinan dijalankan tanpa mendapat kebenaran Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (Pendaftar).³³ Dimaksudkan dengan kebenaran adalah di dalam keadaan pendaftar berpuas hati bahawa sahnya perkawinan yang dicadangkan itu dari segi rukunnya serta di dalam keadaan seseorang laki-laki itu sudah berkawin bahawa suatu kebenaran mahkamah untuk laki-laki itu berpoligami, diberikan.

Sesuatu akad nikah dikira sebagai tidak mendapat kebenaran pendaftar sekiranya sesuatu kebenaran tidak diberikan jika pendaftar tidak berpuas hati dengan keadaan di atas. Selain itu juga suatu perkawinan tidak dikira sebagai mendapat kebenaran di dalam keadaan antaranya jika suatu perkawinan yang dicadangkan itu membabitkan pasangan bawah umur minimum untuk perkawinan.

Di bawah umur minimum ini bagi laki-laki adalah kurang daripada 18 tahun dan bagi perempuan kurang 16 tahun. Di dalam keadaan ini kebenaran

³³ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 76

hakim syarie diperlukan dan tanpa kebenaran hakim syarie ini, tiada kebenaran untuk berkawin boleh diberikan. Rujukan kepada dan tindakan oleh hakim syarie ini juga diperlukan di dalam keadaan jika pihak perempuan tidak mempunyai wali daripada nasab mengikut hukum syarak.

Setiap perkawinan ditetapkan syarat dan undang-undang³⁴ yang perlu dipatuhi agar perkawinan itu sah dari sudut hukum syarak dan undang-undang. Oleh yang demikian, sesuatu perkawinan tidak boleh berlawanan dengan Bahagian II ini yang menggariskan panduan bagi tujuan perkawinan iaitu orang yang boleh mengakadnikahkan perkawinan, umur minimum untuk perkawinan, pertalian yang melarang perkawinan, orang dari agama lain, perkawinan tak sah, perkawinan seseorang perempuan dan lain-lain lagi.

Kini ramai pasangan mengambil jalan mudah dengan tidak ambil peduli akan kesan melakukan kesalahan berkaitan perkawinan ini. Kita bukan saja menginginkan perkawinan yang bertepatan pada hukum syarak semata-mata tetapi juga perkawinan mengikut undang-undang negara ini agar segala urusan akan dipermudahkan. Undang-undang perlu bagi mengatur hidup manusia agar kita tidak membuat suatu perkara yang boleh memberi kesan buruk kepada orang lain.

Sekiranya pengantin perempuan tidak mendapat persetujuan ayahnya untuk menikah, seharusnya dia tidak melanggar kehendak ayahnya. Hal ini berikutan daripada status seorang ayah yang merupakan seorang wali mujbir

³⁴ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 79

yang berkuasa untuk mengahwinkan anak perempuannya (jika anak dara) ataupun melarangnya berkawin dengan mana-mana laki-laki yang difikirkannya tidak bersesuaian. Jika anak tersebut bertegas untuk menikah, maka pernikahannya adalah tidak sah (kerana tidak mendapat keizinan walinya).

Walaupun bagaimanapun, anak perempuan tersebut boleh membuat aduan kepada Mahkamah Syariah yang berdekatan mengenai masalah tersebut. Pihak mahkamah akan membuat keputusan mengenai permohonan anak perempuan tersebut selepas dilakukan siasatan ke atas ayahnya kenapa dan mengapa beliau tidak mengizinkan anaknya berkawin dengan laki-laki tersebut dan membuat pertimbangan mengenainya.

Bidang kuasa Peruntukan sudah pun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam³⁵ yang memperuntukkan bahwa, “Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada – (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syarak; atau (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali Raja mengikut

³⁵ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 84

Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi”.

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.

Dalam keadaan ini, sekiranya perkahwinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

Wajar untuk diketahui bahwa, pasangan yang hendak berkawin tetapi kehendak mereka tidak direstui oleh orang tua, dalam keadaan mereka menganggap bahwa perhubungan tersebut tidak ada cacat celanya dari segi Syarak dan adat, undang-undang sebenarnya memberikan ruang yang selesa kepada mereka untuk meneruskan hasrat mulia tersebut.³⁶

Walaupun pada dasarnya doa restu orang tua itu sangat penting dan menjadi batu asas sesebuah perkawinan yang hendak didirikan, akan tetapi

³⁶ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 79

garis panduan yang telah diberikan agama itu sebenarnya lebih mengatasi pertimbangan dan kata hati sesiapa. Melalui pandangan para ulama, soal kufu atau sifat padan pasangan itu sepatutnya menjadi neraca untuk memilih pasangan. Pandangan para ulama bersifat sangat bernas untuk dijadikan sebagai panduan.

Seandainya hubungan tidak direstui disebabkan hal-hal yang remeh-temeh dan ia dibangkitkan oleh ahli keluarga, kawin lari bukanlah penyelesaian yang bijak kerana Mahkamah Syariah bersedia untuk mendengar permohonan bagi kes seumpama ini.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Seksyen 13(b) sebelum ini, sekiranya wali enggan memberikan persetujuan tanpa alasan yang sempurna, Mahkamah akan membenarkan perkawinan yang diniatkan itu untuk diteruskan dengan menggunakan wali hakim. Inilah jalan penyelesaian yang sebenar, iaitu membawa masalah ke muka pengadilan. Di sini tidak timbul soal menjadi anak derhaka atau membelakangi orang tua kerana undang-undang mengatasi semua orang dan setiap orang tertakluk kepada undang-undang. Tanpa mengira siapa pun seseorang itu, ia perlu mematuhi undang-undang dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah.³⁷

Penyelesaian perlu dibuat bagi mengatasi masalah yang tidak kunjung surut ini dan salah satu jalan penyelesaiannya ini adalah dengan menjalankan

³⁷ *Ibid*, Abdul Halim El-Muhammady, h. 80

kajian imperikal mengenai hukum 'kawin lari'.³⁸ Kajian ini kemudian seharusnya dipanjangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dengan melihat semula hukum yang telah dikeluarkan pada Fatwa Kebangsaan Malaysia Kali ke-52, iaitu pada tahun 2002 yang lalu.

³⁸ _____ (2004). *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia: Sebelum Dan Menjelang Merdeka (The Administration Of Islamic Law In Malaysia: Before And The Coming Of Independence)*. Kuala Lumpur: Utusan Publications And Distributors.

BAB IV

NIKAH LIAR DAN DAMPAKNYA DI RANTAU PANJANG, KELANTAN, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Nikah liar di Rantau Panjang

Isu pernikahan di luar negara semakin hangat pada awal tahun 2003 ketika Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan akan memudahkan laki-laki berpoligami termasuk melonggarkan syarat seperti tidak memerlukan izin istri pertama bagi menyekat laki-laki di negara ini pergi ke Thailand untuk bernikah.¹ Gambaran yang diberikan dari laporan akhbar seolah-olah setiap pasangan yang bernikah di luar Negara (khususnya Thailand) adalah pernikahan poligami atau nikah liar, sedangkan kemungkinan banyak lagi sebab-sebab lain yang mendorong pasangan tersebut bernikah di luar negara.

Sejumlah pasangan yang melangsungkan akad nikah di Rantau Panjang, melakukan perkawinan dengan cara yang boleh disifatkan sebagai 'mistri'. Mistri karena terkadang pernikahan mereka tidak diketahui oleh keluarga terdekat, jiran tetangga dan tidak ada dokumen yang sah yang menunjukkan pernikahan tersebut. Ini mungkin disebabkan pernikahan tersebut dilakukan di luar negara tanpa pengetahuan pihak berkuasa agama atau dinikahkan secara sindiket atau

¹*Berita Harian*, 7 Januari 2003.

pernikahan yang sengaja disembunyikan bagi satu tujuan dan kepentingan mereka.

Nikah di luar negara dibenarkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 tetapi dimestikan mendapat izin pihak berkuasa agama terlebih dahulu. Sekiranya dilakukan tanpa izin ia boleh dituduh telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 39 enakmen di atas dan dapat dihukum dengan denda tidak melebihi RM 1 ,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.²

Bahkan jika melibatkan poligami, pasangan tersebut boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM1,000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 122 enakmen yang sama.

Nikah liar dalam kenyataannya banyak terjadi di Thailand yang dilakukan oleh pelbagai masyarakat terutama dari Malaysia khususnya Kelantan kerana daerahnya bersempadan (perbatasan) dengan Thailand. Dalam tiga tahun terakhir data menunjukkan bahwa nikah liar di Thailand yang dilakukan oleh masyarakat Kelantan semakin banyak. Hal ini dapat dibuktikan dari data isbat nikah yang ditetapkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Pasir Mas. Sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

²Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin, *Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM, 2002), h. 237

Tabel 2

Jumlah permohonan '*Ishat Nikah*' di Mahkamah Syariah Pasir Mas,
Kelantan dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

| Bil | Bulan | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 1 | Januari | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Mac | 1 | 1 | 5 |
| 4 | April | 1 | 10 | 4 |
| 5 | Mei | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Jun | 3 | 9 | 7 |
| 7 | Julai | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Ogos | 3 | 5 | 5 |
| 9 | September | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Oktober | 1 | 0 | 7 |
| 11 | November | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Disember | 0 | 8 | 5 |
| | Jumlah | 16 | 39 | 54 |

Sumber : Data di Mahkamah Syariah Pasir Mas 2010

Tabel 2 di atas menunjukkan jumlah permohonan mendaftar semula pernikahan di Mahkamah Syariah Pasir Mas setelah pasangan yang bernikah di Thailand nikah liar atau tanpa kebenaran. Jumlah nikah liar sentiasa meningkat bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Beberapa faktor yang mendorong pasangan menikah tanpa kebenaran di luar negara.

Kebanyakan kasus pernikahan yang menyalahi aturan di luar negara dikaitkan dengan alasan masalah keluarga. Ini merangkumi masalah ketidakizinan keluarga sendiri seperti wali tidak bersetuju dengan calon suami, wali sengaja enggan menikahkan dengan pelbagai alasan sendiri, orang tua atau ahli keluarga tidak merestui pernikahan tersebut disebabkan masih dalam masa pendidikan, tidak sedarjat atau pihak keluarga telah menentukan calon yang lain sebagai pasangannya. Kesan ketidakizinan keluarga ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna atau mengikut proses yang biasa dilakukan. Akibatnya, pasangan tersebut mengambil jalan lain iaitu menikah di luar negara untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Terdapat banyak kasus yang terjadi di Thailand yang melakukan nikah liar, dan mereka telah mendaftarkan di Mahkamah Syariah Pasir Mas untuk mengisbatkan nikahnya diantaranya adalah:

Kasus pertama, Kasus bil : *J/MRIR/ 109/02* di antara pemohon pertama Fared bin Maslan dan pemohon kedua Norazian binti Sapaah. Pemohon-pemohon telah menikah di Wilayah Yala, Thailand pada 17 Juli 2008 dengan menggunakan wali hakim. Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan yang mendorong pasangan menikah di Wilayah Yala Thailand ialah keluarga perempuan telah memutuskan pertunangan setelah mengetahui bahwa pihak laki-laki adalah seorang penagih dadah (terlibat narkoba).³ Memandangkan pihak perempuan telah tinggal serumah dengan pihak laki-laki maka perkara ini mendorong pasangan bertekad untuk menikah di luar negara tanpa pengetahuan

³Data Mahkamah Syariah Pasir Mas, Unit Penerbitan, (Pasir Mas, 2010) *J/MRIR/ 109/02*

ahli keluarga masing-masing. Setelah menikah barulah mereka mendaftarkan (mengisbatkan) nikahnya di Mahkamah Syariah Pasir Mas.

Kasus kedua, Kasus Mal bil: 01 003-010-387/03 di antara pemohon pertama Suhaimi bin Md. Said dan pasangannya pemohon kedua iaitu Sharifah Ainon bt Syed Abbas. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkla, Thailand pada 4/10/2009 dengan menggunakan wali hakim. Kedua-duanya warganegara Malaysia dan masih bujang. Alasan pasangan menikah di Wilayah Songkla, Thailand ialah karena kedua ibu bapa pihak perempuan tidak setuju dengan pilihan anaknya yang bukan dari keturunan ' Syed ' seperti mereka dan seterusnya wali beliau enggan mewalikan. Pasangan juga menyatakan bahwa mereka pernah membuat permohonan menikah di Pejabat Agama Temerloh Pahang namun permohonan mereka tidak di layan.⁴

Sejumlah pasangan yang menikah di luar negara adalah disebabkan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami baik pihak perempuan dalam pernikahan itu menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Oleh karena permohonan poligami di Malaysia pada umumnya dimestikan mendapat izin Mahkamah Syariah, terdapat pasangan yang mengambil jalan mudah dengan melakukan pernikahan mereka di luar negeri, alasan yang diberikan termasuklah mendapat tentangan istri yang telah ada, tidak mahu istri pertama mengetahui atau mengelak dari diketahui pihak-pihak tertentu seperti majikan, kaum keluarga atau pihak berkuasa agama tempatan.

⁴Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01 003-010-387/03

Di antara kasus nikah liar yang disebabkan oleh poligami seperti contoh kasus dibawah ini :

Contoh pertama, Kasus Mal bil: 01003-010-390103/05 di antara pemohon pertama Mohd Shah bin Md Akib dan pemohon kedua seorang warganegara Indonesia selaku pasangannya iaitu Maikalsum bt. Abdul Latif. Ini adalah pernikahan ketiga bagi Mohd Shah bin Md Akib yang telah mempunyai dua orang istri sedia ada yang kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah bernikah di Wilayah Narathiwat, Thailand dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki yang mendorong beliau bertekad untuk bernikah di Wilayah Narathiwat, Thailand ialah karena terlalu banyak syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk menikah di Malaysia dengan warganegara asing ditambah lagi dengan prosedur Mahkamah yang perlu dipatuhi karena beliau berpoligami, Beliau juga menyatakan bahwa beliau sukar mendapatkan izin dari pejabat tempat beliau bertugas.⁵

Contoh kedua, Kasus Mal bil: 01003-010-274/03 di antara pemohon pertama Musannif bin Abdullah dengan pasangannya selaku pemohon kedua Nor Hayati binti Othman. Kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah di Patani, Thailand pada 28 Juni 2008 dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pasangan menikah di Wilayah Patani, Thailand ialah prosedur

⁵Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2010 bil: 01003-010-390103/05

permohonan poligami di negeri Kelantan ini adalah sukar. Beliau juga menyatakan bahwa hubungan istri pertama dengan istri kedua ini adalah baik.⁶

Contoh ketiga ialah Kes Mal bil: 01003-010-333/03 di antara pemohon pertama Syed Othman bin Syed Abdullah dengan pasangannya selaku pemohon kedua ialah Ema Malisa binti Bogi. Kedua-duanya warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah di Wilayah Songkhla, Thailand pada 3 Januari 2008 dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki ialah karena istri pertamanya tidak setuju dan prosedur permohonan poligami adalah sukar sedangkan beliau amat memerlukan zuriat karena sehingga kini beliau belum dikurniakan zuriat.⁷

Peraturan Pernikahan di negeri Kelantan melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990 yang antara lain bertujuan menyusun atur dan mengawal isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. Bagaimanapun, terdapat segelintir rakyat negeri Johor yang beranggapan peruntukkan undang-undang yang telah ditetapkan adalah sangat menyusahkan dan membebankan. Umpamanya peraturan yang mensyaratkan setiap pasangan yang hendak bernikah membeli borang, mengisi dan melengkapkannya, menghadiri kursus pra perkawinan, mendapatkan surat akuan bujang, surat akuan mastautin, surat pengesahan HIV, surat pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara bagi pemegang Penduduk Tetap, menghadiri temu bual dan sebagainya yang memerlukan pengorbanan masa, tenaga dan wang.

⁶Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-274/03

⁷Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-333/03

Malah bagi kasus-kasus tertentu ia akan dirujuk ke Mahkamah Syariah dan kelulusan seperti kes wali enggan, permohonan poligami dan kasus yang bersangkutan dengan perceraian. Bagi sesetengah pasangan, peraturan-peraturan ini sangat membebankan dan menjadi penghalang utama hasrat mereka untuk menjadi pasangan suami istri. Sebagai langkah alternatif, mereka keluar Malaysia dan menikah di sana dengan anggapan proses pernikahan di sesetengah negara luar itu lebih mudah untuk dilakukan berbanding di dalam negara sendiri.

Contoh kasus pula ialah Kasus Mal bil : 01003-0 10-330/03 di antara pemohon pertama Daud bin Omar dan pemohon kedua selaku pasangannya Fatimah binti Ismail. Kedua-duanya adalah warganegara Malaysia. Pasangan telah menikah pada 26 Januari 2010 di Wilayah Narathiwat, Thailand dengan menggunakan wali abang kandung. Alasan suami menikah di Wilayah Narathiwat, Thailand karena beliau menghadapi masalah tiada surat pengesahan cerai dengan istri pertamanya kerana beliau tidak pernah ke Pejabat Agama Daerah untuk mendaftarkan perceraian beliau. Oleh itu untuk mengelakkan proses Mahkamah yang perlu beliau lalui untuk mendapatkan sijil cerai beliau mengambil jalan mudah dengan menikah di Thailand.⁸

Menurut seorang Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, khidmat nikah, kawin, poligami, wali hakim dalam masa 1 jam sahaja yang dibuat di Pejabat Majlis Agama Wilayah Narathiwat. Kawasan ini aman dan tenteram tanpa sebarang perintah darurat. Tiada ancaman banjir seperti di wilayah- wilayah lain.

⁸Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

Penduduk di sini juga masih menggunakan bahasa Melayu dan Ringgit Malaysia dalam urusan seharian.⁹

Wilayah Narathiwat mempunyai Pejabat Agama yang terletak hanya 1 jam sahaja perjalanan dari Kompleks Imigresen Malaysia. Jangan percaya dengan kenyataan dari pihak tidak bertanggungjawab (sendiket ambil upah mahal hingga ke RM3,000) kerana semua nikah yang dibuat dalam Pejabat Agama Narathiwat adalah sah dan diiktiraf. Perkara ini telah disahkan oleh Pejabat Agama di Malaysia dan di Thailand.

Masyarakat hendaklah menghindari menikah di tempat yang tidak rasmi seperti rumah kadi, masjid dan kedai makan kerana pasangan berisiko ditipu oleh Sindiket Nikah (calo nikah) yang tidak diiktiraf. Contohnya Majlis Agama Narathiwat telah mengeluarkan pekeliling menyatakan nikah di wilayah tersebut hanya boleh dibuat dalam Pejabat Agama, tidak boleh ditempat lain kerana terlalu banyak penipuan. Tidak sah nikah jika akad dibuat di Malaysia oleh kadi dari Thailand.

Menurut Sulaiman Yahasok¹⁰ beliau telah membawa lebih dari 100 pasangan tanpa sebarang masalah untuk mendaftarkan pernikahan di Malaysia dengan kadar upah yang lebih rendah yaitu (RM 1500- RM 2000). Kadi Wilayah Narathiwat terdiri daripada tokoh terkenal seperti Doktor, Pengetua Sekolah, Tuan Guru, Dato, Senator dan Pegawai Majlis Agama akan menjadi saksi nikah. Sijil Nikah akan terus diserahkan selepas akad.

⁸Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

¹⁰ Sulaiman Yahasok (Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 28 Oktober 2011

Kendaraan disediakan dari Rantau Panjang ke Narathiwat, beliau sendiri menguruskan segala urusan hingga selesai, bukannya melalui pihak ketiga atau agen.

Menurutnya lagi adalah menjadi satu kebiasaan di Rantau Panjang menjadi tempat pasangan yang mau nikah liar karena pernikahan mengikut jalan biasa mempunyai berbagai masalah, lalu pasangan yang ingin bernikah menggunakan Rantau Panjang dengan mencari agen sebegitu sebagai tempat nikah liar.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah liar yang sudah banyak terjadi di dalam masyarakat khususnya di negeri sempadan, dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3

Nikah liar sudah menjadi menjadi satu budaya

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 11 | 55 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 9 | 45 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 3 menunjukkan responden mengatakan tidaksetuju sebanyak 11(55%) dan setuju 9(45%). Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju bahwa nikah liar adalah bukan satu trend. Nikah liar sememangnya banyak yang didaftarkan di pejabat qadhi daerah Pasir Mas apabila selesai urusan pernikahan di Thailand karena pasangan yang bernikah akan mencari orang atau pihak tertentu untuk menyelesaikan urusan daftar nikahnya di Malaysia.¹¹

Nikah Liar yang dilakukan di pejabat agama setempat dan ada pula yang tidak dilakukan di Pejabat agama yang lebih terkenal dengan istilah lain yaitu Nikah Sendiket. Apakah masyarakat menyetujui bentuk pernikahan tersebut :

Tabel 4

Bagaimana pandangan bapa/ibu tentang adanya nikah liar yang mempunyai sindiket (calo)

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 16 | 80 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 4 | 20 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹¹ Supian Sori (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dari tabel 4 di atas didapati 16(80%) tidak setuju dan 4(20%) setuju. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden tidak bersetuju tentang nikah liar yang mempunyai sendiket tertentu. Artinya nikah yang dilakukan secara sirry, yang sesuai dengan hokum fikah tetapi tidak sesuai dengan hokum Negara dan tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang rasmi.

Memang nikah liar ini tidak dapat lari dari sendiket tertentu yang memang mengatur urusan pernikahan supaya mudah dan lancar dari permulaan urusan hingga selesai urusan nikahnya, yaitu dari urusan imigresen hinggalah urusan akad nikah di Thailand dan urusan pendaftaran semula pernikahan di Malaysia.¹²

Dapat dilihat berlakunya nikah liar ini telah menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat, namun telah menimbulkan satu perkara yang boleh menjatuhkan maruah keluarga. Oleh karena banyak kasus kawin liar yang dikendalikan oleh pelbagai sendiket melalui Rantau Panjang justru itu table 3 dibawah ini dapat memperlihatkan bagaimana jawaban daripada masyarakat mengeni isu kawin liar ini yang dianggap menjatuhkan maruah keluarga.

¹²Muhammad Noor Saman (Pegawai Pencegah Penyeludupan, Rantau Panjang, Kelantan)
Wawancara, 29 Oktober 2011

Tabel 5

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nikah liar akan menjatuhkan maruah keluarga.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 10 | 50 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 10 | 50 |
| | JUMLAH | 28 | 100 |

Dari tabel 5 di atas didapati 10(50%) setuju dan 10(50%) sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden memberi pendapat bahwa nikah liar menjatuhkan maruah keluarga.

Selalu berlaku maruah keluarga tercalar karena pernikahann tanpa izin wali bapa ini. Seterusnya banyak kedengaran di mahkamah berlakunya tuntutan seperti fasakh dari pihak keluarga perempuan akibat nikah liar ini.¹³

¹³ Ismail Hasim Mehat (Pegawai Pendaftar Mahkamah Syariah Pasir Mas, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Kasus Mal bil: 01003-010-333/08 Maria dan Hafiz merupakan teman sepejabat. Mereka bercadang untuk bernikah karena sudah lama mengenali antara satu sama lain. Ibubapa Maria tidak bersetuju karena mereka tidak menyukai perangai Hafiz yang tidak baik dalam beragama karena ditakuti ia tidak dapat memimpin anak mereka ke jalan yang soleh. Maria dan Hafiz pula tidak mempunyai latarbelakang pendidikan agama. Tidak seperti Maria, Hafiz tidak pernah mengikuti kelas agama yang dianjurkan oleh jabatan mereka setiap bulan. Bagi Hafiz, seseorang itu tidak dilihat baik daripada zahirnya, tetapi apa yang ada di hati itulah yang utama. Namun, karena terlalu cintakan kekasihnya, Maria setuju bernikah lari di Rantau Panjang yang menyediakan sendiket nikah liar tanpa memeriksa tentang kredibiliti serta kompetensi pihak yang mengakadnikahkan mereka. Hanya dengan RM 1,500, mereka “sah” menjadi suami istri dengan diberikan “sijil nikah” yang meragukan. Setelah beberapa tahun, mereka dikurniakan seorang anak yang kini berumur 3 tahun. Maria berhenti kerja atas alasan ingin memberi tumpuan kepada anak dan keluarga. Namun, Hafiz mula menjalin hubungan intim dengan rakan sepejabatnya yang juga rakan sekerja Maria sebelum ini. Ketika mengetahui perkara tersebut. Maria memarahi Hafiz sehinggakan Hafiz menceraikannya dengan talak tiga sekaligus. Kini Maria bingung karena tiada tempat hendak mengadu lantaran ibu bapa serta saudara maranya telah memulaukannya. Beliau tidak mempunyai wang untuk kehidupan seterusnya. Hafiz pula telah mengahwini teman wanitanya dan kini tinggal jauh daripada rumah Maria. Maria menangis mengenangkan nasibnya yang malang itu. Akhirnya Maria kembali semula kepada orang tuanya.

Kemudian keluarganya mencari Hafiz untuk melunaskan masalah yaitu mereka telah memukul hafiz karena mengabaikan istri serta tidak menepati janji yang dilakukan sebelum kawin untuk menjaga Maria. Hafiz telah cedera teruk dan keluarga hafiz telah membawa kasus ke mahkamah karena kecederaan yang telah dialami oleh Hafiz. Natijahnya dapat dilihat bahwa akibat nikah liar yang dilakukan dan membawa kepada kehancuran rumahtangga yang akhirnya membawa kepada komplik keluarga kedua pihak.

Melihat perkembangan nikah liar yang semakin hari semakin meningkat khususnya, dilihat pada dari tanggapan responden tentang masalah ini, sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 6

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nikah liar yang semakin leluasa di Rantau Panjang.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 12 | 60 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 8 | 40 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 6 menunjukkan 12(60%) tidak setuju dan 8(40%) setuju. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya nikah liar semakin berleluasa walaupun ada juga responden yang memberi respon sebaliknya. Artinya kasus – kasus nikah liar tersebut sekalipun banyak terjadi tetapi tidaklah merajalela dan membahayakan terhadap keamanan dan ketertiban.

Kejadian ini semakin hari bertambah¹⁴ bilangannya akibat peraturan yang ada tidak dikuatkuasa sepenuhnya yaitu menghalang sendiket menguruskan dengan mengenakan syarat yang lebih ketat lagi untuk nikah liar di Thailand oleh pihak berkuasa.¹⁵

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa nikah liar adalah ikutan pernikahan yang melanggar hukum atau undang-undang sivil ,tapi apakah nikah liar tidak sesuai dengan hukum syarak, ini dapat dilihat pada tabel 7:

¹⁴ Abdul Fatah shafie (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

¹⁵ Zulkifli Mahusain (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Apakah masyarakat menyetujui perbuatan ini hanya terdorong melakukannya untuk kepentingan sendiri ini dapat dilihat dari tabel 8 di bawah ini :

Tabel 7

Nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 11 | 55 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 9 | 45 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Tabel 7 mencatatkan 11(55%) setuju dan 9(45%) sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa responden bersetuju bahwa nikah liar banyak didorong oleh hawa nafsu.

Sememangnya banyak pasangan yang nikah liar ini terdorong mengikut hawa nafsu sehingga membelakangkan orang tua mereka dalam urusan pernikahan ini yang dapat menjatuhkan maruah keluarga bagi pasangan yang menikah liar tersebut.¹⁶

¹⁶ Muji Abbas (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Tindakan pasangan yang melakukan nikah liar ini merupakan bukan satu langkah yang bijak, mereka yang melakukannya adalah orang yang terdesak dan pendek akal nya yang hanya berpandangan pada waktu yang singkat bukan kepada waktu yang panjang. Dari table di bawah ini dapat kita lihat, apakah masyarakat menyetujui tentang nikah liar merupakan bukan jalan bijak.

Tabel 8

Bagaimana pendapat responden tentang nikah liar bukanlah penyelesaian yang bijak.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 8 | 40 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 12 | 60 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Dalam tabel 8 sebanyak 8(40%) setuju dan 12(60%) sangat setuju bahwa isu nikah liar adalah suatu jalan yang tidak begitu bagus dalam masyarakat.

Nikah liar didapati tidak berapa sesuai dalam konteks masyarakat yang berhemah dan ingin menjaga keharmonian masyarakat supaya dipandang tinggi karena peradaban dan tingkahlaku masyarakatnya.¹⁷

Ada golongan yang menyembunyikan pernikahannya yang kali kedua dari pengetahuan istri yang pertama ,ada juga yang bekerja kerajaan yang tidak boleh berpoligami telah mengambil langkah nikah liar ini. Namun adakah masyarakat yang menyetujui nikah liar yang disebabkan poligami ini, sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9

Bagaiman pendapat bapak/ibu tentang nikah liar banyak disebabkan oleh poligami.

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 5 | 25 |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | 11 | 55 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 4 | 20 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁷ Aziz Deraman (Pegawai Kaunseling, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Tabel 9 menunjukan (25%) tidak setuju, 11(55%) setuju dan 4(20%) sangat setuju yaitu kebanyakan nikah liar banyak terjadi disebabkan faktor poligami.

Keadaan kasus yang banyak berlaku adalah disebabkan adanya pasangan yang berpoligami dan berkemampuan pendapatan laki-laki yang mau nikah liar bersama pasangannya.¹⁸

Keengganan wali memberi keizinan untuk bernikah menyebabkan anak si bawah jagaan mereka telah melakukan nikah liar ini, ini dapat dilihat did alam table di bawah ini sejauh manakah masyarakat bersetuju dengan menggunakan wali hakim ini.

Tabel 10

Nikah liar dibenarkan oleh mahkamah dengan menggunakan wali hakim

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | 8 | 40 |
| 4 | SETUJU | 9 | 45 |
| 5 | SANGAT SETUJU | 3 | 15 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁸ Uwais al Qarni Ahmadullah (Pegawai Renjer, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dalam tabel 10 terdapat 8(40%) tidak pasti, 9(45%) setuju dan 3(15%) sangat setuju terhadap peranan wali hakim yang diguna sebagai nikah liar melalui mahkamah.

Kebanyakan pasangan tidak mengetahui tentang peranan wali selain ibu bapa atau keluarga karena menyerahkan perkara wali kepada sendiket yang mengatur pernikahan tersebut.¹⁹

Nikah liar itu ada yang dilakukan di Thailand sebenar salah dari sisi undang-undang sivil, tetapi hal masih dilakukan karena yang sah di sisi syara'. Apakah masyarakat menyetujui mengenai nikah liar ini salah di sisi undang-undang sivil ini dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 11

Nikah liar salah di sisi undang-undang sivil

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | - | - |
| 3 | TIDAK PASTI | - | - |
| 4 | SETUJU | - | - |
| 5 | SANGAT SETUJU | 20 | 100 |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

¹⁹ Mokhtar Ali (Pegawai Pelancongan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Dalam tabel 11 terdapat 20(100%) responden yang semuanya bersetuju bahwa nikah liar adalah salah dari segi undang-undang sivil.

Kebanyakan pasangan yang nikah liar bersetuju bahwa nikah liar akan didenda oleh Mahkamah Syariah tetapi tidak menjadi persoalan pokok karena denda mampu dibayar dan matlamat untuk nikah liar tercapai.²⁰

Tabel 12

Nikah liar terjadi karena bapa enggan menjadi wali

| BIL | ALTERNATIF JAWABAN | JUMLAH | % |
|-----|---------------------|--------|-----|
| 1 | SANGAT TIDAK SETUJU | - | - |
| 2 | TIDAK SETUJU | 6 | 30 |
| 3 | TIDAK PASTI | 4 | 20 |
| 4 | SETUJU | 10 | 50 |
| 5 | SANGAT SETUJU | - | - |
| | JUMLAH | 20 | 100 |

Dalam tabel 12 terdapat 6(30%) tidak setuju, 4(20%) tidak pasti dan 10(50%) setuju yaitu faktor nikah liar juga disebabkan para wali yang tidak mahu memberi keizinan sebagai wali untuk nikah.

²⁰ Yusof Ahmad (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

B. Faktor penyebabnya terjadi Nikah Liar dalam masyarakat Rantau Panjang, Kelantan

Daripada angket yang dijawab oleh responden dapat dilihat faktor yang menyebabkan berlakunya nikah liar di kalangan masyarakat. Antaranya ialah seperti dorongan hawa nafsu, disebabkan oleh poligami dan faktor bapa yang tidak mahu menjadi wali kepada pernikahan.

Secara umumnya, masyarakat memandang serong (tabu) terhadap pasangan yang nikah liar. Memang benar, banyak yang negatif tentang perbuatan ini. Tapi, ada kalanya, ia dapat menyelesaikan masalah, terutamanya dalam kes wali enggan(adhol).

Apabila ayah enggan mengizinkan anaknya nikah dengan laki-laki pilihannya, anaknya berhak membawa perkara tersebut ke mahkamah. Tetapi, apabila anak membawa perkara seperti ini ke mahkamah, maka hubungan ayah dan anak akan menjadi buruk, membawa kasus begini ke mahkamah bukan penyelesaian yang baik.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa nikah di Siam (Thailand), dalam kasus wali enggan, tidak adil karena menghapuskan hak wali.²¹ Orang yang memberikan pendapat begini tidak pulak memikirkan perasaan dan keinginan anak yang terhalang. Kalau ini yang terjadi anak yang akan menanggung, bukan ayah. Namum begitu, diakui bahwa ada kalanya larangan ayah memang berdasar. Sekalipun tidak sentiasa begitu.

²¹ Ahmad Jailani(Naib Qadhi, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Menurut Pendaftar Nikah Luar Negara Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat, Thailand, Ishak Mohd,²² banyak sebab mengapa ramai pasangan Malaysia bernikah di Narathiwat. Antaranya:

1. Ingin berpoligami. Tidak dinafikan, banyak laki-laki yang ingin berpoligami memilih bernikah di Narathiwat kerana mereka tidak perlu menyertakan keizinan daripada istri pertama.
2. Tentangan keluarga. Ramai juga daripada kalangan pasangan yang bernikah di Narathiwat kerana mendapat halangan daripada keluarga masing-masing. Ada disebabkan kedudukan, fahaman politik kedua-dua keluarga ataupun kerana perbezaan umur.
3. Kelulusan lambat dan kos guaman tinggi. Jika pasangan ingin berkawin di Malaysia (terutama yang ingin berpoligami), mereka terpaksa menunggu agak lama sehingga kelulusan diberikan pejabat agama. Antara kelulusan yang diperlukan supaya pernikahan dapat disegerakan termasuklah keizinan daripada istri tua. Pasangan terpaksa melalui proses perbicaraan guaman yang remeh dan kos guaman yang tinggi. Rata-rata ada antara pasangan yang terpaksa menunggu lebih setahun untuk mendapatkan kelulusan Mahkamah Rendah Syariah. Sekiranya istri tua membuat rayuan, kasus tersebut akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah yg mungkin mengambil masa lebih 2 tahun. Mereka juga terpaksa membelanjakan kos

²²Ishak Mohd , (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 10 September 2011.

guaman yang tinggi, sekurang-kurangnya RM5500 sehingga RM10,000 untuk setiap kasus.

4. Bernikah dengan wanita tempatan. Ramai juga laki-laki Malaysia bernikah dengan wanita tempatan (warga Thailand).
5. Terlanjur dan hamil. Bagi mengelakkan keluarga mendapat tahu si wanita sudah hamil disebabkan terlanjur dengan teman laki-laki, mereka mengambil keputusan berkawin di Narathiwat. Jika si wanita bersalin dalam tempoh 4 bulan usia pernikahan, barulah anak itu dianggap anak luar nikah.
6. Belanja kawin mahal. Tidak dinafikan, belanja perkawinan yang semakin meningkat menyebabkan pasangan memilih untuk bernikah di sempadan. Kata Ishak, mereka tidak menetapkan kadar bayaran mas kawin, terpulang kepada kemampuan si laki-laki. Yang wajib hanya RM300 sebagai yuran proses pernikahan.
7. Sembunyi demi kerjaya. Dikhabarkan juga, ada berkawin di Narathiwat karena si laki-laki anggota polis atau tentera. Mengikut peraturan, anggota polis atau tentera, tidak dibenarkan berpoligami.

Secara umumnya, masyarakat memandang serong(tabu) terhadap pasangan yang nikah lari. Memang benar, banyak yang negatif tentang perbuatan ini. Tapi, ada kalanya dapat menyelesaikan masalah, terutamanya dalam kes wali enggan. Apabila berlaku keadaan terdesak seperti ingin mengelakkan maksiat daripada berlaku berterusan maka diharuskan akad

nikah dilakukan oleh pasangan berkenaan dengan memenuhi syarat seperti wali, saksi dan sebagainya.

C. Dampak Pernikahan Liar Terhadap Keluarga Di Rantau Panjang Kelantan

Kebanyakan pasangan mengambil jalan singkat memilih nikah liar dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, sekiranya mereka sedang mencipta masalah baru yang lebih besar terutama golongan wanita atau si istri sendiri. Beberapa keburukan jelas daripada nikah liar di Rantau Panjang dapat disimpulkan seperti di bawah.²³

a. Merusakkan sistem kekeluargaan yang utuh.

Islam sangat menggalakkan umatnya supaya melakukan proses perkawinan secara teratur dan beradab. Tidak pernah sekali pun kita membaca sirah Rasulullah SAW membenarkan para sahabatnya nikah liar bagi sebarang masalah dihadapi sekalipun, sebaliknya Baginda sendiri yang akan mewakili sahabatnya bagi upacara peminangan dan selanjutnya.

Dalam kasus Marlia Bte Muhammad terhadap suaminya Abdullah Bin Che Ya Kes Mal bil:01003-010-339/03 mengenai ketidakadilan suami terhadapnya dari segi uang nafkah, tuntutan zahir dan kebuntuhan masa bersama sudah mulai beransur dikit. Hubungan mesra antara keduanya mulai renggang ketika si suami mula berpoligami. Manakala hubungan antara bapa dan anak-anak mula renggang

²³ News/BH/Thursday/Agama/201001

kerena perasaan anak sudah terguris ketika mereka sudah ketahuan bahwa bapa mereka sudah punyai istri yang lain selain daipada ibunya. Dalam kasus ini pihak mahkamah telah memutuskan pembahagian waktu antara istri dan hubungan anak-anak kepada bapa mereka seperti dahulu. Akibat dari perkawinan bapa mereka dengan perempuan lain menyebabkan nanak-anak mengalami tekanan perasaan .Lantaran menimbulkan susanana yang tidak aman pada anak-anak untuk meneruskan persekolahan kerana kasus ini menjadi bahan sindiran pada mereka di sekolah.

b. Menghilangkan hak wali.

Wali adalah rukun nikah menurut kebanyakan ulama. Dalam masyarakat . Hak wali dalam menjaga amanahnya amat penting demi menjaga kerukunan institusi rumahtangga, kasih sayang wali terhadap anak dalam memelihara keturunan yang baik di mana hak anaknya dijagai dan terpelihara nasabnya. Tidak semudah itu pihak lelaki ingin melakukan nikah liar terhadap anaknya tanpa jaminan terhadap status perkawinan tersebut. Pihak wali berhak memohon kepada Mahkamah Syariah untuk perintah mufarakah terhadap perkawinan yang dilakukan.

Dalam kasus Azizah bte Mat lawan Mat bin Salleh (1976, Jld. II, I JH)²⁴ mengenai wali enggan di Mahkamah Syariah Pasir Mas, Yang Arif Kadhi

²⁴ Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-339/03

Mahmood bin Lebai Man (pada masa itu) memutuskan, perempuan itu berhak mendapat wali Raja atau hakim untuk berkawin dengan Mansor bin Isa dengan mas kawin dan belanja yang tidak ditetapkan.

Fakta kasus itu adalah seperti berikut: Seorang perempuan telah menuntut di Mahkamah Kadhi supaya ia dikawinkan dengan Mansor bin Isa secara wali hakim karena bapanya enggan mewalikannya dalam perkawinan itu dengan mas kawin sebanyak RM80.00 dan hantaran RM202.00 tunai.

Pihak bakal suami telah mencuba beberapa kali untuk meminang perempuan tetapi dihalang oleh bapa dengan alasan "Tunggulah dulu sehingga anak perempuannya mendapat pekerjaan". Bakal suami itu bekerja sebagai Pembantu Audit. Dengan keputusan bersama maka mereka berkawin di Rantau Panjang melalui sendiket yang sememangnya mengaturkan perkawinan bagi pasangan yang menghadapi masalah.

c. Mengeruhkan hubungan kekeluargaan.

Antara hikmah digalakkan perkawinan dalam Islam adalah bagi mengembangkan silaturrahim antara sesama Muslim. Semakin jauh kaitan kekeluargaan, semakin baik bagi tujuan itu.²⁵

Namun, nikah terjadi sebaliknya. Bukannya mengembang silaturrahim malah bertambah menguncup. Anak perempuan dan bapa akan bermusuhan

²⁵ Ismail Marzad, (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 11 September 2011.

apatah lagi menantu. Keluarga kedua-dua pihak akan menyalahkan antara satu sama lain dan lebih parah lagi akan berlaku pergaduhan.

Dalam kasus ini dapat dijelaskan apa yang terjadi apabila anaknya telah dipoligamikan oleh menantu. Hubungan kekeluargaan yang terjadi kepada rakan saya iaitu Nadhiah Bt Karim, di mana suaminya telah menikah di Selatan Thailand dengan isteri yang lain, ketika rahsia pernikahan suaminya telah pecah menimbulkan satu suasana yang tegang dan dingin diantara mertua dan ipar duai. Ketika pernikahan mereka sudah diketahui maka orang tua Nadhiah telah menghalau menantunya dari rumah kerana menantunya telah melakukan nikah liar ini. Seluruh ahli keluarga telah meminggir suami Nadhiah.

d. Pernikahan diragui kerana kurangnya syarat atau rukun.

Sudah banyak terjadi sindiket pernikahan (nikah tidak rasmi) di merata negeri Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kedah, Kelantan dan lain-lain. Mereka tidak menghitungkan hukum halal haram yang penting bayaran diterima bagi pasangan yang terdesak. Kadang-kadang juga sindiket (calo) yang menguruskan nikah liar secara sah di negara jiran.

Walau apapun cara dan mekanisme yang pasangan gunakan semasa nikah lari, satu hakikat yang terpaksa mereka terima iaitu keperluan kepada sijil nikah. Untuk mendapatkan sijil nikah, perkawinan tersebut hendaklah didaftarkan terlebih dahulu di Pejabat Pendaftar Perkahwinan Perceraian &

Rujuk (PPR) di Jabatan Agama²⁶ di mana pasangan tersebut bermastautin. Akhirnya, tidak ada jalan lain melainkan pasangan terbabit terpaksa mengalah.

Mahu tidak mahu, mereka kena juga berhadapan dengan proses perundangan untuk memperolehi sijil nikah. Antara proses yang terlibat ialah mengesahkan kesahihan perkawinan pasangan samada di peringkat Pendaftar PPR atau di Mahkamah Syariah. Jika perkawinan yang dijalankan itu sah tetapi bertentangan dengan Undang-Undang keluarga Islam di negeri-negeri berkaitan, pasangan tersebut terpaksa berhadapan pula dengan tindakan undang-undang iaitu nikah tanpa kebenaran. Selepas proses undang-undang dilaksanakan, baharulah suatu perkawinan itu dapat didaftarkan di Jabatan Agama.

Apa yang lebih merumitkan ialah, ada ketikanya pernikahan pasangan itu tidak menepati kehendak hukum syarak. Syarat rukun pernikahan yang tidak dipenuhi adakalanya berlaku menyebabkan pernikahan tersebut diputuskan tidak sah dan seterusnya difaragkan atau dibubarkan. Hal ini sudah tentu mendatangkan kesulitan kepada pasangan itu.

²⁶ Zainuri Abdullah, (Pegawai Agama Rantau Panjang) *Wawancara* di Rantau Panjang, 10 September 2011.

Pendek kata mereka tidak boleh lari dari mendaftarkan perkawinan mereka untuk mendapatkan sijil nikah. Sijil nikah amat penting untuk tujuan-tujuan lain. Untuk mendaftarkan anak ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) juga perlukan sijil nikah. Cuba bayangkan apabila si anak tidak dapat dibuktikan dengan dokumen siapa bapa kandungnya, kepada siapa nanti ia dibin atau dibintikan? Apakah pasangan itu rela apabila JPN meletakkan status anak itu tanpa bapa?²⁷

Begitu juga halnya apabila mula menghantar anak ke sekolah dalam peringkat Pra-Sekolah atau Tahun 1. Untuk mendaftarkan anak tersebut, pihak sekolah memerlukan pula data dan dokumen berkaitan mengenai anak dan ibubapa. Salah satu dokumen asas yang diperlukan ialah sijil nikah ibubapa. Dalam hal ini, ketiadaan sijil nikah ibubapa anak tersebut memberi kesulitan dalam proses pendaftaran persekolahan anak.

Rupa-rupanya, banyak juga implikasi atau kesan negatif yang sukar diterima sekiranya suatu perkawinan itu tidak didaftarkan. Sebab itulah, masyarakat kita perlu diingatkan bahwa walau besar manapun cabaran pasangan yang hendak bernikah itu, janganlah pula sampai mengabaikan undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Andai keizinan wali sukar diperolehi, ambillah jalan untuk memohon kebenaran menggunakan wali hakim di Mahkamah Syariah. Hindarilah mengambil tindakan nikah liar yang akhirnya menyusahkan diri sendiri di kemudian hari.

²⁷ Jurnal Hukum Jld XII, Bhg. 1, Jun 2010M

D. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan akibat nikah liar di Thailand

Perkawinan liar yang dilakukan di Thailand sering menimbulkan masalah, ada kalanya perkawinan pasangan itu tidak memenuhi kehendak hukum syarak. Apabila rukun pernikahan yang tidak dipenuhi, adakalanya menyebabkan perkawinan tersebut diputuskan tidak sah dan seterusnya dibatalkan (difaraq) atau dibubarkan. Hal ini sudah tentu mendatangkan kesulitan kepada pasangan itu.

Akan tetapi apabila perkawinan itu telah memenuhi ketentuan hukum syara' (melengkapi syarat an rukun nikah) maka perkawinan tersebut ada yang sah menurut agama sekalipun tiak memenuhi ketentuan undang-undang Negara.

Terhaap perkawinan liar yang dilakukan diluar Negara seperti yang terjadi di Thailand, apabila perkawinan itu dilakukan di kantor pejabat agama yang rasmi di Thailand, maka perkawinan tersebut dapat dibenarkan di wilayah Kelantan, dengan cara mengisbatkan nikah I mahkamah Syariah Rendah di seluruh wilayah negeri Kelantan berdasarkan enakmen Unang-Unang Keluarga 2002. Akan tetapi apabila nikah liar tersebut dilakukan diluar kantor pejabat agama rasmi di Thailand, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan (diisbatkan) di Mahkamah Syariah Rendah tersebut.

Kemungkinan melakukan nikah liar di Thailand adalah kerana peraturan perkawinan di Thailand untuk umat Islam tidak mensyaratkan beberapa syarat yang di tempat lain menjadi syarat.

Oleh sebab itu, kemungkinan menikah tanpa wali nasab mudah dilakukan, demikian juga perkawinan poligami tanpa istri sangat mungkin terjadi. Untuk itu beberapa hal yang patut dianalisa dalam perkawinan tersebut .

Bernikah di luar negara tanpa wali adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i? Memang ada mazhab yang membenarkan seperti Hanafi yang tidak mensyaratkan perlu adanya wali dalam majlis akad.²⁸

Namun yang demikian, walaupun sah dari segi hukum, namun dari segi undang-undang, anda masih bersalah kerana bernikah di luar negara (juga termasuk di mana-mana) sekiranya tanpa kebenaran daripada Pejabat Agama dan badan yang berautoriti.

Denda akan dikenakan sekiranya perkawinan di luar negara tidak didaftarkan dalam tempoh 6 bulan selepas perkawinan. Bahkan untuk mendaftar selepas itu, bukanlah sesuatu yang mudah. Nak kena berurusan dengan 'kounsel' dulu dan macam-macam lagi.

Seterusnya..undang-undang yang ada bukanlah untuk menganiaya, tetapi menjaga. Terutamanya kaum wanita/gadis/perempuan.

Pensyaratan adanya wali nikah bagi pengantin wanita adalah madzhab mayoritas ulama. Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menganggap tidak sah pernikahan tanpa persetujuan wali dari pihak wanita.

²⁸Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982), h. 77

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita dewasa yang merdeka dan berakal sempurna berhak menikahkan dirinya sendiri dan hanya dianjurkan untuk minta persetujuan wali bila calon suaminya dianggap se-kufu` (sepadan). Dalam hal ini sama saja apakah wanita itu masih gadis atau sudah janda.

Ada lagi madzhab Daud Azh-Zhahiri yang memandang bahwa wali disyaratkan hanya untuk gadis, sedangkan janda tidak diwajibkan memakai wali.

Bila ditinjau dari segi dalil dan berbagai sisi syariat, pendapat mayoritas ulamalah yang lebih kuat. Banyak hadits yang mencantumkan wali sebagai syarat pernikahan dan sebuah akad nikah tidak sah bila tidak disetujui oleh wali sang pengantin wanita. Berikut di antaranya:²⁹

" : "

Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda:³⁰

| | | | | | | |
|-------|----|-------|--------|----|-------------------|-------------------|
| "من | هم | الذين | تزوجوا | من | (وفيما يتعلق | معها، بحيث لا يحق |
| | | | | | الأعضاء التناسلية | يختلفون |
| لها) |) | المهر | (| | هو) | الذين ليس |
| | / | | | | منأولئك | |
| لديهم |). | " | | | وابن ماجه) | |

²⁹ At-Tirmidzi, *as-Sunan*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1398 H.

³⁰ *Ibid*,

Maksudnya: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batal. Jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia (istri) berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari kahalalan kemaluannya. Andai mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah)

(حسين ، " (شاهدين)).

Maksudnya: Dari Imran bin Hushain, Rasulullah saw bersabda, "Tidak (sah) pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi." (HR. Ahmad)

Hadits-hadits di atas kualitasnya shahih dan tidak terbantahkan dari segi sanad, selain banyak *mutabi'* (penguat dengan jalur yang sama) juga banyak *syahid* (penguat dengan sanad berbeda). Pembahasan tentang ke-shahihan hadits-hadits di atas dapat dilihat dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil*, no. 1840, 1858, 1865.

Mengingat kuatnya dalil-dalil para jumhur maka kami berkesimpulan bahwa tidak sah seorang wanita menikah tanpa persetujuan walinya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau melalui wali lain bila wali terdekat masih ada, terutama ayah. Dikecualikan dari hal ini adalah ketika terjadi kasus *wali 'adhil*.

Kata 'Adhil () (dengan memakai huruf dhad) artinya mempersulit atau menekan atau menahan. Dalam fikih pernikahan ada istilah '*adhil al-wali* artinya wali si wanita mempersulit atau tidak mau menikahkan wanita

dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang menjadi pilihan si wanita itu dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat.

Seorang wali dilarang melakukan ‘adhl (penyulitan), dan larangan ini langsung diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur`an:³¹

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."(Qs. Al-Baqarah : 232).

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma'qil bin Yasar, dia berkata, "Aku pernah menikahkan salah seorang adikku dengan seorang pria. Lalu dia menceraikan adikku itu, sampai ketika selesai masa iddahnya dia datang kembali melamar adikku tadi. Lalu aku katakan padanya, "Aku sudah menikahkanmu dengannya, dan aku buat engkau mulia dengan itu tapi kau malah menceraikannya. Tidak! Kau tak kan mendapatkannya lagi selamanya!!" Dia sendiri seorang pria yang baik tak bermasalah, dan adikku pun masih menginginkannya kembali, sehingga turunlah ayat (surah Al-Baqarah : 232). Aku pun mengatakan, "Sekarang lakukanlah wahai Rasulullah." Akhirnya Ma'qilpun menikahkan pria tadi kembali dengan adiknya." (HR. Al-Bukhari dalam shahihnya, no. 2087)

Dengan demikian, seorang wali termasuk ayah dilarang mempersulit anaknya bila ingin menikah dengan pria yang sudah dicintai dan memang tidak ada masalah dari sisi akhlak dan agama.

³¹ Abdullah Basmeikh, op.cit h. 90

Rasulullah SAW bersabda:³²

" ، والدين (الحياة) هل أنت (القديسين) التشهير ، إن لم يكن (عليها ثميتزوج) ."

Maksudnya: "Jika datang melamar kepada kalian (para wali) seorang lak-lakii yang kalian ridhai (kehidupan) agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (terima lamarannya), kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan melebar di muka bumi." (HR. At-Tirmidzi, no. 1084, Ibnu Majah, no. 1967. Teks di atas dalam riwayat At-Tirmidzi. Al-Albani menganggapnya *hasan* sebagaimana dalam *Irwa' Al-Ghalil*, no. 1868).

Bila seorang wali mempersulit dengan tidak mau menikahkan anaknya dengan pria idamannya dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, maka si anak hendaknya mengajukan masalah ini kepada hakim. Lalu, hakim yang akan menikahkan anak tersebut dengan pria itu.

Dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu undang-undang perkawinan di Indonesia pasal 23 ayat 2 disebutkan: "Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Jadi, bila ada pasangan yang mendapat halangan dari wali hendaknya mengajukan masalah ini ke pengadilan agama baik sendiri maupun didampingi pegacara. Itulah cara yang syar'i dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan kawin lari.

Dalam masalah pernikahan, orang tua yang baik tentu tidak akan rela putra dan putrinya mendapatkan pasangan yang akan menyengsarakan kehidupan sang

³² *Ibid*, At-Tirmidzi, as-Sunan

anak. Semua orang tua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang membahagiakan dan menyejahterakan.

Hanya saja, terkadang cara pandang mereka dalam menentukan kebahagiaan itu yang berbeda dengan si anak. Di sinilah terkadang terjadi gesekan kepentingan, sehingga tak jarang berujung kepada masalah perkawinan.

Meski demikian seorang anak hendaklah senantiasa menempatkan keridhaan orang tua sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mengingat Rasulullah SAW sudah berpesan:³³

" (هو في ، والمسنين ، "

Maksudnya: "Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua." (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam kitab *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 2501).

Bahkan perintah orang tua juga wajib ditaati dalam masalah pemilihan dan pemutusan jodoh selama alasannya dibenarkan oleh syariat. Pernah suatu ketika Umar bin Al-Khathab memerintahkan puteranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Abdullah tidak bersedia karena dia masih mencintai istrinya itu, lalu kasus mereka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau berkata kepada Abdullah, "Ceraikan dia!" (HR. Abu Daud dalam sunannya, no. 5138, At-Tirmidzi, no. 1189, Ibnu Majah, no. 2088, dishahihkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil* juz 7 hal. 136-137).³⁴

³³ *Ibid*, At-Tirmidzi, as-Sunan

³⁴ *Ibid*

Artinya, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk patuh kepada ayahnya. Ini semua lantaran sebab yang dipastikan dapat dibenarkan agama, sehingga Umar tidak menyukai menantunya itu.

Kasus serupa pernah terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal, di mana ada seorang pria mendatangi beliau mengadukan bahwa ayahnya menyuruhnya menceraikan istrinya, tapi ia masih mencintai istrinya itu. Imam Ahmad mengatakan, "Kalau begitu jangan ceraikan istrimu." Pria tadi mengatakan, "Bukankah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya karena diminta ayahnya, Umar?" Imam Ahmad menjawab, "Apakah ayahmu sama dengan Umar?!"³⁵

Syekh Al-'Utsaimin (salah seorang ulama besar dari Arab Saudi, al-marhum) memberi alasan dalam kasus ini, "Umar kita pahami dengan yakin bahwa ia tidak akan menyuruh Abdullah menceraikan istrinya tanpa alasan syar'i, yang bisa jadi tidak diketahui Abdullah. Karena, mustahil rasanya Umar meminta anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab yang syar'i, itu sangat jauh kemungkinannya."³⁶

Dengan kata lain, kalau tingkat ketakwaan ayah orang tadi sudah sama dengan Umar (dan itu tidak mungkin) atau paling tidak terkenal dengan kesalehannya barulah si anak wajib mentaatinya dalam nikah atau cerai.

³⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1987) hal 108.

³⁶ Al-Hilali, Salim bin 'Id, Syaikh, *Riyadhus-Shalihin*, (Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi & Maktabah al-Ghazali, Beirut, tanpa tahun), h.216

Kasus di atas adalah untuk anak laki-laki yang tidak terikat dengan keputusan orang tua dalam hal menentukan jodoh. Apalagi untuk anak perempuan yang wajib mendapat restu walinya untuk menikah.

Maka, jika orang tua tidak setuju dengan calon menantu³⁷ prianya dengan alasan yang bisa dibenarkan dalam agama ataupun logika, hendaknya si gadis menurut. Insya Allah itu akan lebih selamat dunia dan akhirat. Namun bila alasannya tidak dapat diterima secara agama maupun logika, maka hendaknya minta bantuan penasehat untuk memberi penyadaran kepada si orangtua. Dalam keadaan *dead lock* atau orang tua melakukan '*adhl*' (penahanan nikah tanpa alasan kuat) maka si anak punya hak untuk mengajukan masalah ini ke pengadilan agama.

Perkawinan menjadi sah sekiranya menepati rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dari segi hukum syarak.³⁸

Dari segi undang-undang, perkawinan perlu didaftarkan di Mahkamah Syariah dan pasangan akan didenda karena berkawin tidak mengikut prosedur.

Mereka yang berkawin lari beranggapan walaupun ia merupakan kesalahan, tetapi ia bukan masalah yang berat. Ini karena perkawinan yang sah tetap boleh didaftarkan melihat kepada tempat pernikahan dijalankan itu berada lebih dua marhalah (lebih kurang 91 kilometer) dari tempat tinggal wali. Akan tetapi sebenarnya, perkara yang lebih penting daripada jarak jauh itu adalah penafian bapa sebagai wali itu sama ada munasabah atau tidak.

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1992), h. 59.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), h. 78

Wali hakim hanya boleh memainkan peranan dalam keadaan bapa masih wujud, sekiranya terdapat sebab-sebab yang dibenarkan, iaitu dalam keadaan yang memenuhi hukum syarak. Sebaliknya, sekiranya keengganan wali itu disebabkan alasan yang munasabah, maka tidak wujud ruang bagi mana-mana wali hakim untuk mengambil peranan. Dan yang lebih penting lagi untuk diketahui, keengganan wali atas alasan yang munasabah boleh membatalkan pernikahan tersebut.³⁹

Bidang kuasa Peruntukan sudahpun wujud dalam Seksyen 13(b) Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahwa, “Sesuatu perkawinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:

- (a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut hukum syarak; atau
- (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali raja mengikut hukum syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi”.

³⁹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2008), h. 65

Sebenarnya konsep dua marhalah bagi tujuan pernikahan sebegini hanya sesuai bagi keadaan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara dan tidak memungkinkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan tersebut untuk kembali ke tanah air dalam tempoh tertentu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 31 Akta Undang-undang Keluarga Islam.

Dalam keadaan ini, sekiranya perkawinan yang hendak dilangsungkan itu tidak mencapai rukun nikah seperti lazimnya iaitu tidak adanya wali, maka barulah wali hakim akan mengambil tempat wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran-penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya nikah liar pada masyarakat adalah:
 - a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena pelbagai faktor seperti poligami. Pernikahan ini terjadi kerana berlakunya pernikahan kali kedua(poligami) yang disembunyikan taraf perkawinan mereka kerana dibimbangi dapat diketahui oleh istri yang pertama. Ini dapat dilihat pada kes yang melakukan poligami, alasan yang diberikan oleh pihak laki-laki ialah kerana istri pertamanya tidak setuju dan prosedur untuk poligami adalah sukar sedangkan pihak laki-laki amat memerlukan zuriat kerana sehingga kini beliau belum dikurniakan anak.
 - b. Nikah liar terjadi kerana pasangan terlalu mengikut hawa nafsu semata-mata, perkawinan ini terjadi kerana berlakunya hamil diluar nikah di mana keadaan si perempuan telah hamil untuk mendapatkan status mereka harus melakukan nikah liar ini demi menyelamatkan anak yang dikandung. Kasus ini banyak terjadi

demikian menyelamatkan maruah dan status anak yang dikandung maka kebanyakan anak gadis yang hamil di luar nikah telah mengambil tindakan segera melakukan nikah liar kerana bimbang diketahui oleh pihak keluarga atau pun masyarakat sekeliling.

- c. Laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan tersebut tidak berkelakuan baik. Kebanyakan laki-laki yang melakukan nikah liar ini mempunyai sikap lepas tangan terhadap tanggungannya. Si istri takut untuk mendapat hak yang sebenar kerana bimbingan rahsia nikah liar mereka akan pecah pada pengetahuan umum. Lelaki yang banyak melakukan kasus ini biasanya laki-laki yang mempunyai rekod seperti penagih dadah. Sebelum nikah pelbagai janji manis yang diberikan kepada anak gadis tetapi selepas nikah yang berlaku adalah sebaliknya.

2. Dampak pernikahan liar masyarakat Rantau Panjang menimbulkan rasa tersinggung dengan kelakuan pasangan yang berkawin sama ada oleh keluarga laki-laki maupun perempuan. Dampak ini bisa terjadi seperti akan merusakkan sistem kekeluargaan yang utuh, perkawinan yang dibina akan hancur setelah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dalam melakukan nikah liar dengan istri baru, perbuatan nikah liar ini mampu menghilangkan hak wali pasangan yang melakukan nikah liar ini telah lari dari prosedur biasa dengan mengambil wali hakim sedangkan dalam rukun nikah perlu kepada wali nasab dan pernikahan ini mampu mengeruhkan suasana hubungan

kekeluaragaan ekor dari perkawinan ini hubungan mertua mulai renggang begitu juga dengan ipar duai.

3. Nikah liar yang mengikuti aturan Fiqh dan dianggap sah oleh syarak dan salah di sisi undang-undang sivil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

Bagi memudah dan memantapkan lagi urusan berkaitan dengan munakahat orang Islam di Malaysia, maka berikut adalah beberapa cadangan yang perlu dilakukan sama ada oleh kerajaan atau agensi-agensi yang terlibat dengan urusan tersebut:

- (1) Penerangan secara berterusan kepada masyarakat berkaitan dengan konsep kawin liar yaitu lebih banyak buruk dampaknya daripada kesan baik.
- (2) Perlu mewujudkan satu Akta khusus orang Islam secara khusus, kemas dan seragam bagi memudahkan sebarang rujukan dibuat apabila timbul persoalan tentang kawin liar.
- (3) Perlu ada keseragaman dan undang-undang yang sama adil antara kedua Negara yang terlibat dalam bab kawin liar supaya undang-undang nikah liar yang sedia ada tidak di pandang remeh dan dipersendakan. Rata-rata masyarakat mengikuti aturan hokum dan undang-undang yang berlaku.
- (4) Kepada masyarakat diluar sana harusnya hati-hati dalam melaksanakan satu-satu perkawinan, ini kerana perkawinan itu adalah bersifat luhur bagi

pasangan yang melakukan nikah liar mempunyai dampak yang buruk pada masa akan datang di mana pengurusan pendaftaran pada anak atau penceraian amat sukar dilakukan anadai pernikahan ini tidak didaftarkan kembali di negaranya.

(5) Perlu penegasan kepada pernikahan poligami, pasangan ini jelas menyembunyikan status pernikahan mereka daripada pengetahuan istri pertama, keluarga dan masyarakat umumnya tetapi hasil perbuatan mereka akan menimbulkan fitnah yang besar kepada istri kedua, ketiga ataupun keempat. Kebanyakan kes poligami banyak terjadi suami akan tidak berlaku adil kepada istri-istri barunya terutama dari segi bermalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, Cetakan Keenam, 1988.
Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
- Abdul Halim Nasir, *Panduan ke tempat-tempat bersejarah Kelantan*, (Jabatan Muzium Negara, Kuala Lumpur, 1979)
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diktat Kuliah, (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002),
- Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, juzu' 4, terjemahan Bahasa Melayu oleh Syarif Zaini Daud, Cetakan Rawa Pulau Pinang, t.t)
- Al-Amidy, Ali Bin Abi Ali. 1967. *Al-Ahkam Fi Usul al-Ahkam*. Al-Qahirah: Muassasah al-Halabi. 1967)
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Beirut: Darul Fikr, t.t.),
- Al-Hilali, Salim bin 'Id, Syaikh, *Riyadhus-Shalihin*, (Daar Ihya' at-Turats al-'Arabi & Maktabah al-Ghazali, Beirut, tanpa tahun),
- Abdul Samat Musa & Zuliza Kusrin (2002), *Undang-undang Perlembagaan dan Pentadbiran*. Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Iarak Iauh UKM
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995
- Abdul rahman I. DOI, ph.D, *Perkawinan dalam syari'at Islam*, (1998), Abu Daud, *as-Sunan*, Dar al-Hadits, Syria.
- Amir Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Penerbit Kencana, Jakarta, 1998)
- Alias Muhammad, *Kelantan potitik dan dilemma pembangunan*, (Penerbitan Utusan Malayu (M) Bhd., Kuala Lumpur, 1975)
- Al-Imam al-Alamah Taqhiyudin Abi Bakar bin Mohammad al-Husaini al- Husna al-Damasykhi al-Shafie *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ihtisar*, al-Maktabah al-Taufiqih, Mesir
- Al-Syeikh Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2 & jilid 3.
- Amir Saryfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Penerbit Kencana, Jakarta
- At-Tirmidzi, *as-Sunan*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1398 H.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984)

Data Mahkamah Syariah Pasir Mas, Unit Penerbitan, (Pasir Mas, 2010) *J/MRIR/109/02*

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 1990

Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Avyrouz, Yogyakarta, 2000)

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, (Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1995)

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas. Kasus Jenayah No : 11009-143-0035-2003

Berita Harian, 15 Januari 2003.

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas, No : 11009-143-0036- 2003

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01 003-010-387/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2010 bil: 01003-010-390103/05

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-274/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-333/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-0 10-330/03

Fail Kasus Mahkamah Syariah Pasir Mas Tahun 2009 bil: 01003-010-339/03

Ibrahim Syukri. *History of the Malay Kingdom of Patani*. Center for International Studies, (Ohio University, Athens, Ohio, 1985)

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982),

M. Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit : PT. Lentera Basritama.

Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum*

Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, t.th.)

Jabatan Perangkaan Negeri *Kelantan, Pecahan Kawasan Tanah di Kelantan*, (Kota Bharu, Dian Darulnaim, 2000)

Jurnal Hukum Jld XII, (Bhg Penerbitan Universitas Malaya, Kuala Lumpur. 1, Jun 2010)

Malaysia Law Jurnal, Jabatan Kehakiman syariah Malaysia. (Unit Penerbitan JAKIM . 1999)

Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX* 1998)

Nik Muhammad b.Nik Mohd Salleh, *Jorrtal sejarah Kelantan*, Kota Bharu, Kelantan, 1975

Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-undang Keluarga dalam Islam*, Syarikat Dian Sdn.Bhd, Kota Bharu, Kelantan.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2008),

News/BH/Thursday/Agama/201001

Rahmat bin Sharipan. *Pengembang Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1979)

Sa'ad Shukri bin Haji Muda, Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh & Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi. *Detik2 Sejarah Kelantan*. (Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan, 1971)

Sejarah Ringkas: Kerajaan Jembal Kelantan, terbitan Pertubuhan Kerabat Raja Jembal Kelantan,(Kota Bharu, Urusetia Jabatan Penerangan Kelantan)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Syeikh Ali Hassan Ahmad, *Munakahat Membahas Soal-soal Perkawinan Dan Rumahtangga*, (Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur, 1997)

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990)
Wahbah Zuhaili, *Usul al Fqh al-Islami*, jil. I, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004)

Wahbah al-Zuhaili, *Nazaariyat al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a Qanun al-Wadi'e*. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1982)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. (Tarsito, Bandung, 1990)

Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur, 2004)

_____. (2004). *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia: Sebelum Dan Menjelang Merdeka (The Administration Of Islamic Law In Malaysia: Before And The Coming Of Independence)*. Kuala Lumpur: Utusan Publications And Distributors.

Wawancara

Abdul Fatah shafie (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Ahmad Jailani (Naib Qadhi, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Aziz Deraman (Pegawai Kaunseling, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Ishak Mohd , (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 10 September 2011.

Ismail Hasim Mehat (Pegawai Pendaftar Mahkamah Syariah Pasir Mas, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Ismail Marzad, (Pegawai Kastam Rantau Panjang) *Wawancara* di pejabat Imigresen Rantau Panjang, 11 September 2011.

Marzuki Zakaria (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Muhammad Al Tarmiziy Bashar (Pegawai Agama Majlis Agama Islam Kota Bharu) *Wawancara* Kota Bharu, 9 Oktober 2011.

Muhammad Noor Saman (Pegawai Pencegah Penyeludupan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 29 Oktober 2011

Muji Abbas (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Mokhtar Ali (Pegawai Pelancongan, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Norhidayah Abdullah (Ketua Unit Bagian Kuatkuasaan Kastam, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Sarpan Aliman (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Subari Deraman (Naib Qadhi Daerah Yala, Thailand, Thailand,) *Wawancara*, 30 Oktober 2011

Sulaiman Yahasok (Penghulu Kampung Baru, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 28 Oktober 2011

Supian Sori (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Uwais al Qarni Ahmadullah (Pegawai Renjer, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Yusof Ahmad (Responden, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011

Zainuri Abdullah, (Pegawai Agama Rantau Panjang) *Wawancara* di Rantau Panjang, 10 September 2011.

Zulkifli Mahusain (Pegawai Imigresen, Rantau Panjang, Kelantan) *Wawancara*, 26 Oktober 2011